

# ARSIP

Media Kearsipan Nasional

## REKAM JEJAK PEREMPUAN INDONESIA





*Selamat & Sukses Kepada:*  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
ATAS PENGHARGAAN BAKOHUMAS  
SEBAGAI  
JUARA 1 KATEGORI CINDERAMATA UTAMA DAN  
NOMINASI PENERBITAN INTERNAL  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/  
PERGURUAN TINGGI NEGERI



Nominasi Penerbitan Internal (*In House Magazine*) untuk Majalah ARSIP "Edisi Khusus Perbatasan"



Juara 1 Kategori Cinderamata Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Perguruan Tinggi Negeri untuk cinderamata "Arsip Surat Emas"

# DAFTAR ISI



## 5 PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SETARA, BUTUH BUKTI REKAM JEJAK

Tak dapat dipungkiri bahwa separuh dari penghuni dunia adalah perempuan. Pengakuan itu sudah berlangsung berabad-abad yang lampau hingga kini, namun dalam kenyataannya dunia saat ini dikuasai oleh lelaki. Perempuan masih dianggap pelengkap atau pemantas demi keramaian maupun keindahan dunia.

### DARI REDAKSI ————— 4

### Kris Hapsari & Nia Pertiwi: ————— 17

#### KEBANGKITAN PEREMPUAN INDONESIA

### Dwi Nurmaningsih : ————— 20

#### ARSIP TOKOH PEREMPUAN DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP

### Ina Mirawati ————— 24

#### “POTRET KEGIATAN PEREMPUAN INDONESIA DI MASYARAKAT (TEMPO DOELOE) DALAM BINGKAI

### Dharwis Widya Utama Yacob : ————— 28

#### POCUT MEURAH INTAN (1833-1937) : WANITA HELDHAFTING (GAGAH BERANI) ACEH YANG TERLUPAKAN

### Tyanti Sudarani : ————— 31

#### EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM PERDAGANGAN LADA DI BANTEN

### Langgeng Sulistyo Budi : ————— 36

#### KISAH DI BALIK ARSIP : KETIKA PEREMPUAN INDONESIA (MULAI) BERKARYA



## 10 Gayatri Kusumawardani : PERAN IBU DALAM PENDOKUMENTASIAN ARSIP KELUARGA

Peran seorang ibu dalam pengelolaan arsip di lingkungan rumah tangga adalah sebagai pendukung kesejahteraan rumah tangga. Seorang Ibu juga dapat berperan sebagai arsiparis di lingkungan rumah tangga yang nantinya akan menumbuhkan dan menciptakan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan keluarga sebagai hasil terdokumentasinya arsip di lingkungan rumah tangga.

### Toto Widyarsono : ————— 39

#### WAJAH SENI RUPA INDONESIA PADA ARSIP PERSONAL DR. MELANI

### Adhie Gesit Pambudi : ————— 44

#### SOEMARTINI DAN MEILINK-ROELOFS: DUA PEREMPUAN PELETAK DASAR KERJA SAMA KEARSIPAN INDONESIA-BELANDA

### Susanti : ————— 48

#### SULASIKIN, “KARTINI” SEPANJANG MASA

### Sari Wulandari : ————— 51

#### NAMAKU ZAHIRA ASYIFA

### DWP ANRI, ————— 54

#### SATU SARANA PENYEBARAN INFORMASI DAN AJANG SILATURAHMI

### LIPUTAN ————— 56



## 13 Azmi AKSESIBILITAS DAN PENGOLAHAN ARSIP STATIS BERTEMA PEREMPUAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN

Sebagai informasi terekam (*recorded information*), arsip statis bertema perempuan yang dikelola lembaga kearsipan merupakan representasi kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki fungsi sebagai memori kolektif, identitas, jati diri bangsa, dan bahan penelitian.



#### KETERANGAN COVER

Para perempuan pribumi di salah satu sekolah Kristen di Yogyakarta sedang praktik membuat (Data Informasi Arsip Foto Jawa Tengah Koleksi KIT No. 0319/068, ANRI-Jakarta)

### Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,  
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,  
Deputi Bidang Konservasi Arsip,  
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,  
Deputi Bidang Informasi &  
Pengembangan Sistem Kearsipan

### Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

### Pemimpin Redaksi:

Dra. Listianingtyas M.

### Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

### Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si,  
M. Ihwan, S.Sos, Wawan Sukmana, S.IP  
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,  
Drs. Langgeng Sulistyio B

### Redaktur Pelaksana:

H. Siti Hannah, S.AP,  
Neneng Ridayanti, S.S.,  
Bambang Barlian, S.AP, Susanti, S.Sos

### Sekretariat:

Sri Wahyuni, Hendri Erick Zulkarnain, S.Kom,  
Ifta Wydyaningsih, A.Md, Raistiwar Pratama, S.S

### Reporter:

Tiara Kharisma, S.I.Kom., Neneng Ridayanti, S.S.

### Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom, Supriyono

### Percetakan:

Firmansyah, A.Md, Abdul Hamid

### Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,  
Eva Julianty, S.Kom,  
Bambang Barlian, S.AP  
Tiara Kharisma, S.I.Kom.

### Perwajahan/Tata Letak:

Firmansyah, A.Md, Isanto, A.Md

### Iklan/Promosi:

Sri Wahyuni

### Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos  
Achmad Sadari

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), email: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)

**P**eran perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan masih tetap relevan untuk dimunculkan meskipun dalam tataran kesetaraan *gender*, perbedaan peran mereka dengan kaum pria pada masa sekarang ini tidak lagi terlihat secara ekstrem. Mungkin saja dikarenakan minimnya informasi, banyak peran menarik kaum perempuan Indonesia terabaikan. Salah satu upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas, utuh, akurat dan berimbang mengenai berbagai peran perempuan yang menarik untuk diangkat adalah dengan menelusuri berbagai sumber informasi baik dari sumber primer (arsip) maupun sekunder (literatur) serta hasil wawancara sebagai pelengkap.

Majalah ARSIP edisi kali ini merupakan Edisi Khusus mengenai Perempuan, dengan pertimbangan bahwa setiap terbitan akhir tahun kami selalu menutup dengan menerbitkan Edisi Khusus. Sedangkan, pemilihan tema dikaitkan dengan Hari Ibu, yakni pada 22 Desember. Berbagai tulisan menarik yang dimuat di dalam majalah ini sebagian besar bersumber dari khazanah arsip yang ada di ANRI. Artikel lainnya, seperti rubrik Cerita Kita tentang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan ANRI yang memiliki berbagai program juga kami turunkan dalam majalah ini. Sedangkan untuk rubrik liputan, tetap kami turunkan sebagaimana biasanya.

Sebagai laporan utama, redaksi melakukan wawancara dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar untuk mengetahui sejauhmana kiprah perempuan dalam pembangunan bangsa pada masa sekarang dan peran kementerian yang beliau pimpin dalam menetapkan strategi dan upaya meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan berkiprah di berbagai bidang terkait kesetaraan *gender*.

Selain itu, redaksi juga menurunkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh perempuan nasional yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, yakni Ibu A. Sulasikin Murpratomo yang menyebutkan bahwa keberhasilan perempuan masa kini di berbagai bidang tidak terlepas dari peran para pejuang perempuan di masa lalu, oleh karenanya perlu terus dicari sumber informasi tentang peran para pejuang perempuan tersebut.

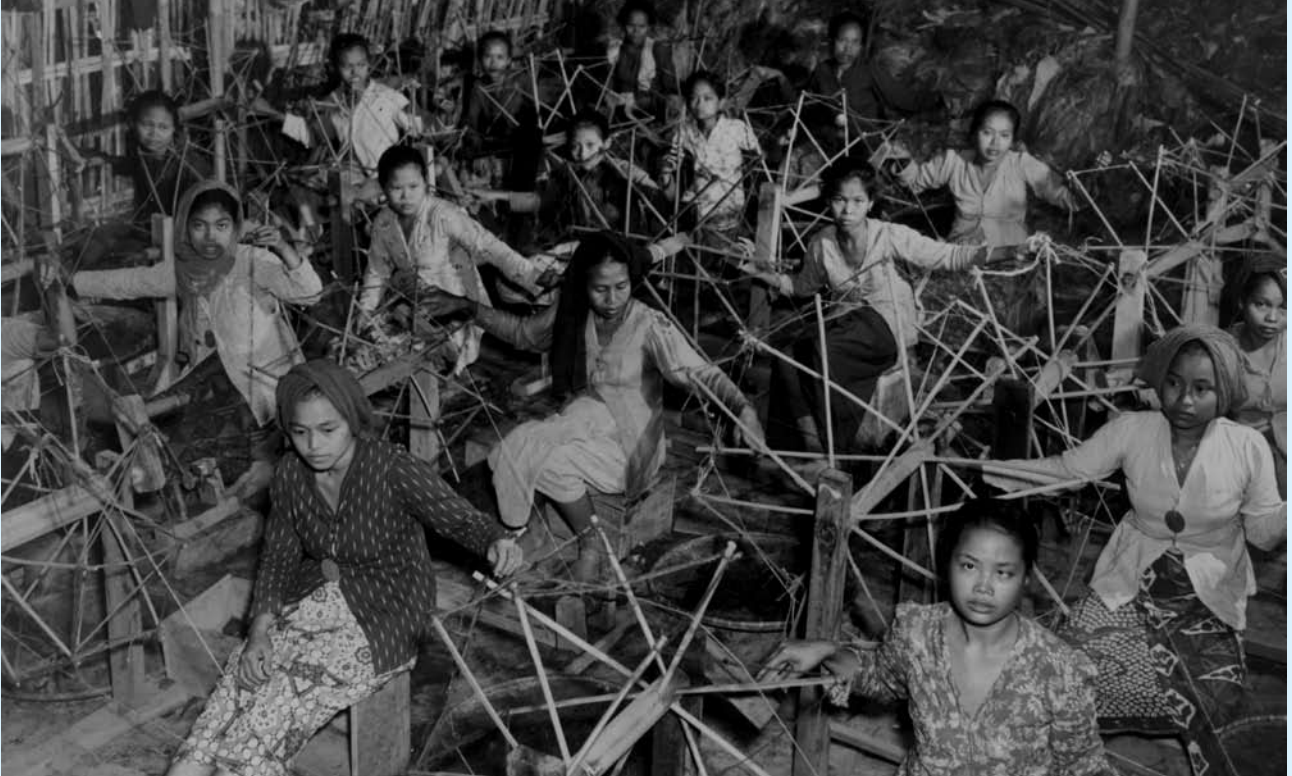
Berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang peranan kaum perempuan Indonesia, redaksi pun mewawancarai Kepala ANRI M. Asichin yang mengatakan bahwa ANRI akan terus melakukan pencarian arsip yang memiliki nilai sejarah di berbagai organisasi dan perorangan melalui program akuisisi. Tentunya kegiatan ini perlu mendapat dukungan, khususnya dari para pencipta arsipnya.

Kami menyadari pada edisi ini masih banyak ditemui kekurangan, baik dari segi format maupun isi. Untuk itu redaksi akan sangat berterima kasih apabila pembaca dapat memberi masukan berupa kritik dan saran dalam upaya perbaikan edisi berikutnya.

Sebagai penutup redaksi mengucapkan selamat menikmati sajian ini, semoga pembaca dapat mengambil manfaatnya.

redaksi

# PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SETARA, BUTUH BUKTI REKAM JEJAK



Sumber arsip foto: RVD A 717-47

Tak dapat dipungkiri bahwa separuh dari penghuni dunia adalah perempuan. Pengakuan itu sudah berlangsung berabad-abad yang lampau hingga kini, namun dalam kenyataannya dunia saat ini dikuasai oleh lelaki. Perempuan masih dianggap pelengkap atau pemantas demi keramaian maupun keindahan dunia. Tengok saja, pemahaman suatu negara identik dengan negaranya laki-laki, pemerintahan adalah pemerintahan laki-laki, hukum yang berlaku adalah hukum untuk kaum laki-laki. Prinsipnya, perempuan masih termarginalkan, belum sepenuhnya sejajar dengan laki-laki.

**K**ondisi inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan kesetaraan *gender* dan afirmasi *action* yang mampu merubah *mindset* masyarakat terhadap kemampuan perempuan, tidak selamanya lelaki yang terus-menerus memainkan suatu peran. Perempuan Indonesia harus ikut mengambil peran dalam setiap aksi pembangunan, itulah misi pembentukan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, yang

terbentuk pada tahun 1978, saat itu Ibu Lasyah Soetanto sebagai Menteri pertama yang memimpin Menteri Muda Urusan Peranan Wanita selama dua periode 1978-1983 (Kabinet Pembangunan III) dan 1983-1988 (Kabinet Pembangunan IV), namun tahun 1987 beliau wafat dan digantikan oleh Ibu A. Sulastikin Murpratomo, mantan Ketua Umum Kowani.

Di bawah kepemimpinan Ibu A. Sulastikin Murpratomo selaku Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

(UPW) selama dua periode (1987 s.d. 1993) dimulailah paradigma baru untuk pembangunan perempuan dengan konsep *gender* dan pembangunan, termasuk mendorong pengembangan Pusat Studi Wanita (PSW) di perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Selain itu, ada pula pembentukan mekanisme Peningkatan Peranan Wanita (P2W) atau mekanisme kemajuan wanita (*machinery for the advancement of women*) di tiap daerah.

Upaya pemerintah guna menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki terus dilakukan hingga kini, bahkan kedudukan menteri muda dalam beberapa kabinet sebelumnya ditingkatkan statusnya menjadi suatu kementerian tersendiri. Saat ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Kementerian PP dan PA) yang mempunyai mandat untuk menyusun kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan, kesetaraan *gender*, serta perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Pengarusutamaan *gender* ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan bangsa.

Selanjutnya arahan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono saat acara Perayaan Hari Ibu ke-83 tahun 2011, yang mengilustrasikan bahwa 'Sang Garuda, yang membawa semangat dan jiwa Pancasila, tidak mungkin terbang tinggi jika hanya menggunakan satu sayapnya, yaitu sayap laki-laki. Garuda Pancasila hanya dapat terbang menembus awan jiwa kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan mengepak sayap bersama dan bersinergi'. Ilustrasi tersebut menunjukkan pentingnya peran perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang setara untuk kepentingan dan tujuan bersama, yaitu cita-cita dan tujuan nasional.

Perempuan diharapkan turut memberikan andil terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, kesetaraan perempuan dengan laki-laki menjadi keharusan. Semua itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pada Kementerian PP dan PA, dimana tahun 2024 nanti, perempuan sudah disetarakan dengan laki-laki. Tidak hanya dalam pemenuhan sumber daya manusia, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang membuat perempuan semakin berperan dalam segala bidang. Kebijakan yang memperlihatkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, mulai dari mendapatkan akses, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Ini sesuai dengan visi Kementerian PP dan PA, yaitu terwujudnya kesetaraan



Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak,  
Linda Amalia Sari Gumelar

“Ke depan, pendokumentasi terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang hebat menjadi strategi khusus untuk lebih mengenalkan peran dan andil perempuan dalam pembangunan, termasuk tentunya segala kebijakan mengenai kesetaraan *gender* yang dikeluarkan pemerintah, wajib diselamatkan dan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).”

*gender* dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan visinya, Kementerian PP dan PA mempunyai misi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Perbaikan kualitas hidup menjadi prioritas yang harus dicapai dari adanya kesetaraan *gender*. Kesetaraan *gender* tidak akan berarti apabila tidak bermuara kepada adanya peningkatan kualitas hidup, demikian

penjelasan Menteri PP dan PA, Linda Amalia Sari. Kementerian PP dan PA sendiri belum mempunyai data keperempuanan mengenai kuantitas dan kualitas perempuan Indonesia. Selama ini masih mengandalkan data milik Badan Pusat Statistik, terutama terkait dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Menurut Linda Amalia Sari yang bersuamikan Agum Gumelar, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada era Gus Dur, saat ini yang dibutuhkan untuk kesetaraan *gender* adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan, termasuk mengintegrasikan perspektif *gender* ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian dan lembaga negara. “Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semua kementerian dan lembaga negara mempunyai kebijakan dan program pembangunan yang responsif *gender*, menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.

Minimnya data keperempuanan Indonesia yang dimiliki Kementerian PP dan PA, menyebabkan banyak prestasi perempuan dalam berbagai bidang tidak terekspose, kurang diketahui masyarakat, dan mengakibatkan rendahnya apresiasi terhadap perempuan itu sendiri. Selama ini, masyarakat lebih mudah mengingat dan mengakui, bahwa di balik keberhasilan seorang lelaki tampak ada perempuan hebat di belakangnya. Ungkapan ini menjadi kebanggaan perempuan dimanapun berada, Namun peran tersebut seakan-akan andil perempuan hanya cukup mendampingi seorang laki-laki.

Ke depan, pendokumentasi terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang hebat menjadi strategi khusus untuk lebih mengenalkan peran dan andil perempuan dalam pembangunan, termasuk tentunya segala kebijakan mengenai kesetaraan *gender* yang dikeluarkan pemerintah, wajib diselamatkan dan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lebih jauh, Ibu Menteri berharap supaya masyarakat, khususnya kelompok-kelompok



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Asichin

perempuan yang memiliki organisasi dapat pula menyerahkan arsip yang bernilai historis ke ANRI, sehingga kiprah perempuan hebat Indonesia dengan segala perjuangannya dapat diketahui oleh generasi yang akan datang.

Dengan gamblangnya, menteri yang yang bermantukan mantan juara dunia bulu tangkis Taufik Hidayat ini, menyebutkan peran perempuan tidak hanya sebagai objek dalam menyelamatkan arsip, tetapi juga sebagai subjek, peran ibu sebagai ibu rumah tangga untuk turut serta mendokumentasikan arsip-arsip rumah tangga. Menurutnya, pendokumentasian yang baik harus dimulai dari rumah. Oleh karenanya, perlu kerja sama dengan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mensosialisasikan pendokumentasian yang baik dan benar, biar bagaimanapun perempuan dan PKK merupakan *grass root* –pengelola arsip dalam suatu rumah tangga, dari sanalah terbangun budaya untuk mengarsipkan sesuatu hal yang

bermanfaat tidak hanya bagi keluarga, masyarakat, tetapi juga negara dan bangsa. Kewajiban perempuan Indonesia adalah menjadi Ibu Bangsa, demikian sambutan Ibu Linda Amalia Sari dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 84, Perempuan Indonesia berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi penerus bangsa untuk saling menghormati satu sama lain, membangun budi pekerti, mengenal jati diri bangsa, dan mencintai ibu pertiwi.

Menanggapi saran Menteri Linda Amalia Sari di atas, Kepala ANRI M. Asichin dalam suatu kesempatan wawancara terpisah, mengatakan bahwa ANRI menyambut baik rencana tersebut, karena walau bagaimanapun strategi akuisisi tidak akan berjalan maksimal tanpa ada dukungan dari pencipta arsip, baik itu yang dari lembaga negara, lembaga swasta, organisasi ataupun perseorangan. Baginya, mendapatkan arsip perempuan Indonesia yang berprestasi dan memiliki *historical value* merupakan suatu kebanggaan



Para perempuan pribumi di salah satu sekolah Kristen di Yogyakarta sedang praktik membuat batik (Data Informasi Arsip Foto Jawa Tengah Koleksi KIT No. 0319/068, ANRI-Jakarta)

mengingat masalah perempuan di Indonesia telah mendapat penghargaan yang sangat tinggi, terbukti dengan diperingati hari Ibu pada 22 Desember setiap tahunnya sebagai Hari Nasional sesuai Keppres Nomor 316 Tahun 1959. Peringatan hari Ibu yang diadakan setiap tahun, harus disikapi secara arif bahwa tujuannya mengingatkan seluruh bangsa Indonesia terutama generasi muda sebagai kebangkitan, persatuan, dan kesatuan gerak perjuangan kaum perempuan yang tak bisa dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dalam penjelasannya, Kepala ANRI M. Asichin berharap keterlibatan semua pihak yang mempunyai arsip mengenai perempuan Indonesia tentang keperempuanan secara nasional

untuk diserahkan ke ANRI ataupun lembaga kearsipan di daerah, baik yang terdapat di lembaga negara, organisasi kemasyarakatan yang bergerak tentang keperempuanan, maupun organisasi politik. Ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, keterlibatan masyarakat baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan perseorangan untuk menyerahkan arsip statisnya ke lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Itu sudah menjadi salah satu prioritas program kerja ANRI pada tahun 2013 untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip tentang perjuangan perempuan Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Minimnya khazanah perjuangan

perempuan Indonesia, menurut Ibu A. Sulasikin Murpratomo yang terakhir menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1983-2003) ini sangat disayangkan, karena menurutnya suatu bangsa harus berpijak pada sejarahnya dalam membangun masa kini dan mendatang. “Oleh sebab itu, peranan arsip sangat penting dalam merekonstruksi sejarah yang akurat, sebagai sumber penulisan sejarah perjuangan perempuan,” ujar Ibu A. Sulasikin Murpratomo yang perjalanan hidupnya ditulis dalam biografi *Perjalanan Panjang Ibu A. Sulasikin Murpratomo*, maupun beberapa buku lain tentang dirinya, seperti *Sulasikin: Konsisten dan Dinamis, serta Melintas Zaman Dalam Gambar: 85 Tahun Ibu Anindya Sulasikin Murpratomo 1927 – 2012*. Menurutnya, keberhasilan





Murid-murid perempuan di Sekolah Kepandaian Putri "Juliana" sedang belajar menyeterika dan merapikan pakaian (Data Informasi Arsip Foto Jawa Tengah Koleksi KIT No. 0319/070, ANRI-Jakarta)

atau prestasi yang dihasilkan kaum perempuan masa kini di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan tak lain karena hasil perjuangan dan pengorbanan para tokoh dan pahlawan perempuan terdahulu.

Saat ini, perempuan Indonesia telah mendapat tempat yang cukup terhormat dalam segala level ataupun bidang dan didukung oleh regulasi dalam bentuk kebijakan afirmasi, kebijakan yang mendorong perempuan dalam bidang politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD mewajibkan keterwakilan perempuan sejumlah 30%, kemudian Undang-Undang ini diperbaharui melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diikuti dengan *zipper system*, yaitu mekanisme penentuan calon jadi dengan memberikan peluang lain keterwakilan perempuan bagi individu yang ditetapkan Undang-Undang, dimana apabila ada tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Keterwakilan perempuan diharapkan mampu memperjuangkan permasalahan perempuan dan anak Indonesia. Oleh karenanya, perempuan Indonesia yang memperoleh kesempatan sebagai keterwakilan perempuan harus mempunyai visi yang jelas tentang penanganan masalah perempuan dan pemberdayaan perempuan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam kerangka peningkatan *the politics of presence* maupun *the politic of ideas* terhadap kebijakan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga, sehingga mampu merealisasikan kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu negara.

Partisipasi perempuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga merupakan bagian penting dalam membangun bangsa dan membangun kesejahteraan. Upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan Indonesia hendaknya dipandang sebagai suatu strategi dalam membangun ketahanan

keluarga, ketahanan masyarakat, maupun ketahanan nasional yang pada akhirnya berimbas terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perempuan Indonesia tidak boleh berhenti hanya sekedar menciptakan sejarah-melalui Kongres Perserikatan Perempuan Indonesia pada tahun 1928, tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab untuk mengisi sejarah pada tahun-tahun mendatang melalui prestasi dan dedikasi kepada negara dan bangsa. Segala rekam jejak perjuangan perempuan maupun partisipasi perempuan dalam berbagai bidang merupakan bukti historis yang perlu diselamatkan dan dilestarikan, sekaligus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia lainnya melalui rekam jejak ini, generasi penerus akan memahami dan mengakui bahwa antara perempuan dan laki-laki itu setara diperlihatkan dari rekam jejak perempuan. Majulah perempuan Indonesia, rekam jejak anda merupakan bukti nyata akan kesetaraan perempuan dan laki-laki, demi Indonesia sejahtera !! (BPW)

Gayatri Kusumawardani :

# PERAN IBU DALAM PENDOKUMENTASIAN ARSIP KELUARGA

Sering kita mengalami kesulitan dalam menemukan arsip keluarga di rumah. Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi di rumahku. Padahal boleh dibilang, aku termasuk rajin mengumpulkan arsip pribadi dan keluarga di dalam *document keeper*. Di rumah, aku yang bertanggung jawab menyimpan semua arsip pribadi keluarga. Arsip tersebut disimpan dalam *document keeper* dan dipisahkan antara arsip milikku pribadi, suamiku, anakku, dan bapakku. Jadi masing-masing memiliki *document keeper* sendiri. Kemudian kumpulan *document keeper* tersebut, aku simpan lagi di dalam koper khusus. Anakku baru berusia 4,5 tahun tapi sudah mempunyai arsip, yaitu surat tanda kenal lahir, akta kelahiran, dan fotokopi raport sekolahnya. Aku menata arsip tersebut sesuai kronologis kejadian dan waktu, sehingga pikirku dapat mempermudah kita dalam penemuan kembalinya, dan tidak lupa difotokopi terlebih dahulu terutama arsip yang membutuhkan penggandaan untuk keperluan khusus.

Namun tetap saja kebingungan mencari arsip pribadi masih sering terjadi, apabila aku lupa mengembalikan arsip ke dalam *document keeper*. Ternyata kedisiplinan dalam penyimpanan kembali arsip sangat diperlukan. Hal ini terjadi juga dengan temanku. Dia baru saja menikah dan baru pindah rumah. Suaminya termasuk suami yang sibuk, sehingga tidak sempat mengurus arsip pribadi. Temanku ini termasuk ibu rumah tangga baru yang kurang peduli terhadap arsip pribadinya dan suaminya. Alhasil, semua arsip



keluarganya tidak berhasil ditemukan dan pada akhirnya mempersulit dirinya sendiri karena memerlukan waktu khusus untuk mengurus pembuatan arsip keluarga yang hilang.

Tidak semua ibu rumah tangga sadar untuk menyimpan arsip pribadi keluarganya. Ada yang menyerahkan sepenuhnya penyimpanan arsip pribadi keluarga kepada suaminya atau ada juga yang menyimpan tapi asal menyimpan, sehingga ketika dibutuhkan segera, dia mengalami kesulitan untuk menemukannya.

Dalam hal ini, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai arsip keluarga. Pada dasarnya, arsip tidak hanya dihasilkan oleh sebuah institusi resmi atau organisasi masyarakat, namun arsip juga dapat dihasilkan oleh keluarga sebagai bagian dari rekam kegiatan sosial atau hasil interaksi sosial anggota keluarga dengan pihak

lain. Arsip keluarga menjadi bukti atas peran serta sebuah keluarga di tengah masyarakat sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap atau seluruh anggota keluarga. Anne-Marie Swirlich dalam tulisannya *"Introducing Archives and The Archival Profession"* menyatakan bahwa setiap manusia pasti menciptakan dan menyimpan arsip dalam kehidupannya, sebagai contoh kita menulis surat atau buku harian (*diaries*), menyimpan buku cek, buku tabungan, sertifikat, dan mengabadikan saat-saat penting dalam hidup kita dalam bentuk foto atau video. Adapun bentuk-bentuk arsip keluarga yang lazim ditemui di Indonesia, antara lain: sertifikat tanah atau akta tanah, akta kelahiran, surat tanda kenal lahir, Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), ijazah pendidikan, surat nikah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, resi

pajak, resi tagihan listrik dan air, polis asuransi, foto dan video serta piagam penghargaan.

Arsip tersebut familiar bagi kehidupan sehari-hari karena semenjak kita dilahirkan sudah mempunyai arsip sendiri. Ketika seorang manusia menjadi dewasa, sebaiknya sudah mulai peduli terhadap arsip pribadinya karena arsip tersebut dapat dikatakan sebagai identitas diri. Hal ini berlaku juga untuk seorang ibu rumah tangga, apalagi yang sudah mempunyai anak untuk harus lebih peduli terhadap arsip pribadi keluarga. Mengapa harus ibu rumah tangga yang peduli?

Seperti diketahui bahwa ibu rumah tangga adalah orang yang mengatur operasional rumah tangga. Sesuai Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Arsip pribadi merupakan salah satu urusan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Seorang suami atau ayah berdasarkan kewajibannya dalam Undang-Undang Perkawinan dan menurut agama adalah menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga berarti lebih banyak mencari uang di luar rumah. Dengan kata lain, suami sudah disibukkan dengan urusan mencari nafkah di luar rumah dan ketika harus diberi tanggung jawab lagi untuk menyimpan dan memelihara arsip pribadi rumah tangga, pasti akan kerepotan.

Menurut profesor psikologi Diane Halpern dari Claremont McKenna College di California berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa perempuan lebih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan “perawatan” atau pemeliharaan dibandingkan laki-laki, karena perempuan mempunyai sifat ketelatenan dan ketelitian yang lebih dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan mempunyai struktur otak yang memungkinkannya melakukan

*multi tasking job* atau beberapa pekerjaan sekaligus secara bersamaan. Ini karena perempuan memiliki *white matter* (zat putih dalam otak) sepuluh kali lebih banyak dibanding laki-laki. *White matter* ini memiliki koneksi antarneuron yang memungkinkan otak wanita dapat bekerja lebih cepat dan dalam waktu bersamaan. Perempuan juga lebih bisa mempergunakan otak kiri dan kanannya secara bersamaan.

Sebagai subjek, perempuan dapat mengerjakan banyak hal di luar tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Ini menjadi spesial karena ia merupakan makhluk yang sanggup melakukan *multi tasking*. Berbeda

dengan lelaki yang cenderung *single tasking*. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga lebih telaten dalam untuk menyimpan dan merawat arsip pribadi keluarga agar tersimpan dan terawat dengan baik. Laki-laki dalam hal ini suami, sudah disibukkan dengan urusan pekerjaan dan mencari nafkah sehingga apabila dibebani lagi dengan urusan yang lain menjadi tidak fokus. Tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi ketika suami diberi tanggung jawab menyimpan arsip keluarga, dia lupa dimana menyimpan arsip tersebut atau bisa juga hilang. Dalam hal ini, penataan arsip keluarga akan lebih tersusun rapi apabila dilakukan



oleh seorang ibu rumah tangga dibandingkan dengan suaminya.

Seorang ibu rumah tangga, walaupun dia bekerja, tetap berkewajiban untuk dapat mengatur operasional rumah tangga, salah satunya yang berkaitan dengan arsip keluarga. Arsip keluarga yang tertata rapi, mencerminkan pribadi seorang ibu yang rapi dan disiplin. Kedisiplinan penyimpanan arsip keluarga, dilatarbelakangi oleh faktor latarbelakang pendidikan dan faktor profesi atau pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan, semakin mengerti tentang pentingnya penyimpanan arsip. Apabila berprofesi atau bekerja pada sebuah lembaga negara atau perusahaan, pada umumnya akan mengetahui cara menyimpan arsip yang baik dan mendokumentasikan surat atau berkas-berkas yang dinilai penting. Namun tidak menutup kemungkinan, ibu rumah tangga dengan pendidikan yang tidak begitu tinggi dan tidak bekerja pun bisa menyimpan arsip pribadi keluarganya dengan baik.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terutama oleh ibu rumah tangga dalam menyimpan atau memberkaskan arsip pribadi:

Pertama harus ada pemisahan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan organisasi yang digelutinya. Jadi sebaiknya, ibu rumah tangga harus dapat memisahkan antara arsip yang dihasilkan oleh kegiatan organisasi yang digeluti dirinya atau anggota keluarganya dengan arsip pribadi.

Kedua, sebaiknya arsip pribadi dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu arsip pribadi masing-masing anggota keluarga, seperti akta kelahiran, ijazah pendidikan, dan kartu tanda pengenal serta arsip kepemilikan harta benda keluarga seperti sertifikat tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Ketiga, media penyimpanan sebaiknya yang tidak mudah rusak, contoh: *document keeper* untuk menyimpan arsip pribadi. Keempat,

**“ Peran seorang ibu dalam pengelolaan arsip di lingkungan rumah tangga adalah sebagai pendukung kesejahteraan rumah tangga. Seorang Ibu juga dapat berperan sebagai arsiparis di lingkungan rumah tangga yang nantinya akan menumbuhkan dan menciptakan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan keluarga sebagai hasil terdokumentasinya arsip di lingkungan rumah tangga. ”**

arsip pribadi yang perlu difotokopi, sebaiknya digandakan sebagai *backup* jika arsip tersebut hilang.

Kelima, menyimpan arsip foto dalam album yang berkualitas baik. Keenam, untuk video/film sebaiknya dibuat *backup*, disimpan dalam bentuk cd/dvd dan kepingan cd/dvd tersebut disimpan di tempat khusus penyimpanan kepingan cd/dvd. Sebelumnya pada kepingan cd/dvd tersebut diberi nama berdasarkan *moment/kejadian* dalam video/film tersebut. Pemberian nama ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam penemuan kembali.

Perlu ditegaskan kembali bahwa peran seorang ibu dalam penyimpanan arsip keluarga sangatlah penting, selain karena hal-hal yang disebutkan di atas, seorang ibu sudah seharusnya paling mengetahui situasi dan kondisi rumah tangga beserta para anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi tugas seorang ibu untuk menyimpan arsip keluarga sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan

oleh anggota keluarga dapat segera ditemukan.

Arsip keluarga sangatlah memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan pergaulan anggota keluarga, karena arsip keluarga merupakan identitas diri anggota keluarga. Arsip keluarga dapat juga mempengaruhi kesuksesan dalam karier, sekolah, dan bisnis bagi keluarganya karena syarat untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan sekolah, atau kepentingan bisnis adalah adanya arsip pribadi, seperti akta kelahiran, ijazah pendidikan, kartu tanda pengenal, dan sertifikat kursus.

Peran seorang ibu dalam pengelolaan arsip di lingkungan rumah tangga adalah sebagai pendukung kesejahteraan rumah tangga. Seorang Ibu juga dapat berperan sebagai arsiparis di lingkungan rumah tangga yang nantinya akan menumbuhkan dan menciptakan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan keluarga sebagai hasil terdokumentasinya arsip di lingkungan rumah tangga.



Azmi :

## AKSESIBILITAS DAN PENGOLAHAN ARSIP STATIS BERTEMA PEREMPUAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN

Sebagai informasi terekam (*recorded information*), arsip statis bertema perempuan yang dikelola lembaga kearsipan merupakan representasi kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki fungsi sebagai memori kolektif, identitas, jati diri bangsa, dan bahan penelitian. Melihat signifikansi ini, maka arsip statis bertema perempuan yang dikelola lembaga kearsipan merupakan informasi publik yang terbuka untuk diakses publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa setiap lembaga kearsipan berkewajiban menjamin kemudahan akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta didasarkan pada sifat

keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan tersebut di atas, aksesibilitas arsip statis bertema perempuan pada lembaga kearsipan juga ditentukan dengan ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aid*) berupa daftar, inventaris, dan *guide* arsip. *Finding aid is a tool that facilitates discovery of information within a collection of records or a description of records that gives the repository physical and intellectual control over materials and that assists user to gain access to and understand the materials* (<http://www2.archivist.org/glosory/terms/f/f/indings-aid>). Ketersediaan *finding aid* ini merupakan *output* atas pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis (*arrangement and description*) pada lembaga kearsipan.

Dengan tersedianya *finding aid* sebagai produk inti pengolahan arsip statis, maka salah satu persyaratan aksesibilitas arsip statis pada lembaga kearsipan telah terpenuhi. Dengan *finding aid* publik dapat mengakses arsip statis bertema perempuan yang tersimpan pada lembaga kearsipan untuk berbagai kepentingan, seperti kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran informasi.

### Aksesibilitas Arsip Statis

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan aksesibilitas arsip statis bertema perempuan adalah gambaran secara umum seberapa mudah pengguna arsip mendapatkan data/ informasi arsip statis bertema perempuan pada lembaga kearsipan, kemudian mempergunakan dan memahaminya. Aksesibilitas arsip

statis bertema perempuan merupakan kebijakan pimpinan lembaga kearsipan sesuai kebutuhan dan budaya lembaga kearsipan masing-masing berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aksesibilitas arsip statis bertema perempuan pada lembaga kearsipan dihadapkan kepada dua aspek persyaratan, yaitu aspek legalitas dan teknis kearsipan statis. Aspek legalitas berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan arsip statis (*principle of legal authorization*). Sedangkan aspek teknis kearsipan statis berkaitan dengan ketersediaan *finding aid* dan kondisi arsip statis.

Arsip statis bertema perempuan merupakan informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdapat dalam berbagai khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan sebagai hasil kegiatan akuisisi dan penyelamatan arsip statis dari berbagai pencipta arsip (*creating agency*) dan/atau pemilik arsip (*owner*). Arsip bertema perempuan merupakan sumber



Perempuan sedang membaca arsip dengan menggunakan mesin *micro reader*

informasi yang objektif menyangkut berbagai aktivitas kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arsip statis bertema perempuan yang berasal dari berbagai *creating agency* dan *owner* dengan segala bentuk medianya merupakan memori kolektif yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Dengan tersedianya arsip statis bertema perempuan pada lembaga kearsipan, maka dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih kaum perempuan sebagai warga bangsa dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memajukan kaum perempuan ke depan.

Pasal 28F UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia. Negara wajib memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi mengingat hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Lembaga kearsipan sebagai badan publik memiliki fungsi mengelola arsip statis tentunya berkewajiban mengelola arsip statis bertema perempuan



Perempuan sedang mendeskripsi arsip



Penyimpanan arsip tekstual

yang diterima dari pencipta dan/atau pemilik arsip untuk kepentingan publik secara efisien, efektif, dan sistematis melalui pengolahan arsip statis untuk menghasilkan *finding aid*, baik secara manual maupun elektronik. Dalam menjalankan fungsi pengolahan arsip statis lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah yurisdiksinya wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bertema perempuan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis.

Dalam memberikan akses arsip statis bertema perempuan lembaga kearsipan harus berlandaskan pada sifat keterbukaan dan tertutupan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*openbaarheid*) dan ketersediaan *finding aid* berupa daftar, inventaris, dan *guide* arsip (*toegankelijk*) untuk

kepentingan akses publik terhadap arsip statis yang dikelolanya.

#### **Pengolahan Arsip Statis**

Salah satu faktor kunci aksesibilitas arsip statis bertema perempuan pada lembaga kearsipan adalah ketersediaan *finding aid* setiap khazanah arsip statis yang memiliki informasi mengenai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, lembaga kearsipan harus mengolah setiap khazanah arsip statis bertema perempuan sehingga menghasilkan keteraturan fisik, informasi, dan *finding aid* berupa daftar, inventaris, dan *guide* arsip baik secara manual maupun elektronik.

Pengolahan arsip statis adalah proses pengaturan informasi, fisik, dan pembuatan *finding aid* arsip statis berkaitan dengan sosok perempuan yang terdapat dalam berbagai khazanah arsip statis yang

dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli, standar deskripsi arsip statis. Meskipun amanat pasal ini ditujukan untuk pengolahan arsip secara umum, namun demikian pasal ini juga berlaku terhadap pengolahan arsip statis dengan tema tertentu. Oleh karena itu, dalam pengolahan arsip bertema perempuan harus memperhatikan dua prinsip pokok pengolahan arsip statis, yaitu: (1) asas asal usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya; (2) asas aturan asli adalah asas/prinsip yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap



Penyimpanan arsip audiovisual

ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Pengaturan arsip yang didasarkan pada aturan asli dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan reliabilitas arsip.

Selain kepatuhan terhadap kedua asas atau prinsip pengolahan arsip tersebut di atas, pengolahan arsip statis bertema perempuan juga harus berpegang teguh pada standar deskripsi arsip statis, yaitu aturan yang digunakan dalam menggambarkan informasi atau rincian informasi yang terkandung dalam arsip statis. Dalam hal ini dapat diacuh beberapa jenis deskripsi arsip yang dikeluarkan International Council on Archives (ICA), yaitu: (1) ISAD (G): *International Standard on Archival and Description (General)* Standar deskripsi umum arsip statis instansi pemerintah yang didasarkan pada konsep deskripsi secara berjenjang (*multi level description*) pada tiga level besar mulai dari level makro, menengah, dan mikro; (2) ISAAR (CPF): *International*

*Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families*, yaitu standar deskripsi untuk menyusun arsip badan-badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik perseorangan dan keluarga yang disebut sebagai pencipta arsip (*creating agency*).

Tingkat kepatuhan lembaga kearsipan terhadap penerapan kaidah pengolahan arsip statis dalam mengolah khazanah arsip statis bertema perempuan tercermin pada tiga hal, yaitu:

Pertama, pengolahan arsip statis dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana kerja.

Kedua, keakuratan informasi arsip statis hasil pengolahan yang terdapat dalam *finding aid* dengan fisik arsip statis yang tertata pada tempat penyimpanan. Ketiga, kecepatan waktu penemuan kembali arsip statis yang dicari.

Untuk efisiensi dan efektivitas kerja penyusunan *finding aid*

khazanah arsip statis bertema perempuan, lembaga kearsipan perlu merencanakan kegiatan kerja pengolahan arsip statis dengan baik. Awali pekerjaan dengan mengidentifikasi secara makro terhadap khazanah arsip statis yang memiliki informasi mengenai perempuan. Setelah seluruh data khazanah arsip statis ini diperoleh, segeralah dilakukan pengolahan informasi dan fisik arsip melalui pembuatan daftar dan inventaris arsip berdasarkan prinsip pengolahan dan standar deskripsi arsip statis dengan memperhatikan tipologi arsip statis yang akan diolah.

Setelah daftar dan inventaris arsip khazanah arsip statis tersebut tersusun, maka selanjutnya dilakukan pengolahan arsip tahap kedua yakni penyusunan *guide* arsip bertema perempuan (*secondary finding aid*) berdasarkan data yang terdapat dalam daftar dan inventaris arsip. Hal ini penting dilakukan karena sejatinya keberadaan daftar dan inventaris arsip merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis primer (*primary finding aid*) yang berfungsi sebagai dokumen pengumpan (*feeder document*) bagi penyusunan *guide* arsip dengan tema tertentu.

Dengan metode kerja pengolahan arsip statis seperti di atas, maka penyusunan *guide* arsip bertema perempuan pada lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah yuridiksinya dapat dilakukan dengan mudah. *Least*, lembaga kearsipan berkembang sebagai institusi publik yang profesional, responsif terhadap isu perempuan, dan disambut positif oleh masyarakat karena mampu menjamin aksesibilitas publik terhadap arsip statis bertema perempuan sebagai marwah bangsa yang terdapat dalam khazanah arsip statis.



**Kris Hapsari & Nia Pertiwi :**

# KEBANGKITAN PEREMPUAN INDONESIA

*Lahir sebagai wanita adalah kebanggaan.*

*Mengemban tugas sebagai ibu adalah kemuliaan.*

*Menjadi bagian dari warga bangsa adalah tanggung jawab besar*

**B** enih-benih kebangkitan pergerakan wanita Indonesia telah dimulai sebelum kemerdekaan, beberapa di antaranya ditandai dengan perjuangan pendekar wanita di beberapa tempat di Indonesia seperti Tjuk Njak Dhien di Aceh, Nji Ageng Serang di Jawa Barat, R.A. Kartini di Jawa Tengah, Christina Martatihahu di Maluku, serta masih banyak lagi pejuang wanita lain. Kurun waktu setelah kelahiran Budi Utomo pada 1908, banyak lahir perkumpulan-perkumpulan wanita di berbagai tempat seperti Aisyiah, Wanita Katolik, Putri Merdeka, dan lain-lain. Budi Utomo menjadi pendorong tumbuhnya organisasi lain yang berorientasi pada tujuan mulia, kemajuan dan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya semua peristiwa saling bertautan. Begitu juga kebangkitan pergerakan wanita Indonesia, sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan pergerakan nasionalisme Indonesia secara umum. Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 30 April s.d. 2 Mei 1926 menempatkan wanita sebagai satu titik sentral pembahasan, sehingga panitia kongres meminta Bahder Djohan untuk memberikan masukan mengenai kedudukan wanita

dalam masyarakat Indonesia. Secara tegas Bahder Djohan menyatakan:

*“de Indonesische vrouw moet zijn naast de man, voor Land en Volk.....”Door er op te wijzen dat de Indonesische vrouw er ook moet zijn voor Land en Volk, meen ik duidelijk naar voren te hebben gebracht het verschil tusschen het probleem van de positie der Vrouw hier en in de Westersche landen, en meen ik tevens de kern te hebben aangeroerd van de vraag, in welke richting wij*

*ons hebben te bewegen om eene oplossing te vinden welke voor deze landen ten zegen zal zijn..... In de handen der Vrouw ligt de toekomst van Indonesie..”*

(“wanita Indonesia harus berada di samping/sisi pria, bagi tanah air dan bangsa...” Dengan menegaskan bahwa wanita Indonesia juga untuk tanah air dan bangsa, maka secara jelas dapatlah saya ketengahkan perbedaan antara kedudukan wanita di negeri ini dan wanita di negara-negara



Gbr. 4 dan 5 Goresan tangan R.A. Soekonto, Ketua Perikatan Perempoean Indonesia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menyampaikan tiga mosi hasil Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1922 dengan disertai permohonan agar Pemerintah Hindia Belanda dapat memperhatikan dan menindaklanjuti mosi tersebut (ANRI: Algemeene Secretarie, Besluit 28 November 1929 No. 13)

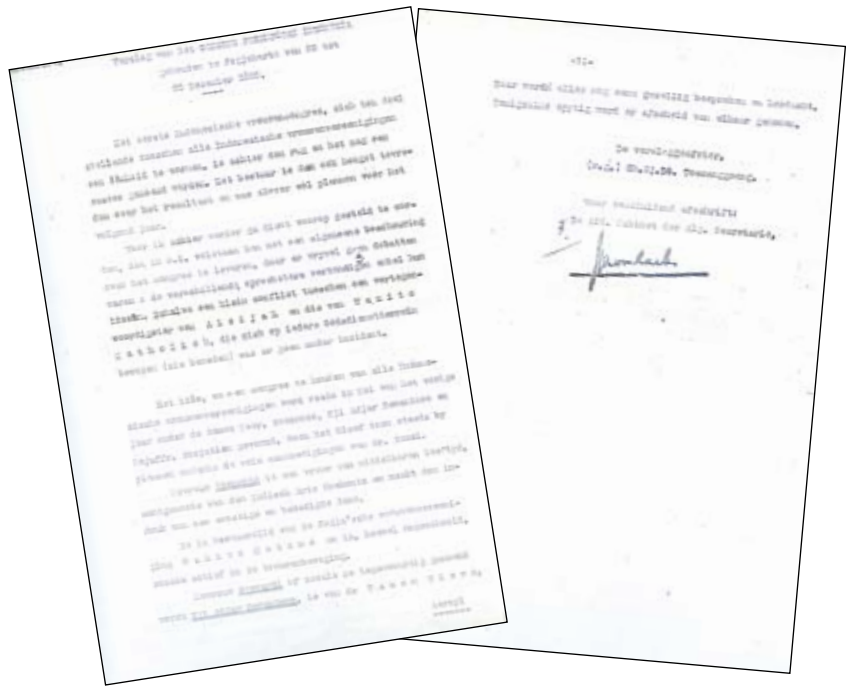
barat, serta sekaligus saya telah menyinggung pula pokok persoalan, ke arah mana kita harus bergerak untuk mencapai suatu penyelesaian yang dapat memberi kebahagiaan kepada negeri ini. Di tangan wanita terletak masa depan Indonesia).

Semangat Sumpah Pemuda dan dorongan nasionalisme di kalangan aktivis organisasi-organisasi wanita telah menumbuhkan suatu ide untuk mengadakan Kongres Wanita Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 dengan tujuan menyatukan perkumpulan wanita-wanita Indonesia dalam satu perhimpunan wanita Indonesia.

### Kongres Perempuan Indonesia dan Perikatan Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia I dilaksanakan tidak lama setelah Sumpah Pemuda oleh Ki Hadjar Dewantara disebut sebagai Tonggak Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia. Kongres tersebut dimotori tiga orang wanita tangguh yang menjadi panitia inti, yakni Ny. Soekonto, Nyi Hadjar Dewantara dan Nona Soejatin. Nyonya Soekonto merupakan istri dari dr. Soekonto yang oleh pemerintah kolonial digambarkan sebagai sosok wanita paruh baya yang tenang dan serius. Figur ini dikenal sebagai aktivis pergerakan "Wanita Utomo".

Nyi Hadjar Dewantara dikenal juga dengan sebutan Nyonya Soewardi Surjaningrat, merupakan seorang anggota perkumpulan "Taman Siswa" yang aktif dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan bagi penduduk bumi putra. Figur lain, seorang perempuan muda bernama Nona Soejatin. Gadis ini pada tahun berikutnya melebarkan sayap perjuangan melalui keikutsertaan dalam berbagai kongres wanita seperti "Istri Indonesia" (1932) dan "Wanita Indonesia" (1945). Soejatin muda juga merupakan sosok gadis yang aktif dalam kegiatan kepanduan dan bergabung dalam organisasi "Poeteri Indonesia". Ketiga wanita tersebut saling membangkitkan semangat organisasi wanita Jogjakarta lainnya untuk merealisasikan ide dan mengambil inisiatif dalam melaksanakan Kongres Wanita. Sebagai hasilnya terbentuklah sebuah



Bagian awal dan akhir Laporan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1922. Laporan tersebut di antaranya berisi mengenai pembentukan komite/panitia Kongres Perempuan Indonesia dan tiga mosi yang dihasilkan melalui kongres tersebut. (ANRI: D/49 Congres Perempuan Indonesia ANRI)

komite kepanitiaan pelaksanaan kongres tersebut.

Panitia yang disebut sebagai *Hoofdcmité* terdiri dari 15 orang wanita dari berbagai organisasi, yaitu: R.A. Soekonto (Wanita Oetomo), St. Moendjiah (Aisyah), St. Soekaptinah (J.I.B), Nona Soenarjati (Poeteri Indonesia), R.A. Hardjodiningrat (Wanita Katholiek), Nona Soejatin (Poeteri Indonesia), Nona Moersandi (Wanita Katholiek), Nji Hadjar Dewantara (Taman Siswo), Nona Moeridan (Partij Sarikat Islam Wonodijo), Nyonya Drijowongso (Partij Sarikat Islam Wonodijo), Oemi Salamah (Wanita Moeljo), Djohanah (Wanita Moeljo), Nona Badiah (Jong Java), St. Hajinah (Aisyah), Ismoediati (Wanita Oetomo).

Sangat menarik untuk mencermati beberapa informasi yang terkandung dalam arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kongres. Pertama, bahwa ide penyelenggaraan kongres telah disampaikan oleh Ny. Soekonto dari organisasi "Wanita Oetomo", Nji Hadjar Dewantara, serta Nona Soejatin pada Mei 1927, setahun sebelum pelaksanaan Sumpah

Pemuda. Hal ini membuktikan bahwa kebangkitan pergerakan dan pertumbuhan nasionalisme di kalangan kaum wanita berjalan seiring dengan pertumbuhan nasionalisme di kalangan pria Indonesia. Kedua, penggunaan istilah perempuan untuk penamaan organisasi yang baru lahir. Pemakaian istilah tersebut menandai tumbuhnya kesadaran dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap kedudukan, martabat dan harkat wanita, sehingga istilah perempuan dianggap lebih pantas digunakan dibanding wanita. Kata perempuan berasal dari kata *empu*, yang secara harafiah mengandung arti mulia seperti: gelar kehormatan atau orang yang sangat ahli. *Empuan* dalam budaya kesusastraan Melayu Klasik digunakan untuk menyebut istri raja.

Secara umum, pelaksanaan kongres diwarnai dengan kesungguhan hati untuk membentuk sebuah perkumpulan wanita dengan tujuan menyatukan organisasi wanita-wanita di seluruh Indonesia dalam bentuk perikatan. Patut digarisbawahi bahwa kongres yang dihadiri beberapa utusan dari berbagai organisasi wanita

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, umur yang saling berpaut jauh, tidak memunculkan konflik di antara para peserta, bahkan muncul suasana saling menghargai.

*“De harmonische samenwerking tusschen ouderen en jongeren viel buitengewoon op, vooral juist waar er zoo'n groot verschil bestaat tusschen hun opleidingen.” Onder de jongeren waren kweekschoolonderwijzeressen, A.M.S. leerlingen enz., terwijl er oude vrouwen bij waren die heelemaal ongeschoold zijn. Toch waardeeren ze elkaar. Bij de bestuursverkiezing verwachtte ik, dat één van de onderwijzeressen als presidente gekozen zou worden, daar de jongeren sterker vertegenwoordigd waren. Doch de meeste stemmen kreeg Mevrouw Soekonto.*

“(Kerja sama yang harmonis antara para wakil organisasi yang lebih tua dan lebih muda sangat luar biasa menarik perhatian, terutama karena ada perbedaan yang sangat besar dalam tingkat pendidikan mereka.” Para wanita yang lebih muda merupakan guru taman kanak-kanak, para siswa A.M.S. dan lain-lain, sementara para wanita yang jauh lebih tua sama sekali tidak berpendidikan. Namun mereka saling menghargai satu sama lain. Pada pemilihan ketua kongres saya menduga bahwa salah satu guru taman kanak-kanak tersebut akan terpilih menjadi ketua, karena para wanita muda itu merupakan kandidat yang kuat. Akan tetapi, suara terbanyak memilih Nyonya Soekonto.)”

Kongres I telah melahirkan langkah besar bagi kehidupan wanita Indonesia, yaitu:

Pertama, tercapainya hasrat untuk membentuk sebuah organisasi wanita solid, yang ditandai dengan kelahiran sebuah organisasi wanita yang dinamakan “Perikatan Perempuan Indonesia”.

Kedua, kongres tersebut telah melahirkan tiga mosi yang keseluruhannya berorientasi pada kemajuan wanita, yaitu: tuntutan penambahan sekolah rendah untuk anak perempuan Indonesia, perbaikan aturan dalam hal taklek



Surat Keputusan 28 November 1929 No. 13 yang menyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda setuju dalam hal penambahan jumlah sekolah rendah untuk perempuan Indonesia, pembacaan taklek nikah sehingga perempuan Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya dalam pernikahan serta perbaikan tunjangan untuk janda dan anak yatim para pegawai pemerintah setelah menimbang surat permohonan dari R.A. Soekonto, Ketua Perikatan Perempuan Indonesia (ANRI: Algemeene Secretarie, Besluit 28 November 1929 No. 13)

## “Bersumber dari arsip, berkaca dari sejarah, kita menemukan kekuatan, peranan dan sumbangan besar perempuan Indonesia dalam membentuk republik ini.”

nikah, perbaikan aturan tentang sokongan untuk janda dan anak yatim pegawai negeri.

Langkah besar perempuan Indonesia pada kongres pertama yang antara lain menghasilkan persetujuan pemerintah kolonial menambah jumlah sekolah bagi perempuan Indonesia, merupakan bukti besarnya peranan perempuan dalam meningkatkan kemajuan kaumnya. Peristiwa tersebut diakui sebagai tonggak sejarah kebangkitan pergerakan perempuan Indonesia, sehingga pada Kongres

Perempuan Indonesia III di Bandung tahun 1938, tanggal 22 Desember dinyatakan sebagai Hari Ibu.

Bersumber dari arsip, berkaca dari sejarah, kita menemukan kekuatan, peranan dan sumbangan besar perempuan Indonesia dalam membentuk republik ini. Masih ada lagi peristiwa lain yang melibatkan perempuan, baik dalam skala kecil, menengah atau besar, yang keseluruhannya memiliki makna yang besar jika kita lihat pada zamannya.

Dwi Nurmaningsih :

# ARSIP TOKOH PEREMPUAN DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP

**Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia peran kaum perempuan telah mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia yang sistem kemasyarakatannya lebih menganut sistem patrilineal. Perempuan sebagai sosok pelindung, seorang ibu dengan penuh kasih sayang dan cinta mendidik anak –anak dalam suatu keluarga hingga menjadi generasi penerus bangsa yang terhormat, bermartabat, dan mendapat kedudukan mulia di mata bangsa lain dalam pergaulan global.**

**K**ebesaran seorang ibu dalam mendidik anak-anak dalam keluarga sehingga menjadi anak bangsa yang heroik dan nasionalisme sejati telah menunjukkan bahwa kaum perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercinta ini. Perjuangan dan upaya mempertahankan NKRI dari Sabang hingga Merauke bukanlah melulu hanya dilakukan oleh kaum lelaki.

Sebagai bagian dari anak bangsa, perempuan-perempuan gagah dan hebat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia seperti Tjuk Njak Dhien, Raden Dewi Sartika, R.A Kartini, dan lain-lain telah banyak berkontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan bangsa kolonial. Bahkan perlawanan dan perjuangan mereka telah memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat kaum lelaki di seluruh tanah air untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan untuk NKRI tercinta.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa dengan kemuliaan, kekuatan,

doa ikhlas para ibu di seluruh Nusantara, maka bangsa Indonesia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah kemerdekaan abadi - NKRI yang subur dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan kaum ibu dalam mewujudkan dan mengusung NKRI sebagai negara berdaulat, maka masyarakat Indonesia menggunakan kata "Ibu" untuk penyebutan hal-hal yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kata "Ibu Kota", bukan "Bapak Kota", dan "Ibu Pertiwi", bukan "Bapak Pertiwi".

## **Perempuan-Perempuan dalam Arsip**

Kajian sejarah tentang tokoh-tokoh pria yang bersumber dari arsip, telah banyak ditulis orang. Siapa tak kenal tulisan tentang Soekarno, Sjahrir, Tan Malaka, Amir Sjarifudin, Kahar Muzakar, dan lain-lain. Mungkin ada, tapi kita jarang menemukan tulisan yang mengangkat sosok pejuang perempuan Indonesia dengan menggunakan sumber arsip. Sejatinya, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia banyak kaum perempuan yang berperan besar dalam perjuangan dan pembangunan

Indonesia. Tentunya bukti peran serta kaum perempuan ini baik pada tingkat lokal maupun nasional terekam dalam arsip statis (*archives*) yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah maupun lembaga kearsipan nasional. Bagi sejarawan atau peneliti sosial yang menggunakan arsip sebagai sumber data, keberadaan arsip statis pada lembaga kearsipan (*archival institution*) merupakan bahan studi menarik untuk memecahkan persoalan minimnya tulisan mengenai peran perempuan dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Perempuan dalam arsip bermakna bahwa peran kaum perempuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terekam dalam arsip berdasarkan dimensi waktu kelampauan. Dengan demikian, penelitian terhadap perempuan dalam arsip berarti juga penelitian terhadap bahan-bahan yang merekam informasi tentang keadaan, perbuatan kegiatan, dan peristiwa yang melibatkan kaum perempuan di masa lampau. Melalui pemahaman terhadap rekaman keadaan, kegiatan, dan peristiwa mengenai kaum perempuan di masa lampau itu, maka kita dapat belajar secara arif mengenai sejarah peran perempuan dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Beberapa contoh sosok perempuan yang peranannya belum banyak diangkat dan ditulis oleh sejarawan dan peneliti perempuan dapat ditemukan dalam khazanah

arsip statis. Salah satunya adalah khazanah arsip masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sekitar abad ke-17, dalam historiografi sudah dikenal putri-putri dari Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-27 Desember 1636) yang berperan besar di Aceh. Kakak beradik yang seluruhnya berjumlah empat orang perempuan ini menguasai semenanjung Aceh hampir sepanjang periode 80 tahun, dimana kerajaan tersebut mampu menunjukkan eksistensi islam yang cukup besar di Nusantara. Mereka adalah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam (1675-1678), Sri Ratu Zaqiatuddin Ikayat Syah (1678-1686), dan Sri Ratu Zainatuddin Kamalat Syah (1686-1688). Sayangnya dari sumber kolonial yang dapat ditelusuri di ANRI, arsip para ratu ini tidak terlihat terlalu menonjol karena pada arsip VOC hanya menyebutkan kata “*Koningin*” (Ratu) dan tidak menyebut nama setiap ratu yang berkuasa pada saat itu.

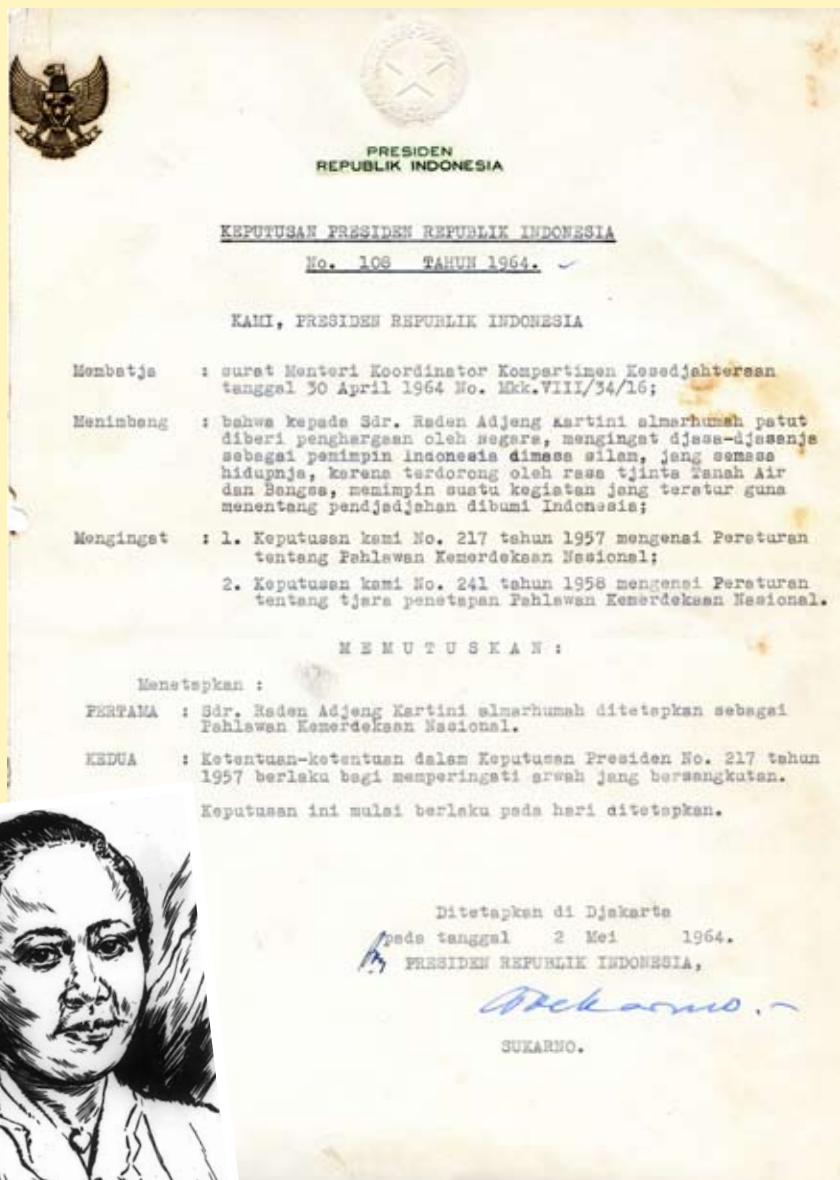
Hal yang sama mengenai sepak terjang perempuan heroik Martina Martha Tiahahu yang telah membantu perjuangan Thomas Matulesi (Pattimura) melawan kolonial Belanda di Maluku pada awal abad ke-19. Riwayat perempuan hebat ini tidak banyak ditulis orang karena hanya sedikit arsip mengenai peristiwa itu yang diwariskan kolonial Belanda. Hal ini dapat terjadi, kemungkinan dikarenakan periode perjuangan beliau merupakan masa peralihan Pemerintahan Inggris di Jawa pada 1811-1817 sehingga tidak menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan sistemadministrasipemerintah kolonial Belanda.

Peran perempuan dalam bidang pendidikan sejak dulu tidak dipungkiri lagi keberadaannya. Apabila sekarang ini kita banyak mendengar tentang sekolah

gratis dari dua orang ibu kembar, maka sejak dahulu peran Dewi Sartika pada sekolah perempuan sudah dapat menjadi contoh yang baik. Beberapa tokoh perempuan lain yang tidak terlalu banyak disinggung arsipnya, dapat diakses melalui arsip *Algemeene Secretarie* (sekarang Sekretariat Negara) dan beberapa arsip daerah (*Gewestelijke stukken*) abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.

Peran para perempuan hebat

tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masanya telah menginspirasi para perempuan Indonesia lainnya pada era kemerdekaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan harta dan nyawa kaum perempuan pendahulunya. Bila melihat penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pascakemerdekaan



Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 1964 mengenai penetapan Raden Adjeng Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional



Dewi Sartika

Indonesia tercinta telah banyak melahirkan tokoh-tokoh perempuan hebat di bidangnya masing-masing antara lain Maria Ulfah (pendidik), Titik Puspa (seniman), Mien Uno (pengusaha), Pratiwi Sudarmono (calon astronot), dan lain-lain.

Mereka semua merupakan sosok lain dari Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam, Martina Martha Tiahahu, RA Kartini, dan Dewi Sartika pada masanya, yang telah berjasa kepada negara melalui keahlian yang dimilikinya masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekosongan khazanah arsip statis mengenai riwayat utuh perempuan-perempuan hebat Indonesia baik pada level daerah maupun nasional pasca kemerdekaan Indonesia, maka lembaga kearsipan institusi pemerintah yang memiliki

tanggung jawab dalam penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa harus segera menyusun program penyelamatan arsip para tokoh perempuan sesuai dengan wilayah yuridiksinya dengan strategi akuisisi arsip statis.

#### **Strategi Akuisisi Arsip Statis**

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan (Pasal 1 angka 27 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Khazanah arsip (*holdings*) yang berada di lembaga kearsipan sebagian besar merupakan peninggalan kegiatan akuisisi yang telah dilakukan oleh lembaga pendahulunya.



Maria Ulfah Santoso

Akuisisi yang dilakukan lembaga kearsipan saat ini mencoba meneruskan hal yang telah dilakukan sebelumnya serta mencoba melakukan terobosan-terobosan baru. Meskipun akuisisi arsip statis di Indonesia dari masa ke masa senantiasa mengalami perubahan strategi maupun kebijakan, tetapi pada prinsipnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu terselamatkan dan terpeliharanya arsip statis sebagai memori kolektif pada lembaga kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan layanan publik.

Dalam rangka penyelamatan, pelestarian, dan memperkaya khazanah arsip statis tentang perempuan-perempuan Indonesia yang mempunyai peran dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia, perlu ditempuh terobosan-terobosan baru sebagai bagian dari strategi akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan. Dalam hal ini lembaga kearsipan harus memperhatikan empat aspek strategi akuisisi arsip statis, yakni kebijakan, program, kegiatan, keluaran (*out put*).

Kebijakan dilakukan dengan menetapkan kebijakan penyelamatan arsip statis mengenai perempuan Indonesia dengan pendekatan hukum, politik, kebudayaan, kearsipan dan situasional. Program dilakukan dengan

penyusunan program penyelamatan arsip statis yang dihasilkan oleh pencipta arsip tingkat pusat atau daerah. Kegiatan dilakukan dengan melaksanakan akuisisi arsip statis dari pencipta arsip tingkat pusat atau daerah melalui penyerahan arsip, peliputan langsung, dan perekaman sejarah lisan yang berkaitan dengan tema perempuan. Keluaran (*output*) dilakukan dengan menetapkan jumlah arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip tingkat pusat atau daerah, peliputan langsung, dan perekaman sejarah lisan yang berkaitan dengan tema perempuan.

Model strategi akuisisi arsip statis bertema perempuan oleh lembaga kearsipan dapat dijelaskan pada gambar di samping.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan NKRI telah diisi dengan kisah heroik anak-anak bangsa dari berbagai suku dan lapisan masyarakat di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Tampilnya anak bangsa dari kaum perempuan sebagai agen dalam revolusi dan reformasi politik di tanah air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Semua data dan fakta mengenai peran kaum perempuan dalam torehan sejarah perjalanan bangsa Indonesia terekam dalam arsip di tingkat lokal maupun nasional.

Minimnya tulisan yang mengangkat tema perempuan dalam sejarah perjalanan bangsa bukan berarti kecilnya peran perempuan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini lebih disebabkan kurangnya pemanfaatan arsip pada lembaga kearsipan yang bertema perempuan sebagai sumber penelitian dan penulisan sejarah. Hal lain yang juga memengaruhi minimnya penelitian dan penulisan bertema perempuan adalah ketersediaan arsip statis mengenai tokoh perempuan pada lembaga kearsipan yang



“Program akuisisi arsip statis melalui strategi akuisisi arsip statis bertema perempuan dengan empat aspek utama penyelenggaraan akuisisi arsip statis, yakni kebijakan, program, kegiatan, keluaran (*output*) merupakan strategi tepat dalam penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.”

Salah satu faktor yang mungkin disebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan.

Program akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan mempunyai peran besar terhadap keselamatan dan kelestarian arsip statis yang dihasilkan oleh pencipta arsip di tingkat daerah maupun nasional. Program akuisisi arsip statis melalui strategi akuisisi arsip statis bertema perempuan dengan empat aspek utama penyelenggaraan akuisisi arsip statis, yakni kebijakan, program, kegiatan, keluaran (*output*) merupakan strategi tepat dalam penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. Paling tidak ada tiga alasan utama mengapa lembaga kearsipan melaksanakan

penyelamatan arsip statis bertema perempuan melalui strategi akuisisi arsip statis, yakni:

Pertama, memberikan inspirasi dan hormat terhadap kelampauan yang melibatkan peran kaum perempuan.

Kedua, memberi kemungkinan kepada pengambil keputusan dan rakyat untuk belajar tentang masa lalu yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Ketiga, memungkinkan masyarakat melihat secara jelas tentang episode kejadian atau peristiwa tertentu yang melibatkan peran agen kaum perempuan.



Perempuan Irian sedang membuat jalan dengan menimbun rawa  
Sumber: ANRI, KIT Irian No. 1030-65

Ina Mirawati :

## “POTRET KEGIATAN PEREMPUAN INDONESIA DI MASYARAKAT (TEMPO DOELOE) DALAM BINGKAI ARSIP FOTO”

*“Buat mencoba mencetuskan api idam-idaman jiwaku kepada segenap wanita Indonesia, yang jika tiada mereka tak mungkin kita mencapai kemenangan sosial. Wahai wanita Indonesia, buat engkaulah kitabku ini, buat engkaulah aku menggoyangkan pena, kadang-kadang di bawah sinar lilin sampai jauh di waktu malam. Sadarlah, bangunlah, bangkitlah, berjuanglah menurut petunjuk-petunjuk yang keberikan itu...”*

Sepenggal kalimat ini ditulis oleh Presiden Soekarno dalam bukunya berjudul *“Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjongan Republik Indonesia”*. Buku ini terinspirasi dari seorang pengasuhnya bernama mbok Sarinah yang selalu membantu ibunya, serta mengajarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Soekarno. Menurut Soekarno, perjuangan perempuan tidak melulu harus secara fisik namun dapat pula dalam bidang sosial, budaya, dan politik.

Kiprah dan kegiatan perempuan

Indonesia di bidang sosial tempo doeloe sangat menarik karena mereka harus berjuang demi mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak, sehingga kehadiran para perempuan Indonesia patut dihargai dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Perempuan Indonesia tempo doeloe juga ikut berpartisipasi ketika kaum laki-laki berjuang melawan penjajahan Belanda. Mereka membantu menyediakan konsumsi di dapur, merawat para pejuang yang sakit dan kadang ikut serta mengangkat

senjata maju bersama laki-laki. Situasi ini boleh dikatakan banyak menginspirasi perempuan Indonesia di masa sekarang, walaupun saat ini perempuan Indonesia tidak lagi mengangkat senjata namun mereka terlibat secara aktif dalam bidang sosial, politik, hukum, pendidikan.

### Arsip Foto Perempuan Indonesia Tempo Doeloe

Selama ini kita hanya mengenal arsip dalam bentuk kertas, di mana semua kejadian ditulis dalam bentuk laporan, surat menyurat atau catatan harian milik pejabat masa itu untuk pertanggungjawaban hasil kerjanya. Pejabat juga membuat *Memorie van Overgave* (Serah Terima Jabatan) jika telah habis masa jabatannya (pensiun), mutasi, dan digantikan





Perempuan Irian sedang menangkap ikan  
**Sumber: ANRI, KIT Irian No. 1043-6**



Profil seorang mandor perempuan di  
 Jawa Tengah  
**Sumber: ANRI, KIT Jateng No. 426/74**



Buruh perempuan sedang mengolah damar di sebuah pabrik di Pontianak.  
**Sumber: ANRI, RVD Kal-Bar No. A 135-47**

Foto dikenal sebagai media untuk mengekspresikan diri dalam bentuk seni. Dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Foto, disebutkan bahwa foto sebagai arsip adalah hasil pemotretan baik berupa *negative film* (klise) maupun gambar positif (hasil cetak/afdruk) yang layak simpan setelah melalui tahap seleksi dengan kriteria tertentu. Penciptaan arsip foto tersebut secara umum sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal ini menjadikan jenis dan bentuk fisik arsip foto dapat berubah dan terus berkembang ke dalam bentuk dan format yang lebih baru.

Arsip foto yang tersimpan di ANRI berjumlah 1.663.000 lembar (negatif dan *prints*) dan yang sudah diolah sebanyak 541.131 lembar, tersimpan di dalam ruangan bersuhu 12°C dengan kelembaban 45-55%. Setiap lembar foto disimpan dalam amplop bebas asam dan secara teratur dilakukan penggantian amplopnya agar foto terjaga dengan tetap sempurna. ANRI memiliki arsip foto dari koleksi KIT, Kementerian Penerangan (Kempen),

pejabat baru lainnya. Bagi pejabat yang pandai menulis, maka laporan mereka sangat baik karena kadang lengkap sekali, sehingga dari satu bundel *Memorie van Overgave* atau *Dag Register* (Catatan Harian) saja, akan dapat dihasilkan sebuah karya tulis ilmiah.

Dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau

peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk arsip tersebut adalah arsip foto.

NIGIS, RVD, tokoh/personalia, Sekretariat Negara, LIN. Isi arsip foto bermacam-macam, antara lain mengenai bangunan, pemandangan, suku bangsa, kesenian, pemerintahan, peristiwa bersejarah, tokoh, politik, hukum, agama, sekolah, industri.

Foto yang diambil dengan menarik mempunyai nilai artistik sangat tinggi, walaupun temanya kadang biasa dan sangat sederhana. Dalam tulisan ini penulis mengambil beberapa arsip foto kegiatan Perempuan Indonesia Tempo Doeloe di *Nieuw Guinea* (Irian), Jawa Tengah, dan Pontianak, khususnya mengenai kehidupan sosial sehari-hari mereka di lingkungan masyarakatnya. Kehidupan sosial di sini adalah cara para perempuan tersebut mengisi kehidupannya sehari-hari, membantu suami dan mencari nafkah untuk keluarganya, dan hal itu juga berarti bahwa mereka adalah pahlawan bagi keluarganya. Mengapa Perempuan Indonesia di Irian? Karena selama ini

kita hanya mengekspos perempuan-perempuan Indonesia khususnya yang berasal dari Jawa dan Bali. Padahal ada kehidupan perempuan-perempuan Indonesia di daerah lain yang juga sangat unik dan apik untuk kita cermati. Di samping itu, Irian juga banyak mengukir sejarah perjuangan, seperti peristiwa Perang Dunia II di Morotai, kisah Herlina si Pending Emas, kembalinya Irian tanggal 1 Maret 1963 Peristiwa Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang mengikrarkan bahwa Irian adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potret kehidupan perempuan Indonesia di masyarakat tempo doeloe sudah sangat bersosialisasi dan saling membantu. Tercermin dalam arsip foto koleksi KIT Irian Barat, di mana tampak para perempuan



Sekelompok perempuan Maluku sedang mencari kutu.  
Sumber: ANRI, KIT Maluku No. 383-60



Perempuan Irian sedang menganyam  
Sumber: ANRI, KIT Irian No. 1058-48

Irian yang sedang bergotong-royong membuat jalan dengan menimbun rawa-rawa. Profil mereka masih sangat primitif baik dalam cara berpakaian maupun sarana membuat jalan, namun mereka tetap bersemangat walaupun tidak tampak laki-laki yang membantu mereka. Sekilas tampak foto yang sederhana, namun foto dengan momen tersebut belum tentu dapat kita temukan di masa sekarang.

Perempuan Irian juga melakukan pekerjaan yang dilakukan laki-laki, yaitu mencari ikan dengan menggunakan bubu (alat tradisional menangkap ikan yang terbuat dari bambu). Walau bubunya terlihat berat namun kedua perempuan Irian tersebut memasangnya untuk mendapatkan ikan. Keahlian lain dari perempuan Irian adalah menganyam jerami untuk

dijadikan barang anyaman seperti tas, topi atau hiasan-hiasan rumah tangga. Mereka pun dapat membawa barang yang sangat banyak dan berat dengan cara menggendongnya dipunggung dan mengikatnya dengan selendang yang dikaitkan di kepalanya, sangat unik.

Profesi sebagai mandor juga sudah dilakukan oleh perempuan Indonesia, tugasnya mengawasi para pekerja di perkebunan-perkebunan. Di Jawa Tengah, mandor perempuan pada masa itu hanya mengenakan kain kemben dengan wajah yang masih polos tanpa baluran kosmetik. Perempuan Indonesia yang bekerja di pabrik pun sudah ada sejak dulu, seperti mengupas dan mengolah damar hingga menjadi minyak di sebuah pabrik di Pontianak.

Masih banyak arsip foto mengenai kegiatan perempuan Indonesia tempo doeloe yang ada di ANRI dengan tema bermacam-macam seperti telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan foto-foto tersebut kita dapat membandingkan keadaan perempuan Indonesia pada masa sekarang dengan masa lalu. Kita dapat melihat dan mempelajari kesantunan para perempuan itu di dalam etika bersosialisasi, cara-cara berpakaian, kesederhanaan, maupun semangat para perempuan tempo doeloe menghadapi tantangan dalam kehidupan yang mereka jalani.

Namun tidak semua arsip foto mempunyai nilai guna. Oleh karena itu kita harus jeli dalam memilah foto mana yang harus disimpan sebagai arsip. Bagi kita, foto pribadi mempunyai nilai guna tetapi harus memperhatikan cara penyimpanan dan perawatannya.



Perempuan Irian sedang membawa barang dengan cara menggendongnya di punggung  
Sumber: ANRI, KIT Irian No. 699-88

Jika kita rajin merawat foto, maka foto akan awet dan merupakan arsip yang tidak ternilai harganya karena *moment* yang terjadi di masa lalu tidak akan kita dapatkan lagi sama seperti di masa itu.

Sekarang ini semakin banyak permintaan terhadap koleksi arsip foto tempo doeloe. Hal ini membuat semakin terbukanya peluang untuk lebih menggali mengenai keunikan

arsip foto. Apabila peristiwa bersejarah ataupun hal-hal unik yang terekam dalam arsip foto tempo doeloe dipadukan dan dilengkapi juga dengan arsip kertas maupun arsip filmnya, maka akan menjadi lebih menarik dan bernilai guna sejarah sangat tinggi.

**Dharwis Widya Utama Yacob :**

## **POCUT MEURAH INTAN (1833-1937): WANITA HELDHAFTING (GAGAH BERANI) ACEH YANG TERLUPAKAN**

**S**elama ini pahlawan wanita Aceh yang kerap kali dibahas adalah Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Perjuangan mereka telah banyak diceritakan di buku sejarah dan juga di media massa. Kedua wanita tersebut pun telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Padahal masih banyak wanita hebat Aceh lainnya yang gigih berjuang hingga meninggal dalam perlawanannya. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia adalah hanya sebagian kecil dari pengobar semangat perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tentunya kita harus mengenal pahlawan wanita lainnya yang juga berjuang melawan penjajah.

Pocut Meurah Intan namanya. Lahir di Biheue tahun 1833. Biheue adalah sebuah *uleebalang* (kenegerian) yang merupakan Wilayah Sagi XXII Mukim di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh merupakan kerajaan di wilayah Aceh, berdiri pada tahun 1496 sampai dengan 1903, dengan raja yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Wilayah Sagi XXII Mukim merupakan tempat Panglima Polim juga berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada perkembangannya, Biheue masuk Wilayah XXII Mukim terdiri dari wilayah Pidie, Batee, Padang Tiji, Kale, dan Laweung dikarenakan terjadi krisis



Pocut Meurah Intan  
(Sumber: Lukisan Karya A.B. Rooseno, 1994)

politik pada akhir abad ke-19. Krisis politik tersebut diakibatkan terjadinya perampasan daerah oleh Teuku Raja Pakeh Pidie atas dukungan Teungku di Boloh. Daerah tersebut merupakan bagian dari kabupaten Aceh Besar.

Pocut Meurah Intan adalah putri keturunan kalangan Kesultanan Aceh. Ayahnya merupakan seorang *Kejruen* (Kepala Negeri) Biheue. Pocut Meurah Intan memiliki suami bernama Tuanku Abdul Madjid bin Tuanku Abbas bin Sultan Alaidin Jauhar Syah Alam. Tuanku Abdul Madjid bekerja di bagian bea cukai di Pelabuhan Kuala Batee. Dari perkawinan dengan Tuanku

Abdul Madjid, Pocut Meurah Intan memiliki tiga orang putra bernama Tuanku Muhammad atau biasa dikenal Tuanku Muhammad Batee, Tuanku Budiman, Tuanku Nurdin. Semua anaknya berjuang dalam Perang Aceh. Perang Aceh adalah peperangan yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan pemerintah Belanda yang dimulai tahun 1873 ditandai dengan datangnya kapal Belanda di pantai Kotaraja. Pocut Meurah Intan juga merupakan ibu tiri dari permaisuri Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah (Sultan terakhir Kesultanan Aceh). Pocut Meurah merupakan nama panggilan khusus bagi wanita keturunan keluarga Kesultanan Aceh. Pocut Meurah Intan juga dipanggil juga dengan Pocut Biheue karena beliau berasal dari Biheue. Dalam perjuangannya selalu didampingi seorang panglima perang bernama Mahmud atau Waki Mud.

Setelah meninggalnya Sultan Alauddin Mahmud Syah, dilantiklah Sultan Alaiuddin Muhammad Daud Syah menjadi Sultan Kerajaan Aceh yang masih berusia sepuluh tahun. Hal ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kemala dan pada saat itu pula peperangan di wilayah Aceh semakin dahsyat dan sifat peperangan berubah menjadi perang gerilya di wilayah Aceh. Para pemimpin perang juga mulai hijrah



Wilayah Aceh Besar yang merupakan wilayah gerilya Pocut Meurah Intan, 1873-1874

(Sumber: De Haan No. H.88)

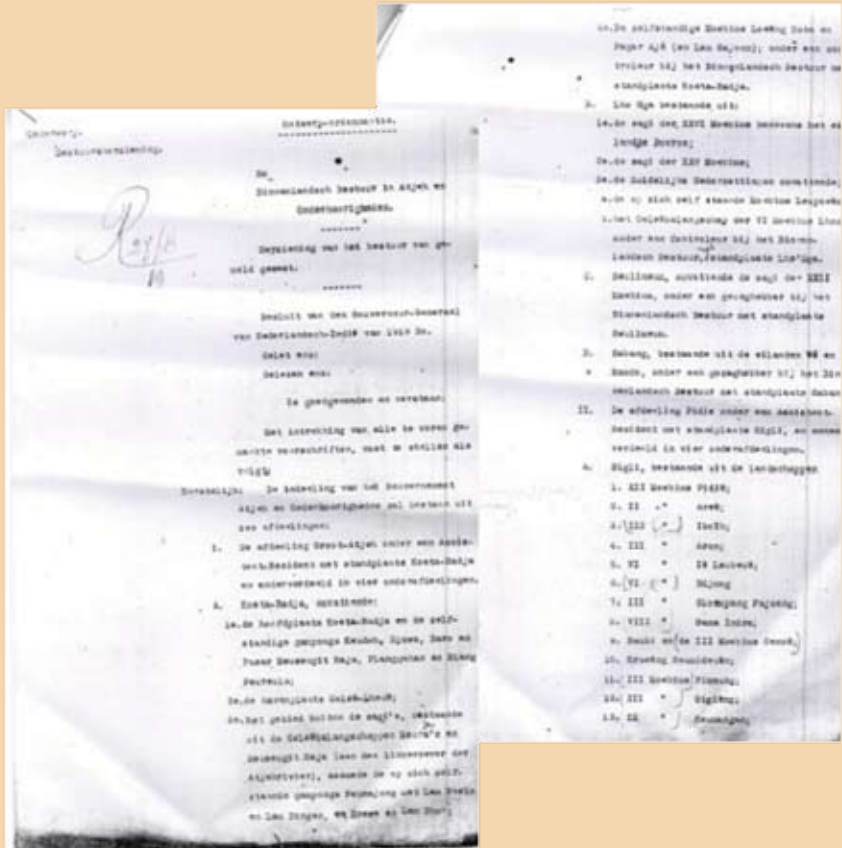
ke daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Timur. Salah satu daerah perang gerilya ialah daerah Laweung dan Batee. Pocut Meurah Intan adalah pemimpin perang gerilya di daerah Laweung. Hal ini dilandasi oleh menyerahnya sang suami kepada Belanda. Padahal sebelumnya mereka berkomitmen untuk melawan Belanda sampai akhir. Menyerahnya suaminya kepada Belanda juga memicu Pocut Meurah Intan untuk menceraikan suaminya tersebut. Setelah bercerai dengan suaminya, Pocut Meurah Intan bertekad untuk berjuang melawan Belanda. Pocut Meurah Intan juga mengajak ketiga putranya untuk ikut berperang. Beliau memimpin pasukan keluar-masuk hutan.

Begitu seringnya Pocut Meurah Intan bersama pasukannya menyerang pasukan Belanda sehingga beliau masuk dalam daftar buronan Belanda. Pasukan *marsose* Belanda berusaha mengadakan patroli dan pengejaran terhadap pasukan Pocut Meurah Intan. Berkat semangat berjuang bersama ketiga anaknya, Pocut Meurah Intan semakin kuat melawan Belanda. Namun, putra pertama yaitu Tuanku Muhammad atau Muhammad

Batee tertangkap pada Februari 1900. Tertangkapnya putra pertama membuat Pocut Meurah Intan semakin bersemangat. Cintanya dengan tanah kelahiran yang diilhami oleh kepercayaan pada agama dan pendidikan dari guru beliau dan ditambah pula pengaruh dari cerita Hikayat Perang Sabil, membuat Pocut Meurah Intan tidak kenal menyerah. Dalam setiap pertempuran, beliau bersama dua putranya dan panglima perang yang setia selalu gigih dalam berjuang. Namun, walaupun Pocut Meurah Intan memiliki daya juang yang tinggi, pada 11 November 1902 Pocut Meurah Intan tertangkap di Gampong Sigli.

Tertangkapnya Pocut Meurah Intan memberikan kesan tersendiri. Hal ini diceritakan oleh H.C.Zentgraaff, seorang wartawan Belanda dan

pemimpin redaksi koran *De Java Bode* yang meliput perang di Aceh. Zentgraaff menceritakan bahwa Pocut Meurah Intan dikejar oleh 18 orang *marsose* (*marechausee/serdadu*) yang dipimpin oleh Veltman. *Marsose* adalah satuan militer yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai pasukan taktis melawan gerilyawan Aceh termasuk menangkap Pocut Meurah Intan. Pocut Meurah Intan yang dalam keadaan sendiri tidak menyerah begitu saja. Dengan rencongnya, beliau menyusuk seluruh pasukan *marsose* tanpa takut. Dalam penyerangan tersebut, Pocut Meurah Intan terluka parah. Veltman pun justru berusaha menolongnya. Tapi Pocut Meurah Intan menolaknya. Dengan penyembuhan luka yang dilakukannya sendiri, membuat dirinya



Pembagian Wilayah XXII Mukim, tempat lahirnya Pocut Meurah Intan, 1919 (Sumber: *Binnenlands Bestuur* No.1081)



Pasukan *marsose* (*marechaussee*/serdadu) Belanda sedang bersiaga untuk menghadang perjuangan gerilyawan Aceh termasuk Pocut Meurah Intan, 1908  
(Sumber: KIT Aceh No.112/46)

mengalami kecacatan di kakinya. Oleh karena semangat beraninya, Belanda menjulukinya “Heldhafting” yang memiliki arti “yang gagah berani”.

Setelah Pocut Meurah Intan tertangkap, Pocut Meurah Intan bersama putra keduanya, Tuanku Budiman, ditahan di Aceh. Sementara itu, putra bungsu Pocut Meurah Intan, Tuanku Nurdin tetap meneruskan perjuangan ibunya di kawasan Laweueng dan Kalee. Namun pada 18 Februari 1905, Belanda mampu menangkap di desa Lhok Kaju. Tuanku Nurdin ditahan bersama dengan ibunya dan kakaknya. Pada 6 Mei 1905, Pocut Meurah Intan bersama kedua putranya dan seorang keluarga Sultan Aceh bernama Tuanku Ibrahim dibuang ke Blora, Jawa Tengah tepatnya di desa Muman. Putra pertama Pocut

Meurah Intan, Tuanku Muhammad, justru terpisah dan dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara. Di tempat pembuangannya itu, Pocut Meurah Intan belum banyak dikenal orang. Selama pembuangannya, masyarakat Blora lebih mengenal dengan nama “Mbah Tjut”. Dalam pembuangannya, beliau tidak dapat lagi berjuang karena terkendala komunikasi dengan pengikut-pengikutnya. Sampai akhirnya Beliau wafat di usia sekitar 105 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum desa Tegal Sari, kabupaten Blora tepatnya pada 19 September 1937.

Pocut Meurah Intan merupakan wanita di bidang pertahanan dan kemiliteran yang perlu dicontoh. Beliau berjuang demi martabat bangsanya tanpa mengorbankan waktu dengan

anak-anaknya. Justru beliau berjuang bersama anak-anaknya. Wanita seperti Pocut Meurah Intan mampu berjuang tanpa mengabaikan perhatian terhadap anak-anaknya. Pocut Meurah Intan mampu memberikan rasa bangga terhadap anak-anaknya sehingga harga diri dan kepercayaan bangsanya terutama rakyat Aceh agar selalu terus berjuang melawan penjajah. Pocut Meurah Intan adalah seorang ibu yang piawai dan pejuang yang teguh dalam pendirian. Beliau merupakan wakil rakyat Aceh sebagai bagian dari perjuangan dan pahlawan bagi kaumnya dan bangsanya.

Tyanti Sudarani :

# EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM PERDAGANGAN LADA DI BANTEN

Membicarakan emansipasi perempuan ingatan kita seakan hanya tertuju pada R.A. Kartini, seorang pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Namun ternyata sebelum R.A. Kartini memulai sepak terjangnya sebagai pejuang emansipasi perempuan, di Banten pada tahun 1780 telah muncul perempuan-perempuan tangguh yang menjalankan perannya sebagai penyortir lada. Mengapa penulis katakan tangguh, karena perdagangan lada merupakan sektor perdagangan yang mayoritas dikuasai oleh kaum laki-laki dan emansipasi perempuan ini muncul di kerajaan Banten yang berazaskan Islam. Ketika Kartini dalam sebuah suratnya masih mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami, dan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah, ternyata perempuan-perempuan Banten telah melakukan emansipasi.

Emansipasi perempuan Banten tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pelabuhan dan kebesaran kerajaan Banten pada masa itu. Tome Pires dalam bukunya "Suma Oriental" mencatat bahwa Banten pada awal abad ke-16 masih merupakan bagian dari Kerajaan Sunda dan merupakan salah satu pelabuhan kerajaan tersebut. Kerajaan Sunda pada awalnya menguasai kegiatan perdagangan lada. Sentra pemasok lada berada di daerah pedalaman Jawa bagian barat di sekitar gunung

karang. Banten berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah utara dan barat laut Samudera Indonesia. Dilihat dari sudut ekonomi dan geografi, Banten merupakan pelabuhan yang penting, karena letaknya strategis dalam penguasaan Selat Sunda. Wilayah ini merupakan mata rantai dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera.

Letak Banten yang sangat strategis menyebabkan wilayah ini kemudian berkembang secara pesat. Kerajaan Banten menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda. Setelah berdiri sebagai sebuah kerajaan sendiri, Banten tumbuh menjadi sebuah perkotaan di pesisir utara pulau Jawa yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomiannya.

Daya	Jumlah	Nama Desa	Nama Mandor	Nama Penyortir
21		Duli	Bambaloy	Jawa Anammyra
26		B. Kamudon		dan Margaloboma
		Sandaygotang		Timony St mit
				ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel
24		Stemanoeit		ke Mdoel
		Goemangkere		ke Mdoel
		Sekong		ke Mdoel
		Sompang		ke Mdoel
		Adlong		ke Mdoel
		Toebohy		ke Mdoel
		Operepamuna		ke Mdoel
		Badawlang		ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel
				ke Mdoel

Daftar kampung, jumlah tanaman lada, nama mandor, penyortir, jumlah lada yang dihasilkan (Banten No.27)

Pelabuhan-pelabuhan di Banten banyak didatangi para pedagang dari Cina, Persia, Gujarat dan Turki.

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 banyak pedagang dari India, Arab, Persia yang menghindari Malaka dan berpindah jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada tahun 1615 orang-orang Belanda yang tidak berhasil berdagang di pantai barat Sumatera menarik kantor dagangnya dari Aceh untuk dipindahkan ke Banten. Mereka mempunyai tujuan dari Banten dapat mengadakan hubungan dagang secara langsung dengan Indrapura. Pertumbuhan Banten menjadi sebuah kota merupakan sebuah episode puncak perniagaan kerajaan Banten. Pertumbuhan kota ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Banten yang berbasis pada perdagangan lada dan pertumbuhan jaringan pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu masuk ke wilayah Banten.

#### Komoditi Lada

Lada merupakan komoditi utama yang dihasilkan kerajaan Banten. Tome Pires menyebutkan bahwa kualitas lada di Banten sedikit lebih baik dari pada lada yang dihasilkan India. Permintaan lada yang terus meningkat menyebabkan Banten berusaha meningkatkan produksinya dengan jalan meluaskan wilayahnya. Hal ini dilakukan agar peranan Banten sebagai pusat niaga tidak bergeser ke tempat lain. Usaha memperluas wilayah penanaman lada dipilih, karena lahan-lahan produksi di Banten sudah tidak mungkin diperluas lagi. Beberapa Sultan Banten berusaha meluaskan wilayah terutama di wilayah pusat penyuplai lada, seperti Palembang, Silebar, Bengkulu dan Lampung. Salah satunya adalah Sultan Hasanuddin yang saat pertama kali memegang tampuk pemerintahan, melakukan kunjungan ke Lampung. Hal ini untuk memastikan bahwa

Lanjutan arsip Banten No.27			
1	1	Gondor	6
1	1	Gondor	4
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	3
1	1	Gondor	3
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	1
1	1	Gondor	6
1	1	Gondor	2
1	1	Gondor	3
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	5
1	1	Gondor	6
1	1	Gondor	14
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	60
1	1	Gondor	2
1	1	Gondor	1
1	1	Gondor	4
1	1	Gondor	5
1	1	Gondor	2
1	1	Gondor	3
1	1	Gondor	10
1	1	Gondor	3

Lanjutan arsip Banten No.27

Banten tidak akan pernah kekurangan stok lada dari Lampung. Lampung kemudian berada di bawah kekuasaan Banten dan merupakan daerah pemasok lada terbesar bagi Banten. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan kerajaan Banten sebagai kerajaan penghasil lada yang terbesar.

Persoalan lada di Banten tidak hanya tergantung pada petani, tetapi juga strategi dan pengaturan dalam tata niaga lada yang dilakukan oleh para elite kerajaan Banten. Selain memperluas daerah penanaman lada, tindakan lain yang dilakukan para elite kerajaan Banten adalah

mengeluarkan undang-undang yang mengatur tata niaga lada dan secara khusus mengatur tentang jual beli lada beserta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pidana dan perdata pada rakyat dan penguasa di wilayah Sumatera khususnya Lampung dan Silebar.

Pada awalnya perniagaan lada di Banten dikuasai orang-orang Cina. Mereka menjadi pedagang perantara sehingga lada Banten dikenal di Eropa. Ketika orang-orang Eropa berhasil mengadakan hubungan dagang secara langsung dengan kerajaan Banten, permintaan lada meningkat secara cepat. Perdagangan



lada ini menyebabkan Banten menjadi kawasan multi-etnis sehingga tidak mengherankan apabila di Banten telah terdapat perkampungan Cina dan Eropa (Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis). Setelah masuknya orang-orang Eropa dalam perdagangan lada di Banten kita baru dapat mengetahui daerah penghasil lada di Banten.

Berdasarkan laporan pemerintah Belanda pada tahun 1781-1791 diperoleh keterangan bahwa kebun-kebun lada terletak di kampung-kampung yang berada di daerah selatan pegunungan Banten.

Pada tahun 1789 terdapat 151 kampung penghasil lada di selatan pegunungan Banten. Pada tahun 1790 dilakukan peninjauan terhadap kebun-kebun lada di 87 kampung yang terletak di sebelah selatan pegunungan Banten. Di antara kampung-kampung yang disebutkan dalam arsip tersebut adalah Kadoedoeng, Bodjong Tjelinga, Tjilleman, Tjillebak, Tjaringin, Panambang, Loekalaba, Tellaraja Tjigana, Tanjak Koebang, Menes, Teloek Loeroep, Pandeygelang, Kamadean, Bankalog, Tjeket, Koeranten, Goenoeng Sari, Tjimanoek, Gedong, Badoelang Gieriepamana dan sebagainya (Banten No.27). Arsip tersebut juga memberitahukan kepada kita bahwa budi daya lada telah lama dilakukan di pedalaman Banten. Dalam arsip tersebut juga disebutkan nama-nama desa atau kampung sentra penanaman lada yang jumlahnya kurang lebih 198 kampung. Selain nama-nama kampung, arsip tersebut juga memuat nama para penyortir lada, nama mandor, hasil lada dalam ukuran zak (karung) dari masing-masing kampung yang berada di bawah pengawasan seorang mandor, jumlah pembeli, jumlah petani lada, keadaan tanaman lada bahkan tanaman

dadap yang dijadikan sebagai tempat merambatnya tanaman lada. Nama kampung-kampung tersebut sekarang berada di wilayah Tangerang, Bogor, Pandeglang, Serang dan Lampung.

Pada tahun 1803 terdapat laporan mengenai kunjungan ke kebun-kebun lada yang terletak di wilayah selatan dan pantai Banten (Arsip Banten No.28). Berdasarkan laporan dari Meelhousen dan Anthonjs pada tahun 1806 diketahui bahwa mereka melakukan kunjungan ke 135 buah kampung

yang berada di sebelah barat laut pegunungan Banten. Nama kampung-kampung tersebut, misalnya kampung Sampora, Maja, Lokke, Lassiea Lotoij, Kareo, Mandala, Sekon, Boncallok, Sadjra (Arsip Banten No.29).

Laporan Residen Banten tanggal 5 September 1855 menyebutkan hasil perkebunan lada di daerah Tjaringin dan rekapitulasi hasil produksi lada dari tahun 1851 yang dilakukan oleh seorang *controleur* Belanda di

The image shows a handwritten ledger on aged paper, titled "Lanjutan arsip Banten No.27". The text is written in cursive and organized into columns. At the top, there is a header line: "Lanjutan arsip Banten No.27" followed by some illegible handwritten text. Below this, there are several lines of data, each starting with a number (likely a village identifier) followed by multiple columns of numbers and some text. The numbers appear to be in various units, possibly representing production volume or value. The handwriting is dense and somewhat difficult to read due to the cursive style and fading of the ink.

Lanjutan arsip Banten No.27

daerah tersebut. Laporan ini juga menyebutkan mengenai peraturan harga lada di distrik Tjaringin dan Panambang, Banten (Arsip Cultures No.894). Pada tahun 1864 di Banten sudah dibuat peraturan mengenai pemeliharaan lada di masyarakat (Arsip Cultures No.895).

### Penyortir Lada

Melalui arsip diperoleh gambaran mengenai sistem pengumpulan komoditi lada yang dilakukan pada waktu itu. Hierarki sistem pengumpulan lada dimulai dari petani. Petani-petani ini menanam lada di lahan mereka sendiri ataupun di lahan milik para keluarga kerajaan. Di atas petani terdapat mandor yang membawahi satu kampung dan beberapa petani. Jabatan mandor dijabat oleh pemuka masyarakat di kampung tersebut dan terkadang juga oleh kerabat kerajaan. Apabila jabatan mandor dipegang oleh keluarga kerajaan akan terlihat dari gelar-gelar yang dipakai, seperti Ingebeij (Ngabehi) Wiera Jaba, Toebagus Agmat.

Rata-rata dalam satu kampung terdapat 2000 pohon lada. Hierarki tertinggi dalam sistem pengumpulan lada dipegang oleh penyortir. Pada umumnya pekerjaan sebagai penyortir lada dipegang oleh keluarga kerajaan atau tokoh agama. Para penguasa Banten beserta keluarganya merupakan mata rantai dalam perdagangan lada. Pekerjaan penyortir lada tidak semata-mata secara fisik memilih lada-lada yang berkualitas, tetapi para penyortir ini mempunyai kewenangan untuk berhubungan secara langsung dengan mandor dan pemerintah Belanda. Mereka membawahi beberapa mandor, mengumpulkan dan juga menentukan harga jual lada. Beberapa penyortir pun membawahi beberapa kampung. Mereka menguasai wilayah penyortiran dan pembelian lada di desa yang merupakan wilayah kekuasaannya.

The image shows a handwritten document on aged paper, likely an inventory or production record for pepper (lada) in Banten. At the top right, there is a circled number '3'. The text is written in Dutch and includes a table with columns for village names, quantities, and other numerical data. The table lists various villages such as 'Cempung Sampora', 'Rajua Atog', 'Maja', 'Pekel', 'Kusco', 'Kantula', 'Pallatoum', 'Akon', 'Benculleh', and 'Sampul'. Each row contains several numbers, some with dashes, representing different metrics. Above the table, there are several lines of handwritten text in Dutch, including 'Rappert ramben', 'steekt, de wijt en gital van Com', '200. Cempung, steekt wijtgenompe', and '10. stak, inwijgen als wijgt.'.

Village	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7
Cempung Sampora	2	2	503	010	660	---	2
Rajua Atog	0	4	---	311	3409	---	---
Maja	9	1	---	197	4020	---	---
Pekel	12	10	1765	4105	1029	---	6
Kusco	14	14	3401	1650	445	430	6
Kantula	20	1	5107	2013	5115	---	6
Pallatoum	20	6	0503	3407	2220	406	2
Akon	26	2	6500	270	4000	2000	6
Benculleh	40	5	2167	3069	7332	---	6
Sampul	107	6	2020	20209	26020	2000	16

Nama kampung penghasil lada (Banten No.29)

Berdasarkan arsip kita dapat melihat nama-nama dan pemakaian gelar yang dari para penyortir tersebut mengindikasikan bahwa mereka berasal dari kalangan keluarga kerajaan, seperti Pangeran Radja Koesoemo, Pangeran Agmat, Pangeran Aria Adipati Santiko, Aria Marga Koesoema, Ratu Bagoes

Pringgalija, Ratu Anom, Ratu Phaira, Ratu Raida, Ratu Ajoe, Ingebeij Dana, Ingebeij Soera Pralina, Ingebeij Doetadiekaria (Arsip Banten No.27). Namun demikian ada yang menjadi catatan bahwa gelar ratu tidak dipakai oleh perempuan saja, tetapi juga oleh laki-laki. Gelar Ratu yang dipakai oleh perempuan biasanya setelah Ratu

diikuti dengan nama perempuan, sedangkan Ratu Bagoes, Ratu Anom biasanya gelar yang dipakai oleh laki-laki. Selain keluarga kerajaan, di antara para penyortir juga dipegang dari kalangan agama, yaitu keay (kyai) dan nyay (nyai), seperti Nyay Bibie Radeen Tapanagara, Nyay Amban Rasia .

Berdasarkan nama-nama penyortir seperti Ratu Phaira, Ratu Raida, Ratu Ajoe Nyay Amban Raisa, Nyay Bibie Radeen Tapanagara dapat kita ketahui bahwa nama-nama tersebut adalah nama perempuan. Pada tahun 1780 telah muncul perempuan-perempuan yang terlibat dalam perdagangan lada di Banten, walaupun masih terbatas di kalangan keluarga kerajaan dan tokoh agama yang terlibat. Hal ini menunjukkan meskipun Banten merupakan kerajaan Islam, namun kedudukan dan peran perempuan pada saat itu tidak banyak dibedakan dengan laki-laki dalam perdagangan komoditi lada.

Dalam hal produksi lada para perempuan penyortir lada ini tidak kalah dengan produksi penyortir lada laki-laki. Sekalipun wilayah desa yang dikuasai oleh penyortir perempuan untuk penanaman lada lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang dikuasai oleh penyortir lada laki-laki, namun ternyata hasil produksi lada yang dihasilkan mereka jauh lebih banyak. Sebagai perbandingan terlihat pada penyortir-penyortir di bawah ini Aria Doeta Baskara membawahi 38 kampung dengan hasil 55 zak, Aria Warga Koesoema membawahi 9 kampung dengan hasil 10.75 zak, Pangerang Warga Di Radja menguasai 42 kampung dengan hasil 41 zak, Radja Koesoema membawahi 7 kampung dengan hasil 5 zak, Nyay Amban Rasia menguasai 26 kampung dengan hasil 45.25 zak, Ratoe Ajoe

**“ Sekalipun emansipasi perempuan pada saat itu masih di kalangan terbatas, tetapi hal ini membuktikan kepada kita bahwa perempuan penyortir lada di kerajaan Banten yang berazaskan Islam diberi kesempatan untuk bekerja, dan berkarya seperti halnya dengan laki-laki, seimbang dengan kemampuannya dalam hal perdagangan lada. ”**

membawahi 10 kampung dengan hasil 8 zak.

Dibandingkan dengan penyortir laki-laki, Nyay Amban Rasia hanya menguasai 26 kampung, namun produksi yang dihasilkan jauh lebih besar mencapai 45.25 zak. Penghasilan ini dicapai dalam waktu tiga bulan yaitu pada bulan Juli, Agustus, September 1893. Penulis menduga bahwa hasil produksi penyortir perempuan yang lebih besar ini dikarenakan perempuan lebih telaten dan rajin dalam mengontrol tanaman lada di wilayahnya.

Apa yang dilakukan perempuan-perempuan penyortir lada di Banten jauh keluar dari bayangan yang digambarkan oleh Kartini. Perempuan yang selama ini digambarkan oleh Kartini sebagai sosok yang lemah, berada di bawah subordinasi kaum laki-laki dan tidak dapat keluar dari rumah karena agama dan adat ternyata tidak berlaku di kerajaan Banten.

Perdagangan lada merupakan sebuah dunia yang keras untuk dimasuki oleh seorang perempuan, karena mayoritas pelakunya mulai dari petani hingga tingkat mandor adalah laki-laki. Namun, pada masa itu perempuan di Banten sudah bisa memasuki dunia perdagangan lada dan bekerja sama dengan kaum laki-laki.

Emansipasi pada saat itu tidak berarti bahwa kedudukan perempuan Banten lebih tinggi dari pada laki-laki, namun mereka mempunyai kesetaraan. Sekalipun emansipasi perempuan pada saat itu masih dikalangan terbatas, tetapi hal ini membuktikan kepada kita bahwa perempuan penyortir lada di kerajaan Banten yang berazaskan Islam diberi kesempatan untuk bekerja, dan berkarya seperti halnya dengan laki-laki, seimbang dengan kemampuannya dalam hal perdagangan lada.

Langgeng Sulistyo Budi :

## KISAH DI BALIK ARSIP : PEREMPUAN, KESETARAAN DAN PERGERAKAN POLITIK DI INDONESIA



Kegiatan membatik yang dilaksanakan sebagian perempuan Jawa Tengah (Data Informasi Arsip Foto Jawa Tengah Koleksi KIT No. 0146/034, ANRI-Jakarta)

**K**etika kesadaran membentuk sebuah “*nation state*” mulai muncul, seolah wawasan kita tertumpu pada perjuangan kaum pria saja. Padahal pada periode yang hampir bersamaan, banyak perempuan mencoba mengambil bagian dalam proses pembentukan jati diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis.

Dalam catatan sejarah sampai periode awal abad ke-20 aspirasi perempuan Indonesia pada umumnya masih bersifat sosial dan non-politis, walaupun secara perlahan sudah mulai memahami pentingnya pendidikan. Namun demikian, berdasar temuan

Cora Vreede de Steurs yang dimuat dalam bukunya yang berjudul ***Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*** (judul aslinya adalah: ***The Indonesian Women: Struggles and Achievement***), disebutkan bahwa pada periode ini perempuan tidak berjuang sendiri. Ketika Kartini memperjuangkan emansipasi ditemani oleh ayahnya, Dewi Sartika dibantu suaminya, yang berupaya memerangi tradisi pernikahan dini.

Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia pada awal abad ke-20 juga ditandai dengan pendirian organisasi perempuan. Pada

tahun 1912, *Putri Mardika* didirikan di Indonesia, yang mendapat bantuan dari *Budi Utomo*. Tujuan organisasi antara lain memberi bantuan dana kepada kaum perempuan untuk bersekolah dan melanjutkan sekolah. Pada tahun 1913 *Putri Mardika* mendirikan surat kabar mingguan yang sebagian besar tulisannya mengangkat isu pernikahan dini. Pada waktu yang bersamaan, organisasi *Keutamaan Istri* juga mendirikan empat sekolah untuk perempuan di daerah Sunda. Di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, pada tahun 1915 berdiri *Pawijatan Wanito*. Di Jepara pada tahun yang sama berdiri *Wanito Hado*. Di Pemalang



Seorang perawat sedang melakukan perawatan kepada seorang pasien perempuan di Rumah Sakit "Margaredja" Jawa Tengah disaksikan para perawat yang lain (Data Informasi Arsip Foto Jawa Tengah Koleksi KIT No. 0355/036, ANRI-Jakarta)

pada tahun 1918 berdiri *Wanita Susilo*. Di Surabaya berdiri organisasi perempuan *Putri Budi Sedjati*, yang mendapat dukungan dari kelompok studi dr. Soetomo. Organisasi ini berhasil mendirikan beberapa sekolah dan sekolah berasrama.

Di Sumatra Barat tahun 1914 berdiri *Kerajinan Amai Setia*, yang berupaya meningkatkan posisi perempuan melalui pendidikan. Di Padang Panjang berdiri *Keutamaan Istri Minangkabau*, yang berhasil membangun beberapa sekolah dan mengajarkan berbagai ilmu "terapan", yang berhubungan dengan masalah rumah-tangga. Federasi organisasi perempuan di Sumatra berpusat di Bukittinggi, yang bernama *Sarekat Kaum Ibu Sumatra*. Di Sulawesi,

tepatnya di Minahasa, berdiri organisasi perempuan dengan nama *Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan* (PIKAT) pada tahun yang sama, yang juga memiliki terbitan dengan nama yang sama.

Di samping organisasi, tonggak perjalanan sejarah perempuan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan munculnya berbagai media tempat menyampaikan dan menyebarkan aspirasi kaum perempuan. Pada tahun 1913, terbit sebuah terbitan independen perempuan dengan nama *Wanita Sworo*. Penerbitan ini diupayakan pertama kali oleh Siti Soendari, yang berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Di samping sebagai pendiri, dia juga dikenal sebagai penulis utama dalam media tersebut. Sering

kali dia mengkritik tradisi poligami, dan selalu memperjuangkan ide-ide tentang pentingnya pendidikan dan emansipasi bagi kaum perempuan.

*Wanita Sworo* tidak dalam berbagai tulisannya hampir selalu berhubungan dengan masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi kaum perempuan, seperti: cara merawat bayi, dan masalah rumah tangga lainnya. *Sarekat Kaum Ibu Sumatra* memiliki terbitan, *Al Sjarq* (timur). Dua surat kabar perempuan yang lain juga terbit di Sumatera, yaitu: *Suara Perempuan* (Padang) dan *Perempuan Bergerak* (Medan). Semua organisasi dan terbitannya berasal dari kelas atas di masyarakat.

Di samping organisasi-organisasi perempuan independen seperti disebut

diatas, ada beberapa organisasi agama dan nasionalis juga memiliki “sayap” organisasi perempuan. Organisasi perempuan di bawah *Sarekat Islam*, misalnya, adalah: *Wanudijo Utomo*, yang kemudian berubah nama menjadi *Sarekat Perempuan Islam Indonesia* (SPII).

Kongres pertama perempuan Indonesia dilaksanakan pada 22 s.d 26 Desember 1928 di Yogyakarta, setahun setelah *Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia* (PPPKI). Ide kongres ini berasal dari Nyonya Soekonto (guru sekolah Belanda-pribumi dan anggota *Wanita Utomo*); Nyonya Suwardi (istri dan teman Ki Hadjar Dewantoro); Nona Soejatin (yang kemudian menjadi Nyonya Kartowijono, guru Taman Siswa dan anggota Putri Indonesia).

Kongres itu diikuti oleh sekitar tiga puluh organisasi perempuan. Hasil penting kongres ini adalah pendirian *Perikatan Perempuan Indonesia* (PPI).

Dalam catatan Harry A. Poeze dalam bukunya yang berjudul *In het Land van de Overheerser: Indonesiers in Nederland 1600-1900* yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia dengan judul *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, menyebut bahwa pada 28 s.d 30 Agustus 1916 di Den Haag diadakan *Kongres Pengajaran Kolonial* yang pertama. Ketua kongres tersebut adalah Abendonon, pelindungnya adalah Pangeran Hendrik, dan ketua kehormatan adalah Menteri Daerah Jajahan. Utusan *Perhimpunan Hindia* adalah Ratulangie. Pembicara dari Hindia Belanda adalah Soewardi Soerjaningrat dan Dahlan Abdoellah. Para pendukung kebijakan Etis

berharap bahwa kongres dapat menjadi sarana untuk menggalang kerja sama di antara penjajah dan kaum terjajah.

Pada kongres itu juga berbicara Nyonya Kandau dan Siti Soendari Darmabrata. Kandau berbicara tentang pengajaran lanjutan untuk kaum perempuan di Minahasa. Tema yang sama juga menjadi topik pembicaraan Siti Soendari. Soewardi bertugas sebagai penerjemah pembicaraan Siti Soendari yang disampaikan dalam bahasa Melayu. Beberapa bulan sebelumnya Kandau berhasil mendapatkan akte guru di Amsterdam.

Pada tahun 1920, ada beberapa perempuan Jawa yang berhasil menginjakkan kaki di negeri Belanda untuk bersekolah. Saat itu keberangkatan mereka difasilitasi oleh salah satu ordo Katolik, bernama ordo *Franciscan* dari *Heijthuijsen*. Mereka adalah Catharina Soertijah, Francisca Soekeni Sasraningrat, Stephani Warsini, Wilhermina Walgitanimah, dan Cecilia Siwi Himowodjojo. Tiga orang ditempatkan di Sekolah Guru Katolik di Mook, dan dua orang lagi ditugaskan mengikuti pendidikan juru rawat di Oldenzaal. Ketiga orang yang menempuh pendidikan guru pulang pada tahun 1923 dan meneruskan pendidikannya di Semarang.

Periode awal abad ke-20 dikenal sebagai periode yang penting bagi para perempuan di Indonesia. Dari catatan di atas, tampak bahwa kesadaran untuk maju dengan lebih teorganisasi mulai berkembang. Semuanya itu membutuhkan proses. Hambatan budaya dan psikologis tentu harus dilalui oleh kaum perempuan, dan mereka sadar hal itu merupakan bagian dari sebuah perjuangan.

Masih terbuka peluang untuk bisa mempelajari sejarah perempuan di Indonesia. Setiap generasi memang harus terus menulis sejarah bangsanya. Arsip Nasional R.I (ANRI) merupakan tempat yang tepat untuk menggali sumber sejarah tersebut.

Data yang muncul di artikel ini hanya sebagian kecil saja. Catatan atau dokumentasi tertulis dan visual tentang kiprah para perempuan Indonesia, khususnya pada periode pergerakan, masih dapat dilacak di khazanah *Algemeene Secretarie*, koleksi foto, dan khazanah-khazanah yang lain.

Sebagai upaya merekonstruksi sejarah perjuangan mereka, dibutuhkan ketekunan dan persiapan khusus untuk dapat melacaknya. Bekal pengetahuan dari publikasi-publikasi ilmiah dan populer dapat membantu proses pelacakan sumber. Sekarang, sudah saatnya perempuan Indonesia menulis sejarah mereka sendiri. Arsip akan selalu siap menjadi bagian dari proses itu.

Toto Widyarsono :

# WAJAH SENI RUPA INDONESIA PADA ARSIP PERSONAL DR. MELANI

*Arsip kerap hadir dalam dua cara yang ekstrem. Teronggok berantakan penuh debu memenuhi ruang fisik. Dapat pula hadir dengan rapi dan terpetakan sehingga mampu “berbicara” mengapa kekinian seperti sekarang adanya. Cara kedua itulah yang telah ditempuh oleh dr. Melani D. Setiawan. Ia telah memotret tidak hanya karya seni atau penggarapan karya seni, tetapi ia memotret segala orang dari dunia seni. Jenis fotonya dapat disebut sebagai “foto kenang-kenangan yang lazim dibuat untuk mengaktifkan memori di kemudian hari”. Buku (Dunia Seni Rupa Indonesia, 1977-2011) dan kumpulan 45.000 arsip foto dr. Melani mengilhami kurator Jim Supangkat dan Christine Cocca menawarkan kata kunci “arsip” dan “personal” untuk direspons khususnya oleh para perupa dan siapa saja penikmat seni. Dari tumpukan berkas, arsip dan ingatan, mereka menyuguhkan persepsi masing-masing tentang kekinian mereka.*

## Apa dan Siapa Melani

**M**elani W. Setiawan dilahirkan 63 tahun yang lalu di Garut, Jawa Barat. Profesi sebenarnya adalah seorang dokter, tetapi ia lebih banyak dikenal di kalangan perupa. Melani bukanlah seniman, bukan pula *art dealer*, atau kolektor. Dia hadir di hampir semua pameran seni rupa nasional sejak tahun 1980. Oleh karena rajin melakukan kunjungan dalam berbagai pameran dalam kurun waktu yang cukup lama dan intens, Melani menjadi dekat dengan para seniman tanah air mulai dari yang senior sampai yang baru saja tampil. Suatu kali ia menuturkan, “Saya senang saja melihat pameran. Saya enggak ada urusan dengan bisnis seni rupa”.

Melani tidak saja rajin menghadiri pameran seni, baik di Jakarta, pelosok daerah, maupun sampai ke luar negeri seperti seperti Singapura,

China dan bahkan Afganistan. Semua itu dilakukan dengan biaya pribadi. Kehadirannya di hampir setiap *event* pameran membuatnya dapat berkomunikasi dengan para pelaku seni kapan saja. Sebaliknya, rumah Melani terbuka bagi seniman daerah yang ingin sekedar mampir atau mengingap. Selain seniman, kadang kala anak-anak muda yang biasa mengorganisasi acara pameran juga bertandang ke rumahnya. Mereka biasa menampung para seniman daerah yang kebetulan ada masalah, semisal ketinggalan pesawat. Sebagai seorang dokter Melani berpraktek di beberapa rumah sakit mulai Senin hingga Sabtu. Belakangan dia mengurangi jadwal praktek karena sedang sibuk menyiapkan buku. Jika tidak praktek, Melani menggunakan waktunya untuk bergaul dengan para seniman.

Dokumentasi perjalanan Melani



dr. Melani

untuk menghadiri pameran jumlahnya mencapai 45.000 yang terdiri atas foto-foto dirinya di sejumlah pameran seni, kartu nama dan sketsa pemberian seniman, hingga undangan untuk menghadiri pameran. Ia mengungkapkan, “Ayah saya memiliki studio foto dan itu membuat keluarga kami memiliki banyak koleksi foto pribadi. Saat saya SMP, saya sudah memiliki satu album foto sendiri. Itu membiasakan saya memotret perjumpaan apa saja”.

Pada tahun 2012 ini Melani telah membukukan sebagian koleksi dokumennya. Ia meluncurkan buku dokumentasi aktivitas seni rupa nasional pada bulan April lalu di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Saat

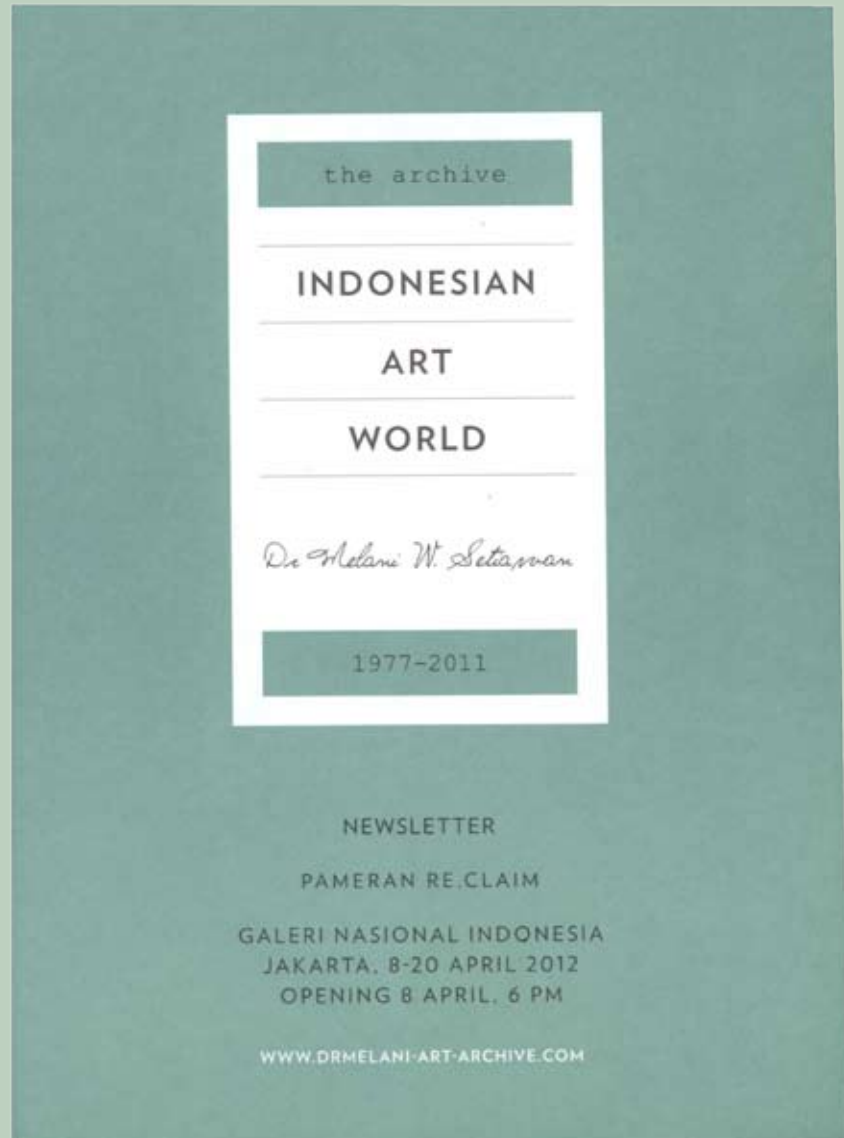
itu secara bersamaan juga digelar pameran seni rupa dari puluhan perupa Indonesia. Buku dokumentasi ini bukan tidak mungkin akan menjadi buku perjalanan sejarah aktivitas seni rupa nasional paling lengkap pertama yang pernah terbit.

Saat ini Melani dan sang suami Fanny Setiawan tinggal di sebuah rumah di Tanjung Duren yang berada tepat di sisi tol Kebon Jeruk, Tangerang. Melani dan keluarga tinggal di kawasan itu sejak 1977. Ketika masa awal tinggal, kawasan itu masih berupa rawa-rawa dan semak belukar dengan penghuninya burung, kodok dan ular. Jalan masuk juga belum ada. Oleh karena itu, keluarga Melani membangun jalan yang menghubungkan rumahnya dengan jalan raya. Pertengahan tahun 1980-an, suasana lingkungan rumah berubah total. Rumah itu sekarang hanya berjarak empat meter dari pagar tol Kebon Jeruk-Tangerang yang sibuk selama 24 jam.

Rumah kediamannya seperti galeri yang penuh dengan benda seni. Di halaman rumah terpajang patung semen dan patung batu serta potongan logam yang digantung di dahan-dahan pohon. Di ruang tengah, ada puluhan barang seni yang ditata hampir di setiap sudut. Ada patung Bali dari kayu, guci-guci kuno, keramik, tempat keris dan mebel-mebel kuno dari kayu jati. Barang-barang seni dapat kita lihat di ruang tamu, ruang makan, kamar, teras rumah, bahkan ruang menuju dapur.

### **Dunia Seni Rupa pada Arsip Personal dr. Melani**

Pada ulasannya yang menandai peluncuran buku dan sekaligus pembukaan pameran, Jim Supangkat, sebagai seorang kurator berusaha menganalisa infrastruktur dunia seni rupa melalui sebuah perspektif sejarah. Menurutnya segala arsip apapun, banyak terkait bagaimana



dokumen dapat menggulirkan teori-teori, menemukan hubungan antara kondisi yang berbeda serta menggarisbawahi momen-momen penting dalam sejarah. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa bagian utama buku ini adalah foto dalam jumlah besar pada arsip dr. Melani. Foto-foto tersebut bukan dokumentasi seni rupa yang lazim karena tidak menampilkan misalnya karya-karya seni, seluk beluk kehidupan perupa, suasana pameran, atau studio seniman. Foto-foto ini adalah foto dr. Melani, foto kenangan yang lazim dibuat untuk mengaktifkan memori di kemudian

hari. Oleh karena itu foto-foto ini terkategori arsip personal.

Foto-foto ini seperti meluaskan pengertian "dunia seni rupa", foto-foto itu tidak hanya menunjukkan perupa dan kritikus. Pada foto-foto tersebut dapat ditemukan publik seni rupa Indonesia. Kehadiran publik seni rupa ini penting untuk menunjukkan "dunia seni rupa" (*art world*) dalam pemikiran seni rupa sekarang ini. Dalam wacana dunia seni rupa yang sekarang lebih diyakini, percaturan nilai-nilai di dunia seni rupa, mempunyai tiga komponen yaitu seniman, institusi seni rupa



(kritikus, kurator, museum, sejarawan seni rupa) dan publik dunia seni rupa (*art world public*).

Dalam arsip dr. Melani, sebagian besar *art world* adalah kolektor. Mereka selayaknya disebut *art world public*. Dalam wacana *art world*, publik dunia seni rupa adalah mereka yang punya perhatian pada karya-karya para seniman dan mengikuti perkembangan seni rupa dengan tetap. Mereka tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum—sering disebut awam—yang tidak tertarik pada seni rupa, bahkan tidak peduli. Di Indonesia, hanya para kolektor yang memenuhi persyaratan ini. Merujuk definisi George Dickie publik seni rupa ini adalah publik yang punya perhatian khusus pada kegiatan seni rupa dan mengikuti secara khusus perkembangan karya-karya para seniman. Oleh karena itu arsip dr. Melani mencatat kemunculan publik seni rupa. Sebelumnya publik seni rupa ini dapat dikatakan tidak ada. Pada masa lalu, lingkaran ini sangat kecil.

Kajian arsip dr. Melani menunjukkan pada dekade 1980 terjadi perubahan, *artworld* muncul di Indonesia karena *art world public* dapat diidentifikasi. Kemunculan *art world* ini sama sekali bukan karena pengaruh *institutional theory*, tetapi muncul karena tumbuhnya *art market* pada pertengahan 1980 yang diakibatkan global *art forum*, dimana harga karya-karya seni rupa modern di balai-balai lelang; mula-mula ke angka puluhan juta dolar dan dalam waktu singkat menembus angka 100 juta dolar.

Perkembangan *art market* sesudah pertengahan 1980-an menampilkan perubahan pada perkembangan seni rupa di Indonesia. Dunia seni rupa menarik perhatian masyarakat. Bila dibandingkan kegiatan seni rupa pada 1970-an tidak populer di kalangan masyarakat, walau diberitakan media massa secara tetap. Sejak 1980



kegiatan seni rupa semakin lama semakin populer. Pada perkembangan sekarang ini, kegiatan seni rupa di-*cover* majalah-majalah *life-style*, dan para senimannya diekspose seperti mengekspose sosialita.

Pada perubahan ini kegiatan pameran diselenggarakan terutama di galeri-galeri swasta yang tumbuh seperti jamur di musim hujan pada awal 1990an. Sementara itu ruang-ruang publik, seperti misalnya di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki menurun pamornya. Ketika Galeri Nasional diresmikan pada tahun 2000, sebagian besar programnya

didasarkan kerja sama dengan galeri-galeri swasta, *policy* ini ditempuh karena minimnya dana pemerintah yang dianggarkan untuk menjalankan Galeri Nasional.

Memasuki dekade 2010, terlihat muncul upaya para pelaku *art market* untuk menampilkan karya-karya seni rupa Indonesia di forum global. Upaya ini kemudian memunculkan isu yang kemudian menjadi dominan di dunia seni rupa. Lahir semacam tekad bersama pada semua komponen *art world* di Indonesia untuk membawa seni rupa Indonesia ke forum global.

### **Skenario Kearsipan**

Sungguh menarik apa yang diuraikan Christine Cocca dalam esainya untuk mengantarkan diterbitkannya buku dr. Melani. Ia mengungkapkan bahwa ada dua isu kritis yang patut digaribawahi melalui buku dan pameran ini pemaknaan terhadap arsip dan teori sistem masyarakat modern sebagai alat membingkai untuk memahami praktik-praktik seni rupa saat ini, serta bagaimana ide-ide itu membentuk konsepsi kita terhadap seni rupa.

Dokumentasi dan observasi dibutuhkan guna membuat seni rupa terbaca, menciptakan otoritas mengenai apa itu seni rupa dan dunia seni, mengembangkan sebuah historiografi dalam konteks Indonesia yang menempatkan seni rupa dalam perangkat yang jelas, serta menjadikan fungsinya masuk akal dalam masyarakat modern. Faktanya, hal tersebut merupakan prasyarat menuju analisis dan wacana. Sebagai sebuah sistem, dunia seni Indonesia terbentuk atas banyak pemain yang terlibat dalam dialog yang kompleks untuk mengklaim dan pada banyak kasus untuk klaim kembali posisi yang berlandaskan pada biografi, identitas dan sejarah. Sebagai sebuah pameran yang menggunakan “impuls kearsipan” menjadi titik utama keberangkatan, kami menimbang bagaimana arsip dipelihara dan digunakan dalam sistem sosial ini. Dengan demikian redefinisi berkelanjutan dalam seni rupa Indonesia mengetengahkan premis terkait nilai-nilai bawaan dokumen kearsipan dan “atribut-atribut yang terbentuk antara publik dan privat, antara dokumentasi dan penafsiran, kritik dan analisis, kuasa dan subordinasi” yang berperan sebagai komponen utama praktik seni rupa Indonesia.

Para seniman yang terlibat dalam



pekerjaan yang digelutinya mempunyai keingintahuan serta penasaran terhadap arsip personal, kisah-kisah yang hadir, menyatakan dan menebus fakta-fakta terabaikan terhadap karya mereka. Melalui persentuhan dengan beragam materi yang didefinisikan setiap seniman sebagai “arsip personal”. Masa lalu kita yang tak pasti, serta masa depan tak terprediksi yang diciptakan oleh kontingensi membuat materi arsip menjadi sangat menarik bagi seniman sebagai sumber investigasi dan ekspresi artistik. Materi kearsipan mempertegas klaim terhadap ingatan dan oleh

karenanya merupakan “sebutuk representasi taksonomi, klasifikasi, dan anotasi pengetahuan yang dapat pula dipahami sebagai bentuk historis yang mewakili zamannya, sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu; yang di dalam alat-alat metodologis tidak dipersiapkan sebagai sebuah kondisi bagi validitas atas penilaian, melainkan sebuah kondisi realitas atas *statement*.”

Sifat alami otobiografis kebanyakan karya seni rupa yang ditampilkan mengindikasikan kebutuhan akan preservasi testimoni personal dalam arsip nasional. Seperti negara Kanada satu-satunya yang telah mengembangkan di tingkat nasional suatu pendekatan arsip total, dimana hampir semua lembaga arsip publik di negeri tersebut baik di tingkat nasional, provinsi, teritori, kotamadya, universitas dan regional sebagai bagian dari mandat mereka,

mengambil, dalam suatu lembaga arsip, suatu arsip total yang terdiri atas berbagai bagian yang kira-kira setara berupa rekaman-rekaman publik, pemerintah atau lembaga sponsor, serta rekaman-rekaman sektor swasta yang terkait, dan menyertakan ke dalam arsip mereka rekaman total dari setiap medium perekaman (termasuk film, televisi, lukisan dan rekaman suara) yang di negara lain terbagi di antara beberapa penyimpanan lain. Penggabungan antara yang publik dan yang swasta mencerminkan visi arsip yang lebih luas serta pengalaman kesejarahan manusia secara total, alih-alih terbatas pada pandangan sang pengarsip semata-mata sebagai penjaga rekaman resmi negara.

Menurut *Archives Society of Alberta*, "Catatan pengarsipan bersifat unik, salah satu jenis dokumen yang diciptakan oleh orang-orang atau organisasi ketika mereka melakukan aktivitas keseharian mereka dan dipreservasi bagi referensi berkelanjutan. Catatan-catatan ini termasuk korespondensi, notulensi rapat, berbagai kontrak, catatan keuangan, *diary*, fotografi, kaset video, *file* elektronik di komputer, *email* dan informasi dalam beragam variasi format. Bagaimanapun juga materi dokumenter membutuhkan legitimasi. Arsip mendapatkan kualitas kebenaran, fungsi pembuktian, serta kekuatan penafsiran-singkat kata, realitasnya-melalui serangkaian desain yang menyatukan struktur dan fungsi. Dalam rangka mentransfer arsip dari "album privat seorang amatir" menuju ranah publik melalui pengembangan buku berdasarkan riset yang baik dan terorganisir, upaya penerbitan *dr. Melani's Archives and the Indonesian Art World* bermaksud untuk memberikan struktur dan validitas informasi yang tercakup dalam koleksi. Konten dalam foto-foto dr. Melani



diterima sebagai arsip dikarenakan skala koleksi ini menggerakannya melampaui pandangan *anecdotal* dan parsial dari album pribadi dan karena kamera secara *harfiah* adalah sebuah mesin arsip, setiap foto, setiap film secara apriori adalah obyek kearsipan.

Apa yang telah dilakukan oleh dr. Melani melalui proyeknya patut diberikan apresiasi. Ia telah melakukan kompilasi dan publikasi koleksi foto sejak tahun 1977 yang mendokumentasikan ketertarikannya dalam bidang

seni rupa dan antusiasme terhadap komunitas seni rupa Indonesia. Arsip foto pribadinya kini telah berjumlah lebih dari 45.000 meliputi kisah menarik perkembangan seni rupa selama lebih dari tiga dekade. dr. Melani telah menawarkan pandangan esensial sebagai "titik keberangkatan" dalam rangka mempresentasikan dan mendiskusikan dua isu utama yakni peranan arsip di Indonesia dan seni rupa serta hal itu digunakan untuk melakukan klaim identitas dan sejarah; sejalan dengan sebuah cara pandang sistemik mengenai fungsi dunia seni dan bagaimana ia menciptakan makna. (Sumber arsip foto <http://www.drmelani-art-archive.com>)

**Adhie Gesit Pambudi :**

# SOEMARTINI DAN MEILINK-ROELOFS

**DUA PEREMPUAN PELETAK DASAR KERJA SAMA KEARSIPAN  
INDONESIA-BELANDA**



Dra. Soemartini



Prof. Marie Antoniette Petronella Roelofs

<http://www.kiti-journals.nl>

## **Dra. Soemartini**

Dra. Soemartini dilahirkan pada 17 Agustus 1930 di kota Yogyakarta yang saat itu merupakan kawasan Kesultanan Yogyakarta. Selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1950), Soemartini muda adalah seorang siswa sekolah menengah atas yang aktif terlibat di organisasi pemuda Indonesia. Ia juga tergabung dalam Brigade X sekaligus anggota pengurus organisasi ini untuk cabang

kota Yogyakarta. Pada tahun 1949, ia sempat ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Belanda yang menduduki kota Yogyakarta karena aktivitasnya di organisasi tersebut. Selain itu, Soemartini juga aktif di barisan kepanduan (sekarang Pramuka) hingga tahun 1960.

Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana bidang sejarah di Universitas Indonesia pada tahun 1961. Setelah itu ia menjadi pengajar di jurusannya

dan dipercaya menjadi Ketua Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1964. Pada tahun 1966, ia mengikuti kursus bidang kearsipan di *Rijksarchiefschool* (Sekolah Kearsipan Negara) di Den Haag, Belanda. Ia memperoleh sertifikat "*Diploma voor Wetenschappelijk Archiefambtenaar der Tweede Klasse*" atau Gelar untuk Pegawai Arsip Bidang Ilmiah Kelas Dua pada 2 Juli 1968.

Sekembali dari Belanda, ia terikat

secara formal dengan Arsip Nasional (Arnas) pada tahun 1969. Setahun setelahnya, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Arnas menggantikan Drs. Mohammad Ali (Kepala Arsip Nasional periode 1957-1970). Pada tahun 1971, ia resmi diangkat sebagai Kepala Arnas melalui Keputusan Presiden No. 95/M Tahun 1971. Dengan demikian, ia adalah wanita pertama yang memimpin Arsip Nasional. Pada masa kepemimpinannya pula ia berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang merupakan undang-undang bidang kearsipan yang pertama kali di Indonesia. Ia juga membawa Arnas ke babak baru pada tahun 1974 dengan perubahan nomenklatur menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan menjadikannya Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selama masa kepemimpinannya, Dra. Soemartini melakukan berbagai terobosan dengan membentuk berbagai unit kerja baru seperti unit arsip audio-visual dan unit wawancara sejarah lisan. Ia juga mengadakan layanan *microfilm*, mengembangkan berbagai program pelatihan arsip dinamis, dan memperkenalkan sistem pengelolaan arsip dinamis yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Ia juga berhasil memindahkan kantor ANRI dari Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat ke lokasi yang lebih baik untuk menyimpan arsip di lokasi ANRI sekarang (Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan).

Dra. Soemartini juga sangat aktif dalam mengembangkan ilmu kearsipan. Ia memprakarsai berdirinya program studi kearsipan di UI pada tahun 1982. Selain itu ia juga aktif terlibat dalam pendirian sebuah

program pascasarjana di bidang kearsipan di UI pada tahun 1992.

Kiprahnya di dunia kearsipan internasional dimulai ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kearsipan Internasional cabang Asia Tenggara atau *South East Asia Regional Branch of the International Council on Archives (SARBICA)* periode 1973-1975 dan 1984-1987. Ia bahkan sempat menjadi ketua SARBICA periode 1975-1978 dan 1987-1990. Ia juga menjadi anggota Dewan Eksekutif Dewan Kearsipan Internasional atau *the International Council on Archives (ICA)* periode 1978-1980. Setelah itu ia ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pengembangan Kearsipan atau *Commision on Archival Development (CAD)* dan Wakil Presiden ICA periode 1980-1984. Pasca jabatannya sebagai Wakil Presiden ICA, ia diangkat sebagai Anggota Kehormatan ICA.

Dra. Soemartini pensiun sebagai Kepala ANRI pada tahun 1990. Sejak itu, ia memfokuskan diri untuk mengembangkan program studi kearsipan di UI. Atas dedikasi dan pengabdianya, pemerintah RI menganugerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada tahun 1999. Pada tahun 2000, ia juga dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nanyang dari Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Ketika Soemartini meninggal dunia pada tahun 2005, dunia kearsipan Indonesia pun ikut berkabung. Ucapan duka cita mengalir dari kolega-kolega di ANRI dan seluruh dunia, termasuk Mona Lohanda yang menulis obituary dengan judul *In Memoriam: Soemartini (1930-2005)* yang dipublikasikan oleh ICA pada 2 Juni 2005.

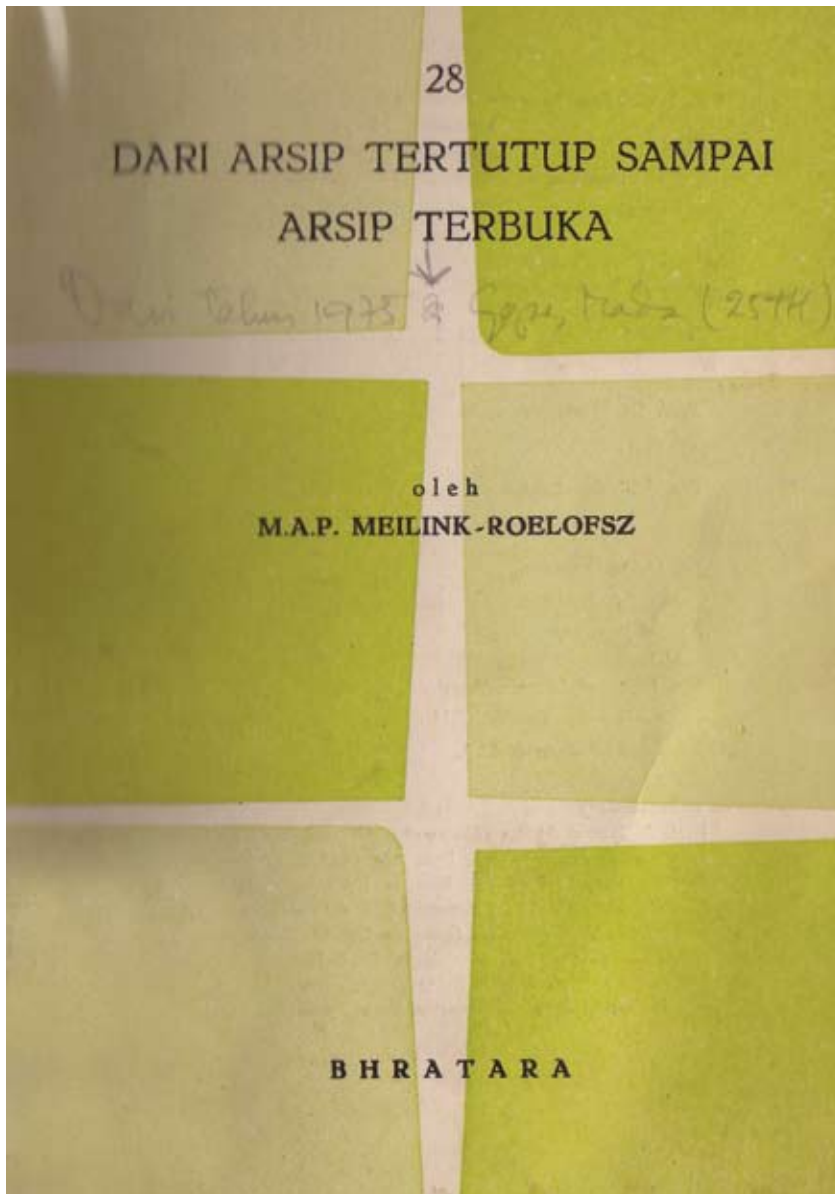
#### **M.A.P. Meilink-Roelofs**

Prof. Meilink-Roelofs lahir di Den Haag, Belanda pada 6 Desember 1905 dengan nama Marie Antoniette Petronella Roelofs. Ayahnya, Henry

Roelofs (1844-1920) pernah berdinastikan di bidang Militer dan ditugaskan di Hindia Belanda. Ayah tirinya, Dirk Karel Arnold van Loghem (1851-1940) adalah mantan pegawai pemerintah di Hindia Belanda dengan jabatan terakhir Residen Bengkulu. Bagi Marie, kedua figur tersebut memberikan pengaruh besar kepadanya terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia. Kisah pendidikan Marie diawali ketika ia masuk ke Sekolah Tinggi Khusus Perempuan di Beeklan, Den Haag. Setelah lulus, ia bekerja di Universitas Leiden sebagai auditor. Di Leiden, ia sering menghadiri perkuliahan yang diajarkan oleh Johan Huizinga, A.W. Bynvanck, dan J.H. Thiel.

Pada tahun 1930, Marie memulai kariernya di bidang kearsipan dengan bekerja di Arsip Nasional Belanda atau *Algemeene Rijksarchief (ARA)*. Di sinilah ia bertemu Dr. P.A. Meilink, seorang arsiparis yang merupakan mentor sekaligus suaminya di kemudian hari. Selama tujuh tahun berkarir, Marie melakukan berbagai hal yang sangat luar biasa sebagai arsiparis terutama dalam bidang genealogi. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai penelitian sejarah yang dilakukan oleh berbagai institusi resmi di Belanda dan luar negeri. Pada tahun 1937, Marie dipindahkan ke Bagian I ARA yang tidak hanya menangani arsip pemerintah Belanda, tetapi juga arsip Perserikatan Dagang Hindia Barat dan Timur. Dia memulai pekerjaannya dengan menata kembali arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*, khususnya arsip Kamar Zeeland. Pada tahun 1936-1937, Marie menjadi asisten Dr. F.R.J. Verhoeven, orang yang kemudian menjadi Kepala Arsip Hindia Belanda atau *Landsarchivaris*.

Pada tahun 1939, Marie menerima tugas baru di ARA. Setengah jam kerjanya dihabiskan untuk memberikan informasi kepada pengunjung dan



Buku "Dari Arsip Tertutup sampai Arsip Terbuka"  
ditulis oleh Prof. Marie Antoniette Petronella Roelofs

peneliti. Sisanya ia gunakan untuk mengolah arsip VOC. Selain itu Marie juga aktif menulis buku-buku yang terkait dengan sejarah. Meskipun dianggap sangat eropasentris dan deskriptif, karyanya yang berjudul *De vestiging der Nederlanders ter Kuste Malabar* mendapat banyak pujian dari akademisi di Belanda. Pada tahun 1946, Marie memperoleh sertifikat *Wetenschappelijk Archiefambtenaar der Eerste Klasse* atau Pegawai Arsip Bidang Ilmiah Kelas Satu. Ia bahkan memperoleh izin dari Kementerian

Pendidikan Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universiteit van Amsterdam (UvA) pada tahun 1947 di bawah bimbingan Prof. Jan Romein. Kesempatan ini diambilnya tanpa berpikir ulang, meskipun ia harus menjalankan studinya sekaligus bekerja sebagai arsiparis di ARA.

Pada tahun 1952, Marie menikah dengan Dr. Petrus Anne Meilink, seorang ahli arsip abad pertengahan yang bekerja di ARA. Keduanya telah bekerja di institusi yang sama selama lebih dari dua puluh tahun.

Kebersamaan diantara keduanya berlangsung singkat. Dr. Meilink meninggal dunia pada tahun 1957. Meskipun demikian, kehadiran Dr. Meilink dalam kehidupan Marie memberikan dampak yang sangat besar. Ia mengakui bahwa sang suami tidak hanya memberikan pengetahuan tentang dasar ilmu kearsipan, tetapi juga tentang perdagangan maritim di Asia. Pada tahun 1962, Marie menyelesaikan pendidikan doktrinya tanpa kehadiran sang suami yang sekaligus merupakan mentornya. Dua tahun kemudian, Marie diangkat sebagai *'Rijksarchivaris'* di Bagian I ARA. Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota komite di berbagai lembaga seperti KITLV (Lembaga Pemerintah Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia), Linschoten Vereniging, dan lain-lain. Dia bahkan menjadi anggota kehormatan dari KITLV bersama Charles Boxer.

#### **Pertemuan yang Melahirkan Dasar Kerja Sama Kearsipan Indonesia-Belanda**

Pada tahun 1964, Marie berkunjung ke berbagai negara di Asia diantaranya Hongkong, Jepang dan Indonesia. Kedatangannya di Hongkong adalah untuk menghadiri Seminar Internasional tentang Sejarah Asia. Setelah itu Marie berkunjung ke Jepang, dimana ia diterima oleh Iwao Seichi (Tokyo University). Iwao juga memfasilitasi pertemuannya dengan pihak pemerintah Jepang. Selain itu, Marie juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai institusi pendidikan dan bertatap muka dengan para mahasiswa.

Berbeda dengan kedua kunjungan sebelumnya, kedatangan Marie di Indonesia bertujuan untuk mengetahui arsip VOC yang disimpan di Arsip Nasional. Hal ini didorong oleh keinginan untuk membuat pusat katalog untuk semua arsip kolonial yang terdapat di Jakarta dan juga di

wilayah-wilayah seperti Den Haag (Belanda), Kolombo (Sri Lanka), Cape Town (Afrika Selatan), dan lain-lain. Pada awalnya usaha yang dilakukan Marie berjalan tidak begitu lancar, karena pada saat itu kebanyakan orang Indonesia menganggap bahwa orang Belanda merupakan penjajah. Ketika itu Arsip Nasional sedang mengerjakan sebuah proyek besar pembuatan *microfilm* untuk arsip *Dagregisters van Het Casteel van Batavia*. Namun demikian, kedatangannya ke Arsip Nasional di Jakarta bukan pula tanpa hasil. Dari sinilah ia mengenal Dra. Soemartini yang kala itu belum menjadi Kepala Arsip Nasional. Perkenalan yang hanya beberapa hari ini tergolong singkat, namun demikian pertemuan Marie dan Soemartini melahirkan dasar kerja sama kearsipan antara Indonesia dan Belanda. Keakraban di antara Marie dan Dra. Soemartini keduanya terus berlanjut. Keduanya bahkan menjadi sahabat seumur hidup (*a lifelong friend*).

### **Pengembangan Kerja Sama Kearsipan Belanda-Indonesia**

Pascapertemuan ini, Marie dan Soemartini terus mengembangkan kerja sama di Bidang Kearsipan antara Indonesia dan Belanda. Pandangan Marie tentang perlunya kerja sama antara Indonesia dan Belanda juga tertuang dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam bidang Sejarah Ekspansi Bangsa Eropa di Universitas Leiden pada 6 November 1970. Dalam pidato yang berjudul "*Van Geheim tot Openbaar. Een Historiografische Verkenning*" atau "*Dari Kerahasiaan sampai Keterbukaan: Suatu Pengintaian Historiografis*", Marie menekankan pada jurang yang terbentang antara negara-negara yang berkembang di dunia ketiga dan negara-negara Barat yang kaya dan maju perindustriannya. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan generasi muda di negara-

negara tersebut. Marie menegaskan bahwa semua kalangan tengah mencari penyelesaian untuk permasalahan yang sangat pokok ini. Di satu sisi, para sejarawan juga member sumbangsih tentang konsep-konsep seperti kolonisasi, dekolonisasi dan neo-kolonialisme.

Marie menyoroti bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka pada saat itu cenderung tertarik pada konsep nasionalisme dan pencarian jati diri bangsa. Di sisi lain, bangsa-bangsa Barat juga mulai melakukan penilaian kembali hal-hal yang terjadi pada masa penjajahan. Hal ini dilakukan terutama di level pendidikan tinggi seperti universitas-universitas di Belanda. Marie menegaskan bahwa perlu adanya penelusuran sumber-sumber sejarah tentang masa penjajahan bagi sejarawan dan calon ahli-ahli sejarah. Menurutnya, sumber-sumber inilah yang akan menjadi sumber-sumber utama dari mana setiap generasi akan mengambil kebenaran. Hal ini berlaku bagi bangsa Belanda dan bangsa-bangsa lain yang pernah berhubungan dengan negeri Belanda selama masa panjajahan seperti Indonesia.

Marie menggarisbawahi bahwa hubungan ketatanegaraan antara Belanda dan Indonesia di masa depan tidak hanya dipenuhi oleh jalannya peristiwa-peristiwa, namun juga perlu adanya kerja sama yang dianjurkan oleh kedua negara dalam menyelidiki sumber-sumber sejarah yang berguna bagi generasi yang akan datang. Di sini, ia menekankan bahwa kerjasama di bidang kearsipan antara Indonesia dan Belanda dalam rangka melestarikan sumber-sumber sejarah terutama arsip masa VOC dan pemerintahan Kolonial adalah hal yang sangat penting dan nantinya dapat mempererat hubungan di antara kedua negara.

Demikian halnya dengan Dra. Soemartini. Ia juga terus

mengembangkan kerja sama dengan pemerintah Belanda di Bidang Kearsipan. Ia merupakan anggota Komite untuk Studi Indonesia dalam kerangka Kerja sama Kebudayaan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1981-1990. Ia juga membuka jalan kerjasama antara ANRI dengan Arsip Nasional Belanda atau *Algemeene Rijksarchief* (sekarang Nationaal Archief) sejak 1974. Selain itu, ia juga membuka akses bagi para peneliti dari Belanda untuk melakukan penelitian sejarah di ANRI. Atas jasanya ini, Pemerintah Belanda memberikan penghargaan atau *Medal of Honour* kepada Dra. Soemartini pada tahun 1992.

Sampai saat ini kerja sama antara pemerintah RI dan Belanda dalam bidang kearsipan terus berlanjut. ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional di Indonesia bahkan tidak hanya menjalin kerja sama dengan Arsip Nasional Belanda (*Nationaal Archief*), tetapi juga menggandeng universitas-universitas di Belanda untuk mengadakan pendidikan jenjang Pascasarjana (S2) dan Kursus-kursus singkat di bidang kearsipan. ANRI juga bekerja sama dengan CORTS Foundation, sebuah organisasi non-pemerintah yang berasal dari Belanda dalam rangka program digitalisasi arsip VOC.

Susanti :

# SULASIKIN, “KARTINI” SEPANJANG MASA

.....Menaburkan benih semangatjuang wanita

*Entah sampai kapan berhenti merenda.....(Titiek S. Edardono, Retty Hari Respati, Aminah S, Ny. Arif Darmadi)*

**P**enggalan kalimat di atas sangat cocok untuk menggambarkan sosok Anindyati Sulasikin Murpratomo—Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia pada 1987-1993. Dalam usianya menjelang 86 tahun ia masih disibukkan dengan sekitar dua puluh empat organisasi yang digelutinya antara lain: Ketua Yayasan Amal Bhakti Ibu (YABI) dan salah seorang Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Anindyati Sulasikin Murpratomo, yang akrab dipanggil dengan nama “Kin” merupakan putri kedua dari pasangan R.Hardjodipoero dan R. Ngt. Iskiatin. Orangtuanya keturunan Bupati Pacitan ke-2 sebagai pejuang dan pengikut setia Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I) dalam perjuangan melawan Belanda.

“Kin” kecil pada masa anak-anak dan

remajanya sangat merasakan keindahan dan kesenangan dalam keluarganya yang harmonis. Sebagai keluarga Jawa, ia juga dibesarkan dengan nilai budaya dan tata cara Jawa. Sejak usia dini, ia dan saudara-saudaranya dididik untuk lebih baik memberi daripada menerima. Inilah nilai kehidupan yang diajarkan orang tua kepadanya

yang tidak dapat ia lupakan.

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Hollandsch Inlandsche School (HIS), ia melanjutkan ke Frobel Kweekschool sesuai dengan arahan sang ayah. Saat berusia 18 tahun, atas dorongan orang tuanya, ia menikah dengan R. Murpratomo dan dikaruniai tiga orang anak. Walaupun telah berkeluarga, tidak menyurutkan keinginan ibu dari tiga orang anak ini untuk



Anindyati Sulasikin Murpratomo



tetap berkarir. Perjalanan karir Kin, yang juga merupakan perjuangan untuk perempuan Indonesia dimulai dengan menjadi guru pada tahun 1945. Di sela-sela kesibukannya bekerja sebagai guru dan sebagai ibu dari Reni Swasti, Peni Susanti, dan Ibnu Pratomo, ia melanjutkan sekolah ke Taman Madya dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Belum selesai studinya di Fakultas Sastra UI, ia diterima bekerja di *Nederlandsche Handelsbank*. Baginya untuk dapat bekerja di sebuah bank asing membutuhkan perjuangan yang cukup keras karena pada saat itu sangat sulit untuk perempuan yang sudah berkeluarga dapat bekerja. Meskipun cukup sulit untuk dapat bekerja di sebuah bank asing, Kin rela melepaskan pekerjaan tersebut demi untuk memperoleh pengalaman baru. Ia pun pindah kerja di *United Nation of Children's Fund* (UNICEF). Perjalanan kariernya di UNICEF menjadi faktor penting yang membawanya menuju puncak kariernya di lingkungan pemerintah RI.

Posisi awal yang ditempati putri dari R. Hardjodipero di UNICEF adalah sebagai petugas statistik, kemudian dalam perjalanan karirnya ia dipercaya untuk menjadi seorang *programme officer* bidang pembangunan masyarakat desa, sosial pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Selama bekerja di UNICEF ini, Kin yang dikenal juga sebagai *trouble shooter* karena keahliannya dalam memecahkan berbagai masalah, tidak segan-segan "turun ke lapangan" ke daerah-daerah terpencil baik dalam negeri maupun mancanegara. Keprihatinannya terhadap kondisi perempuan di Indonesia pada khususnya dan perempuan di Asia pada umumnya, mendorongnya untuk mendirikan sebuah organisasi *Asean Confederation on Women's Organizations* (ACWO) bersama



Anindyati Sulasikin Murpratomo mengucapkan sumpah pada saat dilantik menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (UPW) pada 20 November 1987



Anindyati Sulasikin Murpratomo pada saat memenuhi undangan Ketua Persatuan Perempuan RRC Madame Chen Mu-Hua sewaktu berkunjung ke RRC, September 1991

dengan pimpinan *National Council of Women* negara-negara anggota ASEAN. Dalam ACWO, ia terpilih sebagai presiden pertama untuk periode 1981-1983. Atas dedikasinya di UNICEF, istri dari R. Murpratomo ini memperoleh penghargaan UNICEF *25 years dedicated services for the world children*.

Selain itu sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya bagi pembangunan dan anak-anak di tingkat ASEAN pada umumnya dan

di Indonesia pada khususnya, ia juga memperoleh *ACWO-ASEAN women's day award* yang diberikan langsung oleh Presiden Singapura, S.R. Nathan. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama ACWO yang diberikan kepada salah seorang

perempuan Indonesia.

Selama aktif bekerja di UNICEF, ia juga aktif di berbagai organisasi perempuan seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Setelah 25 tahun berdedikasi di UNICEF, ia mengundurkan diri karena memperoleh tanggung jawab baru sebagai anggota DPR RI untuk masa bakti 1982-1987. Pengalamannya dalam pembangunan perempuan membawa ia pada posisi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Kabinet Pembangunan IV dan V ketika ia berusia usia 60 tahun. Kebijakan strategis yang dibuatnya pada saat itu adalah masalah Jender

dan Pembangunan (JDP) dan Mekanisme Peningkatan Peranan Wanita (P2W). Kebijakan tersebut diyakininya mampu memberikan arah dan strategi operasional yang lebih efektif dalam upaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia juga mengembangkan Pusat Studi Wanita (PSW) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat di berbagai provinsi di Indonesia.

Ketika menjadi Menteri UPW, ia sering “turun langsung ke lapangan” guna mengetahui perkembangan perempuan Indonesia di berbagai daerah di tanah air secara langsung. Hal ini dilakukan sama halnya ketika ia bekerja di UNICEF. Sebagai upaya untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan di Indonesia, salah satu tindakan yang diambilnya adalah melakukan kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan menjadikan para wakil gubernur sebagai partner kerjanya. Para wakil gubernur diangkat menjadi ketua tim pengelola peningkatan peranan wanita di tingkat provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten partner kerjanya adalah Sekwilda. Pemilihan wakil gubernur sebagai partner kerjanya dilakukan mengingat posisi strategis seorang wakil gubernur dalam memantau dan membantu gubernur untuk mengatur aparatur di tingkat provinsi. Keahliannya dalam melakukan *lobbying* membuat Departemen UPW saat itu memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan mendapat penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Departemen UPW. Atas jasanya dalam pembangunan perempuan di Indonesia, ia memperoleh penghargaan Bintang Maha Putera Adiprana dari Presiden Soeharto pada 1992.

Sebelum jabatannya sebagai Menteri UPW berakhir, bersama



Anindyati Sulasikin Murpratomo pada saat terpilih sebagai President of Asean Confederation of Woman's Organisation (ACWO) yang pertama di Jakarta (1981)



Anindyati Sulasikin Murpratomo selalu mendorong pembangunan Pusat Studi Wanita di seluruh Indonesia. Di sini terlihat bersama Rektor dan Civitas Akademika Universitas Hasanudin

sembilan orang temannya, mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dalam pembangunan perempuan, anak dan remaja. Selain itu, YABI dalam perkembangannya mengarahkan program untuk menanamkan karakter bangsa pada anak-anak usia dini. Hal

ini dilakukan karena kekhawatirannya melihat krisis multidimensi di Indonesia pada 1998. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri UPW, Ibu yang selalu tampak berkecaya ini tetap eksis di bidang pemerintahan dengan menjadi anggota DPA mulai 1993 sampai 1998. Karier di Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berhasil membawanya pada kursi wakil ketua DPA periode 1999-2003. Hal ini menjadi prestasi tersendiri karena ia menjadi satu-satunya perempuan dalam jajaran pimpinan DPA.

Dalam usia senjanya, Ibu yang pernah memperoleh ACWO *Presidential Award* ini tetap mengabdikan dirinya untuk kemajuan perempuan Indonesia dengan aktif di berbagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tepat kiranya jika ia dijuluki sebagai Kartini sepanjang masa karena perjuangannya bagi pembangunan perempuan sejak usia muda hingga usia senjanya kini. Semoga perjuangannya ini dapat menjadi contoh bagi perempuan lain di Indonesia demi kemajuan kaum dan bangsanya.

(sumber arsip foto: koleksi pribadi A. sulasikin)

**Sari Wulandari :**

# NAMAKU ZAHIRA ASYIFA

“Za... Zahira... udah yuk pulang, nanti kamu sakit kalau terus-terusan di sini.” Bisik sahabatku Aira sembari menghapus air mata yang tak kian henti menderas di pipiku mengalahi rintik malam ini. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Kini hanya Aira, sahabatku yang setia yang tersisa di sampingku. Beberapa orang yang ikut mengiringi ke pemakaman sudah dua jam lalu kembali ke rumah masing-masing. Kami berdua pulang berjalan kaki. Sepanjang jalan aku tak berkata apapun, hanya terbayang wajah Ibu yang selalu senyum kepadaku. Ketika sakit pun, hanya senyum yang menghias wajahnya dan ia bilang ia tak perlu obat, cukup aku penyembuhnya sebab nama belakangku Asyifa yang artinya penyembuh baginya.

Malam kian larut dan aku tak jua terlelap. Aku hanya bisa menatap nanar undangan dari sekolah yang menyatakan aku berhak masuk ke universitas negeri mana saja sesuai pilihanku tanpa biaya, juga undangan khusus dari Dinas Dikmenti (Pendidikan

Menengah dan Tinggi) untuk mengikuti program beasiswa. Untuk kesekian kalinya aku telah membuat ibu bangga, namun kali ini kebanggaan itu tak nampak di wajahnya yang tirus karena penyakitnya lebih dulu merenggut nyawa ibu. Aku semakin tak bisa tidur, ku coba membuat secangkir teh hangat kesukaannya kalau ibu sedang suntuk. Tak ada lagi lain, hanya teh hangat sebagai penenang. Pernah sekali waktu ibu pulang dari bekerja terlihat penuh amarah di wajahnya, ibu tak cerita, hanya mengaduk-aduk secangkir teh hangat sambil sesekali ia sesap. Baru keesokan harinya, ibu bilang kalau beliau bertemu ayahku di suatu tempat. Saat itu aku hanya tertegun, tak berani berkomentar, karena aku tahu sosok lelaki itu begitu menyakitkan untuknya.

---

Namaku Zahira Asyifa... Dan inilah kisahku

Tak banyak yang aku mengerti soal ayah, hanya beberapa gelintir cerita tentangnya. Tahun 1993, ibuku menikah dengan seseorang yang akhirnya aku tahu bernama Pram, Pramudya Setya. Yang pada akhirnya aku pun juga tahu, bahwa ia tak setia namanya. Juga pada akhirnya aku tahu bahwa ia nyatanya adalah ayahku, ayah kandungku. Pada KTP-nya, tertulis ‘Pramudya Setya - belum menikah’ kala itu, kala ibuku pertama kali bertemu dengannya. Ibuku bekerja di salah satu hotel ternama di Jakarta, di bagian reservasi. Ibu merantau jauh dari tempat asalnya karena ingin mandiri sebagai seorang perempuan. Sementara Pram terlihat begitu sempurna di mata ibu. Ibu terhanyut setiap ucapan Pram, senyum Pram, dan segala tentang Pram. Sejak itu dan beberapa kali bertemu setelahnya ibuku jatuh cinta kepada Pram,



tak bisa jauh darinya.

Akhir 1993 Pram menikahi ibunya, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk saling memahami satu sama lain. Entah apa yang ada di benak ibu, saat Pram meminta untuk menikah siri saja tanpa di catan sipil dengan alasan Pram ada ikatan dinas. Ibu menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Hari-hari yang ibu lalu begitu bahagia, sampai pada masa kehamilannya. Pram, yang terkadang enggan aku menyebutnya dengan sebutan ayah, sempat beberapa bulan tak tampak menemui ibu dengan berbagai macam alasan yang akhirnya, membuat ibu luluh juga. Hingga tepat pada hari kelahiranku Pram tak muncul barang sekejap pun. Hari-hari Ibu mulai kelabu.

Belakangan diketahui bahwa Pram ternyata telah memiliki seorang istri dan seorang putra di Bandung. Ibu tahu setelah ibu mengikuti dan menyelidiki Pram sampai ke Bandung. Hati ibu hancur, tak ada pertanggungjawaban apapun sebagai seorang suami bahkan sepatah kata maaf pun tak ada dari lelaki yang bernama Pram. Sekuat tenaga ibu mencoba bertahan dari para gunjingan tetangga yang memekakkan telinga sampai saat ini, saat aku sudah beranjak remaja.

---

Hari Sabtu, entah itu tanggal berapa, di penghujung sore tiba-tiba seorang lelaki paruh baya mendatangi rumahku. Sejenak aku melihatnya dari balik jendela. Lelaki itu beruban, kurus kering seakan tidak ada yang merawatnya. Dari perawakannya aku bisa menilai dia dulunya, mudanya, tinggi besar dan gagah. Wajahnya tirus dan bola matanya hampir-hampir keluar. Dia nampak gelisah dan kebingungan.

"Ibu Putri ada?"

"Maaf, Bapak siapa?"

"Saya Pram."

Mendengar nama itu berkecamuk semua emosi. Aku tak tahu harus berbuat apa. Marahkah, senangkah melihat wajah yang harusnya sejak dahulu menggendongku saat bayi kembali ke rumah ini? Aku memilih untuk bersikap dingin.

"Kau siapa? Kau memiliki mata...." Dia melihatku dengan... entah, aku tidak tahu dan tidak mau menebak isi dalam otak busuknya itu

"Kau anakku? Kau putriku!" laki-laki itu meneruskan kata-katanya sambil mencoba memelukku. Aku menampisnya lalu mendorongnya. Mudah saja bagi aku untuk menjatuhkannya. Ingin aku berteriak, namun suasana sedang sepi. Libur panjang, mungkin tetangga sedang pergi berlibur tapi toh apa pedulinya mereka dengan kami? Tak ada satu pun anak-anak dari mereka yang diperbolehkan bermain denganku. Ibu-ibu kompleks selalu menggunjingkan ibukudengan sebutan yang... oh Tuhan tak sampai hati aku menceritakannya di sini. Semua karena Pram! Laki-laki di hadapan aku kini. Mereka tentu akan berpikir buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Berapa kali aku meminta ibu untuk pindah rumah, namun ibu selalu menolak. Ibu pastinya malu jika kembali ke rumah nenek, oleh sebab itu hubungan kami dengan keluarga besar ibu terputus sejak itu.

"Kau tega melakukan ini kepada ayahmu sendiri?" dia meratap dan mengiba sembari masih tersungkur di tanah.

Andai aku terlahir sebagai laki-laki, mungkin aku sudah ambil pisau dan menusuknya berulang-ulang atau aku sembelih sekalian lehernya. Tapi aku terlahir sebagai perempuan. Aku tidak bisa melakukan itu semua. Aku memilih untuk masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu dan membiarkan dia sampai bosan terus pergi atau membusuk sekalian di luar sana.

"Baik... baik...!" teriaknya. Dan seperti sudah aku perkirakan sebelumnya. Tidak ada tetangga yang keluar atau memperhatikan. Semua tetap menjadi sunyi.

"Aku rasa ibumu sudah cerita semua." dia mengiba. Aku rasa dia hanya ingin mencuri perhatianku saja.

"Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi, setidaknya beri aku sedikit bekal. Aku lapar, sudah berhari-hari aku belum makan."

Aku mengintipnya. Aku rasa dia tidak berbohong kali ini. Lebih baik cepat aku beri dia makanan agar dia cepat pergi dari hadapanku. Aku ke dapur, mencari makanan yang ada lalu membungkusnya.

Aku membuka sedikit pintu lalu melempar bungkus makanan tadi. Saat dia hendak mengambil makanan, ada suara dering ponsel. Dia terlihat kikuk. Lalu dia mengambil ponsel di balik jaket lusuhnya. I-phone, aku bisa tahu dari logo 'Apple'-nya, lalu dia bicara tentang proyek milyaran.

Sial. Seperti inilah Ayahku? Terlalu banyak kebohongan. Bergegas aku kembali mengunci pintu. Yah! Aku akui dia berhasil mencuri sedikit perhatianku. Tadinya aku berpikir aku bisa mendengar banyak informasi darinya meski aku tidak berharap semua hal di masa lalu seperti sim salabim kami menjadi keluarga yang normal, setidaknya jika dia mau mengakui, ibu bisa meluruskan pernikahannya lalu memiliki surat nikah resmi secara hukum. Rupanya aku berharap terlalu banyak. Hingga menjelang isya' sebuah mobil menjemputnya lalu dia pergi begitu saja tanpa pamit. Sama seperti dia meninggalkan ibu tanpa sepatah kata.

Itulah pertemuan pertama dan terakhir dengan ayahku.

Apa yang aku alami tak pernah aku ceritakan ke ibu. Cukup aku simpan sendiri, agar ibu tak bertambah

gelisah, dan yang membuat ibu sangat-sangat gelisah adalah sejak ia tak bisa membuatkan akta kelahiranku. Ibu sempat bingung bagaimana mengurus akta kelahiranku, karena ibu tak punya buku nikah atau bukti apapun yang menyatakan bahwa ibu telah menikah sah dengan seorang lelaki bernama Pram. Ibu baru sadar akan hal ini ketika ibu akan menyekolahkan aku ke Sekolah Dasar di sekitar rumah. Aku lupa-lupa ingat, karena aku masih begitu kecil saat itu. Hanya setahuku, tak ada akta kelahiran tak bisa masuk sekolah. Rumitnya segala peraturan dalam pembuatan akta kelahiran seorang anak membuat ibu semakin hari semakin stress. Apa jadinya jika anaknya nanti sampai dewasa tidak memiliki akta kelahiran, pasti sulit sekali untuk mengurus segala keperluannya kelak.

Sudah berbagai macam informasi yang ibu dapatkan masih simpang siur mengenai kepengurusan akta kelahiranku, sampai akhirnya ibu memutuskan untuk tetap membuatkan aku akta bagaimanapun caranya. Ada beberapa jalan yang bisa ibu tempuh, pertama melalui pengadilan yang sebelumnya ibu harus mencari orang tua yang mau mengadopsi aku dan mengakuinya sebagai anak, dengan cara inipun memaksa ibu harus menikah lagi atau setidaknya mengiba kepada sepasang suami istri lengkap agar bersedia mengadopsiku. Baginya itu tidak mungkin. Kedua, membawa permasalahan ini ke para aktivis perempuan. Atau yang terakhir tetap dengan jalur prosedur namun tertera di akta kelahiranku sebagai 'anak di luar nikah' dari nama ibu. Pilihan terakhir cukup menyayat hati ibu, karena tidak terbayang olehnya bagaimana aku melihat akta kelahiranku sendiri kelak dengan tulisan 'anak di luar nikah'. Tapi hanya dengan jalur itu aku bisa mendapatkan akta kelahiranku, agar aku bisa bersekolah, bisa masuk dalam kartu keluarga, dan yang pasti

aku resmi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan hak-hak kewarganegaraanku dapat terpenuhi.

Aku tak habis berpikir bagaimana Pram bisa memalsukan identitasnya di KTP. Di sana tertera jelas bahwa ketika itu ia masih *single*, lalu bagaimana bisa ia sudah memiliki keluarga? Dari pengalaman ini, aku mulai belajar banyak, aku cari banyak referensi mengenai hal ini. Ternyata anak yang lahir di luar nikah telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam perundangan yang berlaku anak lahir di luar nikah disebut "anak ibu". kemudian akta kelahirannya bisa diterbitkan dengan syarat Kartu Keluarga diterbitkan terlebih dahulu dengan mencantumkan status perkawinan ibu (orang tua anak) belum kawin. Pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan pasal 25 ayat (2) dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan (sebagai anak ibu).

Berdasarkan hal tersebut, setiap anak yang lahir akan diterbitkan akte kelahirannya. Anak yang lahir sebelum 60 hari harus dilaporkan ke Pencatatan Sipil supaya diterbitkan akte kelahirannya. Baik lahir di luar nikah atau yang lahir dari perkawinan resmi. Namun tetap saja, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah, bukti kenal lahir dari bidan atau dukun kampung yang disertai surat dari pemerintah setempat yang selanjutnya masyarakat bisa mendaftarkan permohonannya ke bagian perdata Pengadilan Negeri setempat.

Walaupun telat dan dengan berbagai bantuan dan pengorbanan

tenaga, akhirnya Ibu mendapatkan juga akta kelahiranku, meskipun dengan embel-embel 'anak di luar nikah - sebagai anak Ibu'. Ini cukup menyakiti hatinya. Namun apa mau dikata, ini sudah jalannya, banyak hikmah yang bisa aku petik bahkan sampai hari ini, hari dimana terakhir kalinya aku bisa menatap dan menciumi wajah ibuku.

Setelah beberapa hal aku pahami, ternyata segalanya bersumber dari dokumen. Ibu tidak bisa membuktikan bahwa beliau telah menikah secara sah, karena tidak ada dokumen yang lahir dari sana, berupa akta nikah. Sekeras apapun ibu berjuang pada tahun kelahiranku atau bahkan saat ibu sadar aku harus masuk Sekolah Dasar, tetap sulit bagi ibu untuk bisa mendapatkan akta kelahiranku. Sebegitu pentingnya arsip bagi diri seorang manusia, bahkan berujung kepada hak keperdataanku sebagai seorang anak.

Aku telah merasakan bagaimana ibu hebat berjuang demi aku hingga sekarang. Ini membuatku berpikir sejenak, mungkin akan lebih baik jika aku memilih jurusan arsiparis di Universitas Negeri sesuai undangan yang aku terima dari sekolah atau tawaran program beasiswa dari Dikmenti. Ya, ada baiknya aku belajar banyak lagi mengenai arsip, setidaknya agar aku lebih *aware* terhadap diriku sendiri. Memang akta nikah dan akta kelahiranku terlihat begitu sepele, tapi nyatanya dampak yang dihasilkan begitu menguras batin dan tenaga. Aku mencintai ibuku, ingin setegar ibuku, namun aku juga tak akan membuat kesalahan yang sama. Aku ingin membuat ibuku bangga dengan jalan yang aku pilih saat ini.

"Selamat malam Ibu, semoga Engkau dimudahkan jalan menuju kedamaian..."

# DWP ANRI, SATU SARANA PENYEBARAN INFORMASI DAN AJANG SILATURAHMI

*Wanita Indonesia sebagai Ibu Bangsa....*

*Insan Pembangunan Mitra Seajar Pria....*

Penggalan kata-kata tersebut mengingatkan kita akan seremoni peringatan Hari Ibu ketika digaungkannya alunan hymne Ibu yang dibawakan oleh kaum perempuan, mitra seajar pria dalam pembangunan bangsa. Menjadi sebuah keharusan bagi kaum perempuan khususnya para istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk turut serta menyukseskan tujuan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta berkeeseimbangan antara material dan spiritual.

Sebuah keharusan yang dapat terpenuhi jika para istri PNS mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan. Sejalan dengan tuntutan dan perubahan kehidupan tersebut, terdapat sebuah wadah yang terorganisasi yakni Dharma Wanita Persatuan (DWP), sebuah organisasi netral secara politis, demokratis, dan mandiri dalam menentukan visi, misi, dan kebijaksanaan organisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan anggota serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

DWP merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri PNS dengan



Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan ANRI, Anna Imelda Asichin

berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Organisasi DWP ini terdiri dari, DWP Pusat, DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/Kota, DWP Kecamatan dan DWP Kelurahan/Desa.

Demikian pula halnya dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas negara di bidang kearsipan, juga terdapat eksistensi DWP yang masuk pada kategori DWP instansi pemerintah pusat. Sejak tahun 2010, DWP ANRI dipimpin oleh seorang Ketua Umum, Anna Imelda Asichin dibantu oleh Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara dan tiga seksi yang terdiri dari Seksi Pendidikan, Seksi Sosial-Budaya dan Seksi Ekonomi.

Ditemui di sela-sela kesibukannya oleh tim redaksi majalah ARSIP, sosok perempuan kelahiran Jakarta, 20 November 1979 ini mengemukakan bahwa DWP ANRI turut mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa, melalui kaum perempuan, para istri PNS di lingkungan ANRI ini memiliki program kerja yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota. Melalui kerja sama yang terjalin di antara anggota DWP, maka tujuan program tersebut akan terlaksana dengan baik didukung dengan partisipasi bersama antara penasihat, pengurus, anggota DWP ANRI serta instansi ANRI. Hal tersebut menunjukkan peran aktif anggota yang semakin jelas, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai ibu serta sebagai warga negara. Selain itu, tak jarang di antara para anggota DWP ini bahu-membahu untuk membantu anggota yang terbentur kesulitan. "Terlepas dari hal tersebut dapat menjadi sarana refreshing pula bagi kami aktif dalam kegiatan DWP di ANRI." tambah Anna Imelda.

Selain itu, DWP ANRI pun dapat menjadi salah satu wadah penyebaran informasi di kalangan istri pegawai. Nantinya informasi bermanfaat yang diperoleh akan pula tersiarkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. "Pemahaman sederhana tentang kearsipan bagi keluarga, misalnya. Para anggota dapat memperoleh banyak informasi tentang cara

mengelola arsip secara sederhana di lingkungan keluarga. Apalagi ditambah beberapa di antara anggota DWP juga merupakan pegawai ANRI, pengetahuan para anggota akan bertambah dan kami dapat “menularkan” pula informasi tersebut kepada lingkungan sekitar kami,” jelas sosok Ibu lulusan Sarjana Hukum ini. Banyak pula informasi bermanfaat lainnya yang diperoleh anggota DWP, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tidak menutup kemungkinan bagi anggota DWP yang memiliki bakat bidang seni dan budaya dapat menyalurkannya melalui program kerja Seksi Sosial-Budaya. Dalam bidang kegiatan sosial, DWP ANRI bekerja sama dengan DWP Paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) memberikan sumbangan ke yayasan panti asuhan. Dalam bidang budaya, seni teater, vokal, dan pembacaan puisi pernah dilakukan para anggota DWP ANRI dengan mempersembahkan sebuah teater yang menceritakan pentingnya pengelolaan arsip yang baik di lingkungan keluarga pada peringatan Hari Ibu ke-83 tahun lalu.

Peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan anggota dapat tersalurkan pada program kerja Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi. Ketua Umum DWP ANRI menjelaskan bahwa saat ini melalui Seksi Pendidikan, kami dapat memberikan beasiswa Supersemar yang koordinasinya bekerja sama dengan DWP Paguyuban Kementerian PAN dan RB. “Tak hanya itu, kegiatan simpan pinjam bagi pegawai ANRI dengan proses dan jangka waktu yang tidak terlalu lama pun saat ini telah dilaksanakan oleh Seksi Ekonomi DWP ANRI,” ungkap istri pimpinan ANRI ini.

Sebagai bagian dari additional public ANRI, DWP ANRI pun turut serta berperan aktif dalam kegiatan



Pembukaan bazar dalam rangka memperingati Hari Ibu yang diselenggarakan oleh DWP ANRI

DWP Paguyuban Kementerian PAN dan RB (yang beranggotakan DWP Kementerian PAN dan RB, DWP ANRI, DWP Badan Kepegawaian Negara, DWP Lembaga Administrasi Negara, dan DWP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta DWP Pusat. Peran aktif tersebut dapat pula membantu meningkatkan eksistensi ANRI di lingkungan eksternal, khususnya instansi pemerintah.

Pada tahun 2012, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-13 DWP ANRI dan memperingati Hari Ibu ke-84, DWP ANRI bersama DWP Paguyuban Kementerian PAN dan RB melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang bertempat di Gedung Makarti Bhakti Nagari, LAN, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri Ibu Hj. Mutia Azwar Abubakar dan Ibu Ceffi Jenivita Eko Prasajo pada 18 Desember 2012, dilaksanakan berbagai perlombaan seperti menyanyi dan merangkai bunga. “Pada kesempatan ini, DWP ANRI meraih juara harapan I dalam lomba merangkai bunga,” jelas Ketua Umum DWP ANRI.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-84, DWP ANRI yang tergabung dengan DWP Pusat yang merupakan salah satu organisasi yang memprakarsai penyelenggaraan Kongres Nasional Perempuan Indonesia Abad ke-21. Kegiatan ini dilaksanakan bersama tokoh perempuan Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menjadi suatu hal yang dapat diakui bahwa melalui kegiatan, solidaritas dan eksistensi DWP yang sejalan dengan visi dan misi lembaga tak menutup kemungkinan dapat menjadi sebuah kontribusi bagi lembaga dalam memberdayakan peranan perempuan dalam rangka pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan bangsa.

# SEMINAR PUSAT STUDI KEARSIPAN (CENTER OF EXCELLENCE)



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Asichin saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Seminar Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*)

**JAKARTA, ARSIP** - Bertempat di Hotel Ambhara pada Selasa (18/9), Direktorat Pemanfaatan Arsip ANRI menyelenggarakan Seminar Cetak Biru Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) yang diikuti oleh para peneliti dari berbagai universitas di Indonesia dan sejumlah pegawai ANRI. Acara ini dibuka oleh Kepala ANRI, M. Asichin pada pukul 13.00 WIB. Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Bambang Purwanto (UGM), Dr. Mohammad Iskandar (UI), Prof. Dr. Masashi Hirose (Universitas Rikkyo) dan Esther Zwinkels, MA. (Universitas Leiden). Acara ini dilaksanakan dalam rangka pendirian Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) ANRI yang direncanakan bertempat di Gedung Arsip Nasional Gajah Mada.

Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) merupakan sarana bagi para peneliti dan praktisi di dunia kearsipan, khususnya arsip periode VOC. Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Bambang Purwanto menyoro



Foto Bersama Pembicara dan Moderator dalam acara Seminar Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*)

tentang bagaimana cara untuk menyajikan abad 17 dan 18 ke masa kini. Sementara itu pada sesi ke II, Dr. Mohammad Iskandar menyikapi tentang penggunaan istilah masa kejayaan Nusantara yang dibandingkan dengan masa kejayaan VOC di Indonesia. Pada sesi ke III, Prof. Dr. Masashi Hirose mempresentasikan penelitian yang sedang dilakukannya di Indonesia sebagai contoh penggunaan khazanah ANRI sebagai sumber penelitian sejarah dan informasi. Di sesi terakhir, Esther menyoro



Suasana acara Seminar Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*)

aspek-aspek penting yang harus menjadi prioritas dalam pendirian Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*) seperti komunikasi, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kinerja. Acara ini ditutup oleh Direktur Pemanfaatan Arsip, Asep Mukhtar Mawardi yang juga selaku ketua panitia penyelenggara Seminar Cetak Biru Pusat Studi Kearsipan (*Center of Excellence*). (AGP)



# BANGUN KERJA SAMA KEARSIPAN DAN SEJARAH, DUTA BESAR KERAJAAN BELANDA KUNJUNGI ANRI



Foto Bersama Kepala ANRI dan Duta Besar Belanda

**JAKARTA, ARSIP** - Selasa (25/9), Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Tjeerd Feico de Zwaan didampingi Ton van Zeeland, Atase Pers dan Kebudayaan berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jl. Ampera no. 7, Jakarta Selatan. Kedatangannya disambut oleh Kepala ANRI, M. Asichin yang didampingi pejabat Eselon I dan II di lingkungan ANRI serta Henk Niemeijer dari Corts Foundation. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Belanda khususnya dalam bidang kearsipan dan sejarah kedua negara.

Dalam pertemuan De Zwaan dan M. Asichin membicarakan berbagai hal yang antara lain kelanjutan penyusunan *research guide* untuk arsip yang berada di luar ANRI, penyelenggaraan penelitian dan penelusuran arsip tentang perkeretaapian, dan kerja sama pendidikan kearsipan antara ANRI dengan universitas-universitas di Belanda seperti Universiteit van



Kepala ANRI memandu Duta Besar Belanda saat Berkunjung ke Diorama ANRI

Amsterdam (Uva) dan Universtiet Utrecht. Dalam kesempatan ini, De Zwaan juga menanyakan tentang arsip film koleksi ANRI terutama yang berkaitan dengan kerajaan Belanda. De Zwaan dan M. Asichin menyepakati untuk saling mendukung dalam melestarikan arsip bersejarah, terutama arsip yang terkait dengan sejarah Indonesia dan Belanda.

Dalam kesempatan ini, De Zwaan juga mengunjungi ruang layanan arsip di mana para peneliti dapat mengakses khazanah arsip yang ada di ANRI. De

Zwaan yang didampingi pimpinan ANRI dipandu untuk mengakses inventaris arsip yang telah menggunakan sistem digital dan menilik khazanah arsip kertas peninggalan VOC dan arsip kartografi. Kepala ANRI, M. Asichin juga mengajak sang Duta Besar untuk mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang bertempat di ANRI. Di museum yang terdiri dari delapan hall ini, De Zwaan menyaksikan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa kejayaan nusantara, masa pergerakan, masa kemerdekaan, hingga masa reformasi yang ditampilkan dalam bentuk visual yang menarik. Diorama ini dibuka gratis untuk umum setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 - 15.00 dan Sabtu sampai Minggu pada pukul 09.00 - 13.00. (AGP)

# TINGKATKAN MUTU PRESERVASI ARSIP STATIS, INSTALASI LAB ANRI EKSPOSE 4 HASIL PENGUJIAN ARSIP DAN BAHAN KEARSIPAN



Kepala ANRI, M. Asichin saat memberi sambutan pada acara ekspose hasil pengujian arsip dan bahan kearsipan

**JAKARTA, ARSIP** - Suasana diskusi hangat menyelimuti atmosfer acara Ekspose Pengujian Arsip dan Bahan Kearsipan di Ruang Serba Guna Soemartini, Lantai 2, Gedung A, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 25 September 2012. Ekspose yang diprakarsai oleh Subdit Instalasi Laboratorium ANRI ini dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, M. Asichin dan dihadiri 100 orang peserta yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional arsiparis, fungsional peneliti dan fungsional umum terkait di lingkungan ANRI. Empat hasil

pengujian yang dilakukan Subdit Instalasi Laboratorium diekspose kepada peserta, dipadukan dengan beberapa materi tambahan dengan narasumber dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) dan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP).

Ekspose yang bertema “Dengan Melakukan *Risk-Asesment* yang Tepat, Kita Tingkatkan Mutu Preservasi Arsip Statis di ANRI” menjadi salah satu titik tolak yang

menunjukkan bahwa ANRI melalui Direktorat Preservasi serius untuk selalu melakukan peningkatan mutu. Nantinya, Instalasi Lab ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui autentikasi arsip statis. Oleh karena, selain mempertanggungjawabkan hasil pengujian secara ilmiah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian dalam rangka pelestarian arsip, ekspose ini pun memiliki tujuan untuk menjangar masukan dari berbagai pihak guna pengembangan laboratorium ke depan.

Acara ekspose dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan pembicara pertama Kombes Pol Drs. Siswanto (Kabid Dokupalfor Puslabfor Bareskrim Polri) yang mengulas materi Uji Kebenaran Dokumen/Arsip di Puslabfor Polri. Di Puslabfor Polri terdapat salah satu Bidang Dokupalfor yang menangani *risk* terkait uji kebenaran tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen, residu penembakan, produk cetak (cap stempel, blangko materai, tulisan ketik, tulisan cetak) serta uang rupiah dan asing. Uji kebenaran dokumen yang dilakukan Puslabfor Polri merupakan



Para Pembicara dan Moderator dalam acara ekspose hasil pengujian arsip dan bahan kearsipan

uji teknis terhadap dokumen. Paparan materi tersebut memberikan pencerahan bagi peserta mengenai cara uji kebenaran dokumen secara teknis di Puslabfor Polri. ANRI pun dapat menjadi mitra kerja Puslabfor, khususnya Dokupalfor ketika akan melakukan perbandingan terhadap dokumen, misalnya: membandingkan tanda tangan yang terdapat dalam arsip statis yang dilestarikan ANRI dengan suatu dokumen yang diuji teknis oleh Dokupalfor.

Pembicara kedua dalam sesi pertama yakni Drs. Taufan Hidayat, M. Kom. (Peneliti BBPK) membahas Penggunaan Kertas untuk Arsip dan Bahan Kearsipan. Melalui materi tersebut peserta memperoleh gambaran mengenai kriteria kertas yang baik untuk digunakan sesuai dengan retensi informasi yang terkandung

di dalamnya. Selain itu, dalam sesi pertama dilaksanakan ekspose dua hasil pengujian, yakni Hasil Pengujian Kertas yang Digunakan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pusat yang dipaparkan Sari Hasanah, S.Si. dan Hasil Pengujian Kondisi Fisik Arsip Kertas *Burgerlijke Openbaare Werken* (BOW) dan *Inlandsche Zaken* yang dipaparkan Euis Shariasih, S.Si., M.Hum.

Sesi kedua ekspose menghadirkan pembicara Dwi Sugipriatini, S.Si., M. Si. (Peneliti BBUSKP) yang mengulas materi Perlindungan dan Pencegahan Kerusakan Arsip oleh Jamur dan Serangga. Pada pembahasan materi ini diperoleh masukan mengenai cara efektif yang dapat dilakukan guna melindungi dan mencegah kerusakan arsip oleh jamur dan serangga serta cara mencegah agar terhindar

sifat patogenik jamur dan serangga yang terdapat dalam arsip terhadap kesehatan manusia. Pada sesi ini pun diekspose dua hasil pengujian, yakni Hasil Pengujian Identifikasi Jamur pada Ruangan Penyimpanan Arsip di ANRI yang dipaparkan Wiwi Diana Sari, S.Si., M.A., dan Hasil Pengujian Arsip Film dan Mikrofilm Koleksi ANRI yang dipaparkan Roby Syafurjaya, A.Md.Ak.

Ekspose Pengujian Arsip dan Bahan Kearsipan ini ditutup secara resmi oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, Mustari Irawan. Sesaat sebelum menutup acara, beliau menyampaikan bahwa tahun depan, Instalasi Lab ANRI siap untuk melaksanakan sertifikasi ISO 9001:2008. (TK)

# SOSIALISASI UU 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN, MENUJU PENGELOLAAN KEARSIPAN DI PALEMBANG YANG LEBIH BAIK

**PALEMBANG, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan sosialisasi UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Swarna Dwipa, Senin 1 Oktober 2012 bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila. Acara diselenggarakan oleh Direktorat Kearsipan Daerah ANRI dengan dihadiri oleh sekitar 80 peserta yang terdiri anggota DPRD, Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, Arsiparis, dan beberapa pegawai Badan Arsip Daerah Sumatera Selatan.

Tak lepas dari perhatian wartawan media cetak maupun elektronik, acara dibuka tepat pukul 08.00 oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni. Disampaikan bahwa sosialisasi bertujuan memberikan kontribusi untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan sebagai acuan dan kerangka bagi penyelenggaraan kearsipan nasional, sehingga mampu mengoptimalkan peran arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif. Usai pembukaan dilanjutkan paparan tentang Kebijakan Kearsipan Nasional terkait dengan UU Kearsipan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Dini Saraswati.

Banyak hal yang ingin disampaikan oleh peserta untuk lebih memahami ilmu kearsipan, terbukti



Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Palembang

dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan. Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah III, Prihatni Wuryatmini dalam kesempatan ini menyampaikan banyak hal tentang kearsipan menjawab pertanyaan dari peserta, mewakili Sekretaris Utama dan Deputi IPSK yang meninggalkan acara karena harus menghadiri rapat pimpinan ANRI di Jakarta. Prihatni Wuryatmini menyatakan bahwa arsiparis harus bisa tegar sehingga dimana pun ditempatkan harus bisa membaur dan membawa perubahan menuju keadaan yang lebih baik. "Arsip jangan dianggap tidak apa-apanya, bahwa arsip banyak menyumbangkan sumbangsih," tegasnya.

Acara ditutup oleh Kepala Badan Arsip Daerah Sumatera Selatan, Muhammad Daud dengan menyampaikan harapan kepada peserta untuk kemajuan kearsipan agar membaca kembali UU Kearsipan,

dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Kearsipan yang telah dibagikan dan yang telah disampaikan guna peningkatan kualitas pekerjaan di bidang kearsipan. Kepala Badan Arsip Daerah juga bertekad untuk memajukan kearsipan.

Di ruang terpisah diselenggarakan bimbingan dan konsultasi tentang pengelolaan arsip aset dengan 20 peserta. Bimbingan dan konsultasi kearsipan dilaksanakan dengan pembicara Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI, Zita Asih Suprastiwi dan seorang arsiparis, Sriyanta. "Ini semua terkait dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban yang dimana kita semua selaku aparat pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baik dan benar. Secara baik, baik sistemnya, secara benar sesuai dengan peraturan peundang-undangannya", demikian diungkapkan oleh Sekretaris Utama ANRI. (Spy)

# HIMPUN MASUKAN DARI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH, ANRI GELAR RAKOR HARMONISASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERKA



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Asichin saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala (Perka) ANRI sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

**YOGYAKARTA, ARSIP** - Bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Koordinasi Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala (Perka) ANRI sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Acara yang dihadiri oleh pimpinan lembaga kearsipan daerah di Indonesia diselenggarakan sejak tanggal 17-19 Oktober 2012.

Dalam laporan kegiatan, ketua panitia yang sekaligus Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI, Zita Asih Suprastiwi, SH menyatakan bahwa Penyelenggaraan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka menjalin masukan dari peserta rapat, sehingga materi muatan Peraturan Kepala ANRI nantinya dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan kearsipan sekaligus sebagai instrumen kebijakan untuk menegakkan prinsip dan keadilan kearsipan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Acara dibuka langsung oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum. Dalam sambutannya Kepala ANRI mengungkapkan, "Rakor ini adalah momentum yang baik karena sebagai upaya membangun koordinasi dan sinkronisasi lembaga kearsipan daerah di tingkat provinsi. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu dan komprehensif".

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Kebijakan Kearsipan Nasional, Penetapan dan Implementasinya oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan merangkap sebagai Plt. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Dra. Dini Saraswati, MAP. Pemapar materi berikutnya oleh Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Otda, Wachyu Nadjib, SH yang menjelaskan tentang Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Penetapan NSPK untuk Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintah

Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada sesi selanjutnya peserta yang hadir dibagi ke dalam tiga Komisi. Komisi I membahas Rancangan Perka tentang Standar Penetapan Retensi Arsip Sektor Perekonomian dengan narasumber Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Rudi Anton, SH, MH dan Direktur Kearsipan Daerah Widarno, SH. Komisi II membahas Rancangan Perka tentang Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Perseorangan serta Rancangan Perka tentang Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip dengan narasumber Direktur Akuisisi Drs. Kandar, MAP dan Direktur Pengolahan Drs. Azmi, M.Si. Komisi III membahas Rancangan Perka tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip dengan narasumber Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis Rini Agustiani, SH., MAP.

Acara yang diselenggarakan di Kota Gudeg itu menghasilkan rumusan berupa rekomendasi pembahasan dari seluruh komisi dan dibacakan oleh salah satu peserta rakor. Selanjutnya hasil rekomendasi diserahkan langsung kepada Sekretaris Utama ANRI Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum. Acara resmi ditutup oleh Sekretaris Utama ANRI dan dilanjutkan dengan foto bersama para narasumber, peserta rakor dan panitia penyelenggara. (SA)

# WAMEN PAN DAN RB BUKA RAKOR PRESERVASI ARSIP



Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Prof. Eko Prasajo secara resmi membuka acara “Penyelamatan Marwah Bangsa melalui Preservasi Arsip Statis”, Jakarta 7 November 2012

**JAKARTA, ARSIP** - Dalam rangka mengkoordinasikan upaya preservasi dan melakukan sinergi tentang pemeliharaan, perawatan dan pelestarian arsip di seluruh wilayah Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Preservasi Arsip di Daerah Tropis yang bertempat di Park Hotel, Jln. D.I. Pandjaitan Kav.5 Jakarta. Rakor yang mengangkat tema “Penyelamatan Marwah Bangsa melalui Preservasi Arsip Statis” dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Prof. Eko Prasajo pada 7 November 2012 pukul 19.00 WIB. Dalam rangkaian pembukaan acara ini dilaksanakan pula penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 untuk Layanan Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Statis.

Wamen PAN dan RB dalam arahannya menyerukan bahwa pengelolaan arsip di daerah jangan sampai disepelekan. “Pemerintah daerah pun memiliki peranan dalam melestarikan arsip penting negara.



Penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 untuk Layanan Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Statis.

Oleh karenanya diperlukan penyamaan persepsi agar pengelolaan arsip tak lagi dijadikan beban, salah satunya dengan penyelenggaraan rakor ini ,“terangnya. Beliau pun menyampaikan harapannya bahwa kepala daerah harus fokus membenahi kearsipan di wilayahnya.

Rakor yang diikuti 150 peserta terdiri dari Kepala Lembaga Kearsipan Provinsi dan pejabat yang membidangi preservasi arsip, Kepala Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota di Jabodetabek, Kepala Unit Kearsipan Lembaga Negara, Kepala Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, akademisi di bidang kearsipan, dan



Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Prof. Eko Prasjo saat memberikan arahan pada acara "Penyelamatan Marwah Bangsa melalui Preservasi Arsip Statis", Jakarta 7 November 2012

arsiparis ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 7 s.d 9 November 2012. Dalam rakor ini menghadirkan pula delegasi Corts Foundation dari Belanda sebagai pembicara, yakni Frans Smit yang membahas materi "*Archives Plan and Digital Archives Systems: How to Create the Infrastructure for Digital Preservation*" dan Hans van Dormolen yang mengulas materi "*Preservation Imaging, and Standards for Scanning and Digital Photography*". Sedangkan pembicara dari dalam negeri melibatkan Prof. Dr. Dodi Nandika dengan materi "Strategi Penanggulangan dan Pencegahan Faktor-faktor Perusak Arsip", Prof. Dr. Noerhadi Magetsari dengan materi "*Mass Conservation : Strategi Preservasi di Indonesia*", Syamsul Bahri, SH. M.Si. yang membahas "Strategi Pelestarian Naskah Kuno di Indonesia", Syarif Hidayat yang membahas "Produksi Kertas dalam Negeri untuk Mendukung Preservasi Arsip dan Naskah Secara Nasional", Dr. Mukhlis PaEni yang mengulas "Preservasi Arsip dalam Kerangka *Memory of the World (MOW)*: Persiapan Pengajuan Arsip Konferensi



Suasana Rakor

Asia Afrika sebagai MOW", dan Dr. Ir. Fatimah Zulfah yang mengulas "Prosedur Pengajuan dan Registrasi MOW".

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penyelenggaraan rakor yang diprakarsai ANRI ini yaitu tercapainya bentuk penyelamatan dan pelestarian arsip di daerah tropis yang diharapkan mampu memberikan solusi optimal dan menyeluruh, terutama dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan arsip konvensional maupun media

baru, dengan melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif. Pada akhir rangkaian acara Rakor Preservasi Arsip di Daerah Tropis, dilaksanakan tiga sidang komisi untuk kemudian dilakukan perumusan rekomendasi yang diserahkan kepada Kepala ANRI. Komisi I membahas preservasi arsip konvensional, komisi II membahas preservasi arsip media baru dan komisi III membahas arsip dan MOW. (TK)

# MOU ANRI DENGAN PP MUHAMMADIYAH AKAN LAKSANAKAN PENGARSIPAN ARSIP KUNO DAN MODERN MILIK MUHAMMADIYAH



Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Din Samsuddin dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani *Memory of Understanding* (MoU) antara ANRI dengan PP Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat, pada 16 November 2012

**JAKARTA, ARSIP** - Alunan Ayat suci Al-Quran mengawali pelaksanaan penandatanganan *Memory of Understanding* (MoU) antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan PP Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat, pada 16 November 2012. Acara ini dihadiri oleh Kepala ANRI H.M Asichin, SH., M.Hum, Deputi Bidang Konservasi Arsip Drs. Mustari Irawan, MPA, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan merangkap Plt. Deputi Bidang Pembinaan Dra. Dini Saraswati, MAP beserta jajarannya serta Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Din Samsuddin, Sekretaris PP Muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed, Ketua MPI PP Muhammadiyah Drs. H. Muchlas, MT beserta jajaran PP Muhammadiyah. Adapun ruang lingkup pelaksanaan MoU ini yakni pembinaan sistem pengelolaan arsip, akuisisi arsip, preservasi arsip, akses



Prof. Dr. Din Samsuddin saat memberikan sambutan

arsip, dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak selama tiga tahun.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI mengungkapkan bahwa MoU pertama dengan PP Muhammadiyah pada Tahun 1995 dan sejak itu, ANRI telah menyimpan ribuan arsip milik Muhammadiyah berupa surat keputusan, foto kegiatan tokoh Muhammadiyah, himbauan dan lain-lain yang pernah dikeluarkan PP Muhammadiyah sejak 1912 – 1989 dan di ANRI telah disimpan dokumen

milik Muhammadiyah sejak 1922-1989. Dokumen tersebut sangat bermanfaat bagi para peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum sebagai sumber primer di ANRI tentang sejarah Muhammadiyah. Kepala ANRI pun mengharapkan agar arsip PP Muhammadiyah dapat diakuisisi untuk dilestarikan demi kemaslahatan umat. Melalui MoU ini dapat menambah khazanah arsip Muhammadiyah periode 1912 – 2012 sehingga masyarakat dapat mengetahui peranan tokoh Muhammadiyah terdahulu. Beliau menilai bahwa penandatanganan MoU ini sebagai bentuk persahabatan dan persaudaraan yang dapat membawa manfaat bagi umat bersama.

Prof. Dr. Din Samsuddin pun menyampaikan harapannya agar naskah MoU ini tidak bernasib hanya sebagai arsip tetapi benar-benar dilaksanakan dan direalisasikan dengan





Kepala ANRI dan Ketua Umum Muhammadiyah membuka Pameran Arsip 100 Tahun Muhammadiyah

diawali dibentuknya tim/kelompok kerja dari ANRI, PP Muhammadiyah dan MPI PP Muhammadiyah agar segera action dalam kegiatan pengarsipan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, arsip merupakan kekayaan organisasi yang sangat berharga. Melalui arsip, masyarakat dapat mengetahui peran dan sumbangsih Muhammadiyah bagi negara. "Kami punya mimpi *digital library*, akan dibuat di kantor PP Muhammadiyah Jl. KH. Ahmad Dahlan 103, Yogyakarta, sampai saat ini masih dalam proses, semoga segera bisa terlaksana, agar memudahkan pencarian data pustaka terkait Muhammadiyah," tambah Din. Mengenai arsip zaman penjajahan sampai era kemerdekaan yang diselamatkan dan dilestraiakan oleh ANRI, pada kesempatan ini Ketua Umum Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas pengumpulan arsip



Prof. Dr. Din Samsuddin didampingi H.M Asichin, SH., M.Hum saat mengunjungi kegiatan sosialisasi kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip

Muhammadiyah yang tidak dimiliki Muhammadiyah tapi dimiliki ANRI.

Usai rangkaian acara penandatanganan MoU, Kepala ANRI dan Ketua Umum Muhammadiyah membuka Pameran Arsip 100 Tahun Muhammadiyah di tempat yang sama. Pameran yang bertema "Meretas Jejak Muhammadiyah Di Bumi Nusantara" memamerkan khazanah

arsip ANRI yang berhubungan dengan perkembangan Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini akan mengungkapkan berbagai kenyataan tentang perkembangan Muhammadiyah yang mungkin selama ini juga tidak terlalu diketahui oleh warga Muhammadiyah.

Setelah mengunjungi Pameran Arsip Muhammadiyah Prof. Dr. Din Samsuddin didampingi H.M Asichin, SH., M.Hum menyempatkan diri untuk mengunjungi kegiatan sosialisasi kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip yang ditempatkan di depan Lobby Gedung Dakwah Muhammadiyah. Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula penayangan film dokumenter tentang Sejarah Perjalanan Bangsa dan Tokoh Nasional Soekarno-Hatta yang bersumber pada khazanah arsip ANRI. (FIR)

# DIKLAT KEARSIPAN BAGI WARGA PALESTINA

**JAKARTA, ARSIP** - Senin, 20 November 2012, Sebanyak lima peserta dari negara sahabat Palestina mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) kearsipan bagi warga Palestina yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Diklat yang bertajuk *“Training on Records and Archives Management: Vital Records Program for Palestine”* dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI M. Asichin, SH. M.Hum dan dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdewi, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan dari Bagian Arsip Bank Indonesia serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan ANRI.

Dalam sambutannya Kepala ANRI M. Asichin mengatakan bahwa Diklat ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen rapat menteri-menteri yang tergabung dalam NAASP (Kemitraan Strategis Asia-Pasifik yang Baru) tentang pembangunan kapasitas untuk bangsa Palestina yang dibuka Presiden RI pada 14 Juli 2008 di Jakarta. “Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam pengelolaan arsip vital. Bangsa Palestina dalam situasi seperti saat ini harus tetap memiliki kesadaran dan perhatian penuh bahwa memori kolektif dan jati diri bangsa Palestina dipelihara dan dikelola dengan efektif dan efisien oleh masing-masing



Penyematan tanda peserta diklat bagi warga Palestina oleh Kepala ANRI, M. Asichin Jakarta, 11 November 2012

lembaga pemerintahnya,” lanjut M. Asichin.

Sementara itu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdewi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bangsa Indonesia yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang luar biasa terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam membebaskan diri dari penjajahan zionis israel. “Pesan saya kepada seluruh peserta agar memperhatikan betul semua materi yang didapat dari pendidikan dan pelatihan ini agar berguna dan dapat diterapkan di negara kita, kehadiran saudara-saudara di Indonesia juga dapat melihat dan merasakan

bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia mendukung perjuangan kita di Palestina,” tuturnya.

Diklat kearsipan bagi rakyat Palestina ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya sejak tahun 2009. Dipilihnya materi diklat Program Arsip Vital karena diharapkan melalui diklat ini para peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan arsip vital yang sangat penting bagi eksistensi, kelangsungan operasi dan perlindungan hak organisasi. Tema ini sangat relevan bagi saudara-saudara kita dari Palestina yang sedang menghadapi masalah politik, keamanan, dan pertahanan di negerinya.



Sambutan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdewi.

Selain belajar tentang pengelolaan arsip vital peserta juga melakukan kunjungan ke Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan berbagai fasilitas yang dimiliki ANRI lainnya seperti ruang penyimpanan arsip media baru dan konvensional, ruang layanan arsip, dan preservasi arsip.

Kunjungan juga dilakukan ke Depo Arsip Vital Bank Indonesia Jakarta dan Proses pengelolaan arsip di Bank Indonesia cabang Bandung. Program Diklat kearsipan bagi rakyat Palestina ini dikemas dalam suasana penuh persahabatan dan kekeluargaan. Di sela-sela kegiatan diklat mereka diajak untuk melihat kota Jakarta baik pada siang maupun malam harinya. Tidak lupa mereka diajak untuk sholat di Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Adzikro Sentul, Bogor. Di Bandung mereka mengunjungi Museum Asia-Afrika dan Saung Angklung Udjo untuk melihat berbagai atraksi kesenian Jawa Barat diantaranya permainan angklung yang merupakan warisan

budaya Indonesia yang telah diakui dunia.

Kesan mendalam terhadap kegiatan ini dirasakan semua peserta seperti yang disampaikan oleh Mr. Nidal A.N Awad Azmeya dari Kementerian Luar Negeri Palestina bahwa mereka pada awalnya tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang luar biasa seperti ini. Kunjungan ke Indonesia ini membawa kesan yang mendalam bagi mereka, karena selain materi diklatnya yang penting juga keramahan dan kehangatan masyarakat Indonesia sangat terasa. "Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara yang pernah kami kunjungi sebelumnya sekalipun itu negara arab selain alamnya yang indah ternyata orang Indonesia jauh lebih ramah dari yang dibayangkan kami sebelumnya," tutur Nidal mewakili teman-temannya.

Diklat yang berlangsung selama lima hari ini dilaksanakan di ANRI

Jakarta, Pusdiklat Kearsipan Bogor, Bank Indonesia Jakarta dan Bank Indonesia Cabang Jawa Barat Peserta Diklat Kearsipan bagi warga Palestina tahun 2012 yaitu : Mr. MOTASEM W.A FKHAIDA AMAL dari *Palestine National Archives*, Mr. NASSER Y.M ISSA JALEELA dari *President Office*, Mr. SAED H.A ABUSHAMMA dari *Palestine National Archives*, Mr. NIDAL A.N AWAD AZMEYA dari *Ministry of Foreign Affairs* dan MAHMOUD A.K QENDAH.(MI)

# ANRI SELENGGARAKAN EKSPOSE GUIDE ARSIP WILAYAH PERBATASAN NKRI



Kepala ANRI, M. Asichin saat memberikan arahan sebelum membuka acara Ekspose Guide Arsip Wilayah Perbatasan NKRI.

**JAKARTA, ARSIP** - Sebagai salah satu wujud keseriusan dalam mengelola arsip statis yang berkaitan dengan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Pengolahan melaksanakan Ekspose Guide Arsip Wilayah Perbatasan NKRI pada 28 November 2012. Ekspose ini dilaksanakan di Swiss-Bell Hotel, Jln. Kemang Raya No. 7 Jakarta Selatan dan diikuti 55 orang peserta, baik berasal dari internal ANRI maupun eksternal ANRI. Kegiatan ekspose bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dan tanggapan dari narasumber, pembicara dan peserta ekspose agar tercipta guide arsip yang baik

Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial Dr. Ing. Khafid yang menyampaikan



Peserta Ekspose Guide Arsip Wilayah Perbatasan NKRI

Status Terkini Batas Wilayah NKRI. Selanjutnya Direktur Pengolahan, Drs. Azmi, M.Si yang menjelaskan Kebijakan Pengolahan Arsip Statis dalam Rangka Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Arsip Statis di ANRI. Kemudian Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Eko Subowo menyampaikan Kebijakan, Kewenangan, dan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008.

Materi selanjutnya disampaikan Kepala Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi, Sigit PD yang membahas Permasalahan Pulau-Pulau Terkecil Terluar Wilayah Perbatasan RI. Kemudian materi penutup disampaikan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Rudi Anton, SH., MH. yang memaparkan Penyelenggaraan Arsip Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Hukum Kearsipan. Pada kesempatan ini beliau memaparkan bahwa arsip yang menyangkut masalah perbatasan merupakan salah satu dari arsip yang dikategorikan sebagai arsip terjaga sebagaimana diatur pada UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (TK)

# JALIN KEAKRABAN DENGAN MEDIA MASSA, ANRI SELENGGARAKAN SARASEHAN WARTAWAN



Kepala ANRI, M. Asichin (tengah) sebagai narasumber didampingi Sekretaris Utama, Gina Masudah Husni (kiri) dan Deputi Bidang Informasi dan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati (kanan) pada acara *Talk show* sarasehan wartawan yang mengusung tema "Mengetahui Lebih Dekat Lembaga Pelestari Memori Kolektif Bangsa" dipandu oleh Dona Amelia.

**JAKARTA, ARSIP** - Dalam rangka menjalin keakraban antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan media massa, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) ANRI menyelenggarakan Sarasehan Wartawan pada 29 November 2012 bertempat di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Lantai 2, Gedung C ANRI. Sebanyak 35 wartawan ikut serta dalam acara sarasehan wartawan ini. Turut hadir pula para pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI dan perwakilan Bagian Humas instansi pemerintah paguyuban Kementerian PAN dan RB.

Sarasehan wartawan yang mengusung tema "Mengetahui Lebih Dekat Lembaga Pelestari Memori Kolektif Bangsa" ini dikemas dalam



Foto bersama para pemenang Lomba Karya Tulis Kearsipan

suatu *talk show* yang menghadirkan Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum., sebagai narasumber didampingi Sekretaris Utama, Gina Masudah Husni dan Deputi Bidang Informasi dan system Kearsipan, Dra. Dini Saraswati, MAP. *Talk show* ini dipandu oleh Dona Amelia.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan pula penyerahan penghargaan

kepada pemenang Lomba Karya Tulis Tahun 2012. Dalam *talk show*-nya Kepala ANRI menyampaikan bahwa ANRI mempunyai peran masa lalu yakni memberikan bukti sejarah, bukan menafsirkan yang terkandung dalam arsip, serta masa datang yakni memberikan pencerahan kehidupan kebangsaan.

Usai *talk show*, peserta sarasehan wartawan diajak untuk bersafari ke tempat penyimpanan arsip media baru. Di sana para peserta diperlihatkan wujud salah satu kiprah ANRI dalam melestarikan memori kolektif berupa penyimpanan arsip media baru. Selain itu, ANRI pun akan memberikan apresiasi bagi tiga wartawan untuk kategori liputan terbaik sesuai tema sarasehan wartawan. (TK)

# ANRI DAN BKN TANDATANGANI PERATURAN BERSAMA PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PNS DAN PEJABAT NEGARA

**JAKARTA, ARSIP** - Tepat pukul 12.00 WIB, 12 Desember 2012 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Asichin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno menorehkan satu peristiwa penting di Ruang Serba Guna Soemartini, Gedung A, Lantai 2, ANRI. Peristiwa penting pada tanggal “cantik” ini merupakan pengesahan atas Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara. Acara penandatanganan dihadiri oleh pejabat eselon I, II, dan III terkait di lingkungan ANRI dan BKN.

Peraturan Bersama Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 mengatur retensi arsip kepegawaian PNS dan Pejabat Negara lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut implementasi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Retensi arsip merupakan jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Dalam pedoman retensi arsip yang disahkan tersebut memuat jenis arsip/ dokumen, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI mengungkapkan bahwa pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian diperlukan dalam rangka



Penandatanganan peraturan bersama Kepala ANRI, M. Asichin (kanan) dan Kepala BKN, Eko Sutrisno (kiri) tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

pendayagunaan arsip kepegawaian demi tercapainya ketertiban dalam pemeliharaan arsip dinamis untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip serta memudahkan dalam penyusutan arsip sehingga dapat menyelamatkan arsip yang bernilai guna bagi pertanggungjawaban nasional atau arsip statis. “Arsip statis ini kemudian disimpan di ANRI agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa,” tambahnya.

Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat

Negara akan digunakan lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai dasar penyusunan JRA Kepegawaian bagi setiap lembaga negara dan pemerintahan daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Bersama Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012, maka Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara dicabut dan tidak berlaku. (TK)



## Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Keberadaan PPID ANRI ini pun sesuai dengan salah satu misi ANRI yakni memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Melalui PPID ANRI, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi ANRI sebagai badan publik dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan bangsa khususnya di ANRI.



### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7  
Jakarta 12560  
Telp : 62-21 7805851 Ext. 118/261/404  
Fax : 62-21 7810280  
Email : [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)



## Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Arsip dengan Pelayanan yang Lebih Baik

ANRI adalah lembaga kearsipan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis sesuai dengan Misi ANRI dalam "memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa" menjadi pokok perhatian dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan. ANRI melalui Sub Direktorat Layanan Arsip menyajikan arsip-arsip statis bernilai guna historis untuk dijadikan sumber penelitian yang autentik dan terpercaya. Arsip-arsip yang disajikan meliputi arsip periode *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan periode republik.

### SARANA DAN PRASANA LAYANAN ARSIP

Ruang Layanan Arsip (Meja Baca, Sarana Listrik untuk penggunaan *Notebook*), Ruang Katalog (Inventaris Arsip dan Literatur Penunjang Penelitian), Layanan Arsip Elektronik (Sistem Informasi Kearsipan Statis), Layanan Digital untuk *Regeerings Almanak*, Layanan *Preview Film*, Alat Baca *Micro Reader*, Alat Dengar Rekaman Suara, Perpustakaan Khusus (Khusus Penunjang, Penelitian Kearsipan), Penerbitan Sumber : Informasi arsip pilihan (tematik) dalam bentuk buku

### WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis	08.30 - 15.30
Jum'at	08.30 - 15.30
Istirahat	12.00 - 13.00

### KONTAK

Sub Direktorat Layanan Arsip  
Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jl. Ampera Raya No.7, Jakarta 12560  
Telp. 021-7805851 Ext. 128, 129, 133, 244, 118  
Faks. 021-7810280